



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

PUPR 2023

INFORMASI  
STATISTIK  
INFRASTRUKTUR  
PUPR

2023



KEMENTERIAN  
PEKERJAAN  
UMUM DAN  
PERUMAHAN  
RAKYAT



INFORMASI  
STATISTIK  
INFRASTRUKTUR

2023

# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2023

Setia Dewi Prihapsari  
Mayta Utari  
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi  
Naufal Azaki  
Rozi Abrori Fathurrochim  
Nita Fikhriani Azhari  
Shinta Afwa Nisaa

Maret, 2024

**Pemegang Hak Cipta**  
Pusat Data dan Teknologi Informasi

**No. ISBN**

**Diterbitkan Oleh**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**Informasi lebih lanjut**  
pusdatin@pu.go.id



## KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan kontribusi, baik data dan informasi maupun masukan positif dalam penyusunan Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur PUPR Tahun 2023 ini.

Pada edisi ini, BIS dirancang dengan menyesuaikan kontekstualisasi agenda prioritas nasional sehingga menyajikan berbagai data statistik infrastruktur PUPR yang termasuk dalam data prioritas Satu Data Indonesia. Data yang disajikan diperoleh dari kolaborasi dengan produsen data baik internal maupun eksternal. Berbagai data tersebut telah melewati proses pengolahan dan penjaminan mutu, serta disajikan dalam satuan tingkat nasional, provinsi, beserta analisis singkatnya.

Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur PUPR Tahun 2023 dapat diakses melalui Portal Open Data ([data.pu.go.id](http://data.pu.go.id)). Portal Open Data dibangun sebagai salah satu bentuk bagi pakai dan integrasi data terbuka di Kementerian PUPR. Di dalamnya juga tersedia dataset, visualisasi, infografis, artikel data, dan berbagai layanan terkait ekosistem data Kementerian PUPR yang dapat dengan mudah diakses oleh publik.



Kami berharap penyusunan BIS 2023 ini menjadi salah satu implementasi dari pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan menghasilkan produk yang menjadi sumber referensi terkait data dan informasi infrastruktur PUPR. Upaya ini adalah ikhtiar mewujudkan *data driven organization* dan *evidence-based policy*, di mana seluruh proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi didasarkan pada data yang kredibel serta akurat.

Jakarta, Maret 2024

**Mohammad Zainal Fatah**  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# DAFTAR ISI

## INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR

09

### GAMBARAN UMUM

#### INDONESIA

Geografis Wilayah	10
Administrasi	12
Wilayah	
Demografi	14
Wilayah	
Ekonomi Wilayah	15
Indeks Kemahalan	19
Konstruksi (IKK)	

37

### BINA MARGA

Jalan Nasional	39
Jalan Daerah	42
Jalan Tol Beroperasi	47
Jalan Tol Konstruksi	50
Jembatan	52
Jembatan Khusus	53
Jembatan Gantung	54

21 **APBN PUPR** 22

APBN  
Kementerian  
PUPR

25

### SUMBER DAYA AIR

Bendungan Beroperasi	28
Danau, Situ, Embung	31
Pengendali Sedimen	35

57

### CIPTA KARYA

Sistem Penyediaan Air Minum	58
Kinerja BUMD Air Minum	60
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	65
IPAL	67
IPLT	69
Bina Penataan Bangunan	71
PLBN	73
Fasilitas Pendidikan	74
Sarana Olahraga	76
Pasar Rakyat	77
Pengembangan Kawasan Permukiman	78

81

### PERUMAHAN

Rumah Susun	83
Rumah Khusus	86
Bantuan Stimulan	89
Perumahan Swadaya	
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)	92

### BINA KONSTRUKSI

Badan Usaha Jasa Konstruksi	96
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi	99
Tenaga Kerja Konstruksi	104

95

111

### SUMBER DAYA MANUSIA

Pengarusutamaan Gender	118
------------------------	-----

123

### PENUTUP

Data dapat diakses melalui



data.pu.go.id



Bukit Sibeabea, Sumatera Utara



# GAMBARAN UMUM INDONESIA



BAB

# 01

# GAMBARAN UMUM INDONESIA

# 01

## GEOGRAFIS WILAYAH

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2023 Indonesia memiliki 17.001 pulau, termasuk 6 pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Timor, dan Papua). Hal tersebut, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di Asia dengan luas wilayah Indonesia mencapai 1.892.410,09 km<sup>2</sup>. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan serta antara 94° 58' 21" sampai dengan 141° 01' 10" Bujur Timur serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Secara letak geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut dan Samudra Hindia di sebelah Barat. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia di sebelah Barat Laut dan Benua Australia di sebelah Tenggara.

### BATAS-BATAS NEGARA

#### Sebelah Utara

Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan

#### Sebelah Selatan

Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia

#### Sebelah Barat

Samudra Hindia

#### Sebelah Timur

Papua Nugini dan Samudra Pasifik



Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 28,25% dari total luas Indonesia atau sebesar 534.698,46 km<sup>2</sup>. Pulau Kalimantan juga merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk Papua Nugini). Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Pulau Kalimantan merupakan Provinsi terluas yang ada di Indonesia dengan luas sebesar 153.443,91 km<sup>2</sup>. Sementara itu, Kalimantan Timur yang menjadi lokasi untuk perpindahan Ibu Kota Nusantara memiliki luas sebesar 126.981,28 km<sup>2</sup> dan merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia.

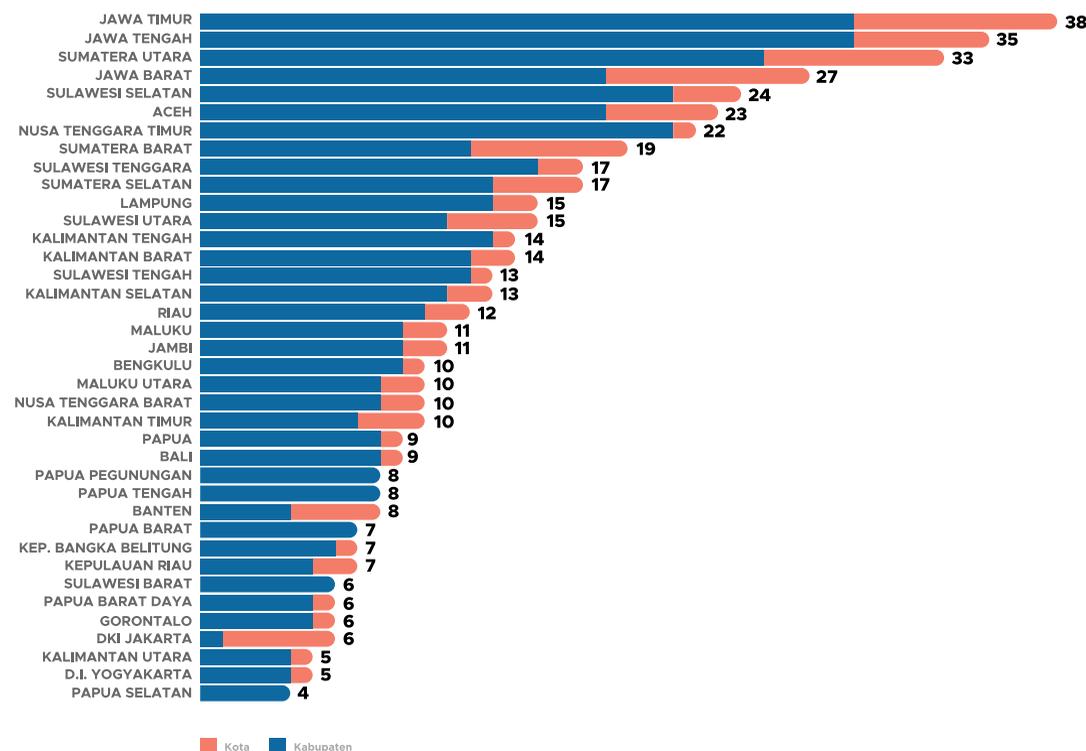


# ADMINISTRASI WILAYAH

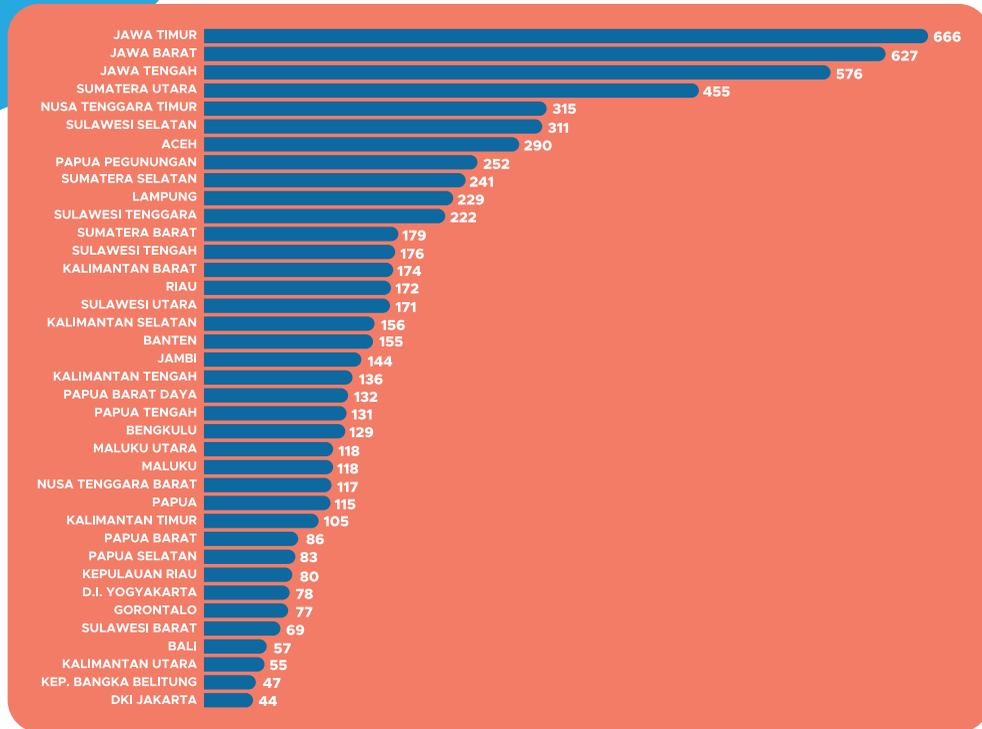
Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh para Menteri yang ditunjuk. Pemerintah menerapkan prinsip otonomi daerah karena Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar serta kondisi geografi dan budaya yang beragam. Diselenggarakannya otonomi daerah menandakan Pemerintah mengakui kemandirian masyarakat dan daerah otonom tersebut. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota dengan pemerintahan daerahnya masing-masing. Sejak berlakunya Daerah Otonom Baru (DOB) pada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia resmi memiliki 38 Provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota.

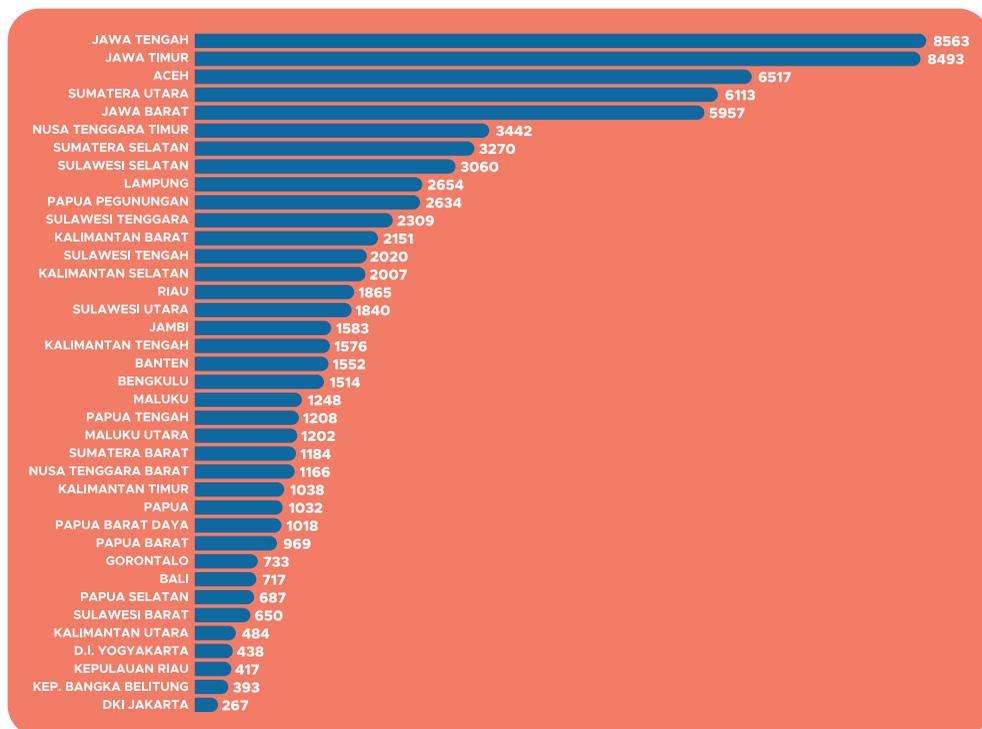
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 29 kabupaten. Provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota. Sementara untuk jumlah kecamatan dan desa di tahun 2023 tercatat sebanyak 7.288 kecamatan dan 83.971 desa.



**Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2023**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)



**Jumlah Kecamatan Berdasarkan Provinsi Tahun 2023**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)



**Jumlah Desa Berdasarkan Provinsi Tahun 2023**  
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

## DEMOGRAFI WILAYAH

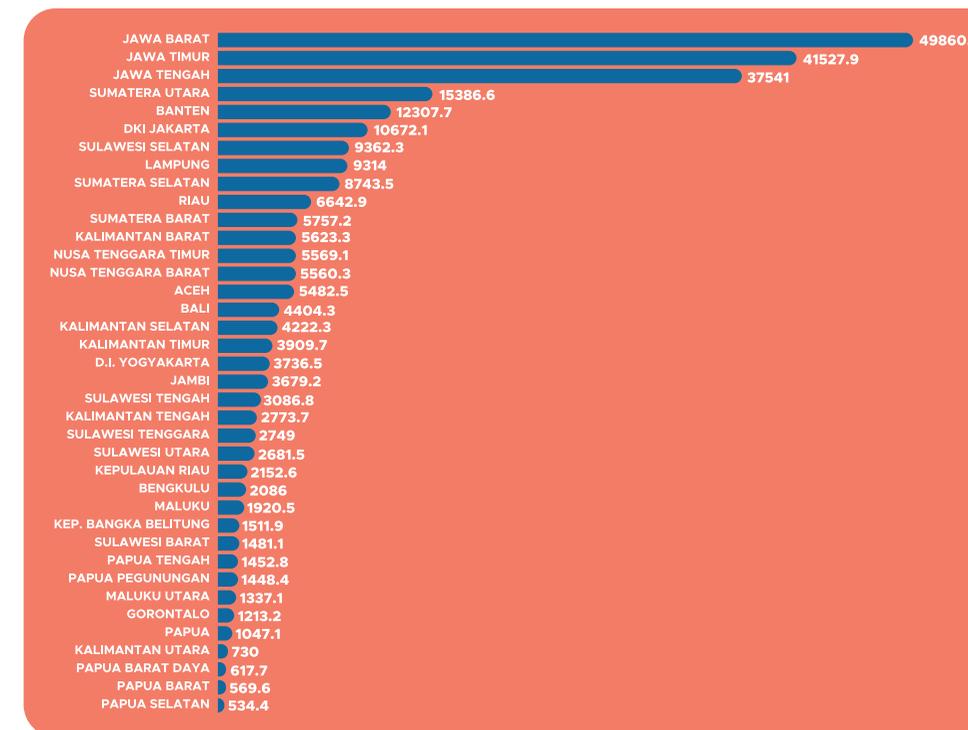
Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, serta bahasa daerah yang beragam. Meskipun banyak perbedaan adat dan budaya yang ada di Indonesia tak lantas menjadikan Indonesia bercerai-berai. Justru hal itu yang membuat Indonesia memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Sebagai negara yang majemuk, toleransi dan kerukunan menjadi nilai yang tertanam dalam Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan data BPS dalam sensus penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air. Jumlah populasi suku Jawa mencapai 40,22% dari total populasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2023 mencapai 278.696,2 ribu jiwa. 3 Provinsi di pulau Jawa menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di

Indonesia yaitu sebanyak 128.929.2 ribu jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia yaitu 49.860,3 ribu jiwa. Provinsi Papua Selatan yang merupakan provinsi yang baru disahkan pada akhir tahun 2022 menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 534,4 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi BPS di tahun 2023 adalah sebesar 1,13%; melambat dibanding tahun 2022 yang mencapai 1,17%.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terdapat 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan jumlah bahasa terbanyak yaitu 326 bahasa daerah.

Sebaran penduduk Indonesia hingga tahun 2023 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 155.645,5 ribu jiwa atau setara dengan 55,8% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia. Pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.091,9 ribu jiwa atau sebesar 20,48% dari total penduduk Indonesia.



Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2023 (Ribu)

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

## EKONOMI WILAYAH

### PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SEKTOR KONSTRUKSI INDONESIA

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nilai PDB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB

merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. PDB disusun dengan mencakup 17 kategori lapangan usaha, mulai dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan, hingga Konstruksi.

Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB atas dasar harga

Sebaran penduduk Indonesia hingga tahun 2023 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 155.645,5 ribu jiwa atau setara dengan 55,8% dari total penduduk Indonesia



berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB atas dasar harga konstan.

Indikator laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kemajuan dan keadaan ekonomi dalam periode tertentu.

Perkembangan laju PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2020 mengalami koreksi cukup tajam sebagai imbas dari kondisi pandemi Covid-19,

dimana hampir semua aktivitas ekonomi mengalami penurunan/pelambatan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan PDB di tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga pertumbuhan berada pada level -2.07%. Pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan PDB mencapai 3.69%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan PDB kembali mengalami peningkatan pada level 5.31%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan PDB mencapai sebesar 5.05%.



*Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan.*

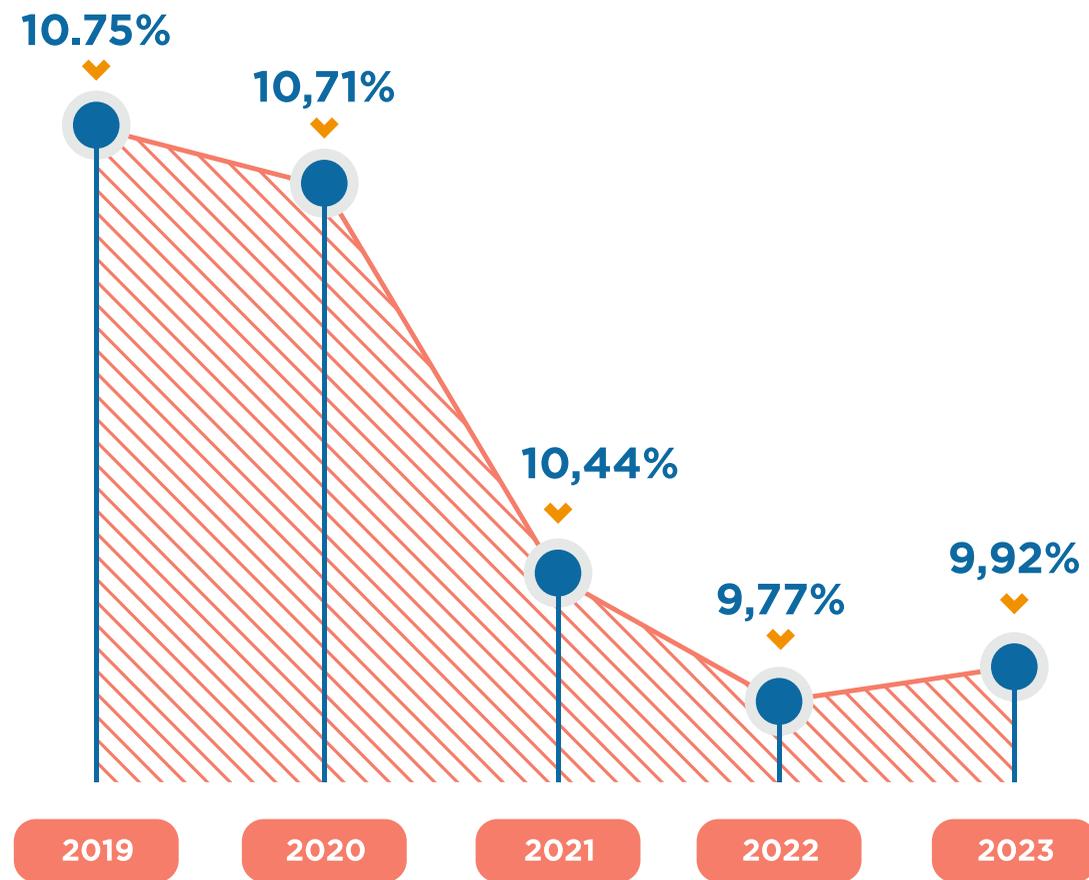


**Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

Infrastruktur adalah motor penggerak perekonomian suatu negara dan oleh karenanya pembangunan infrastruktur turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Aktivitas ini tercermin dalam sektor konstruksi dimana menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), konstruksi adalah kegiatan ekonomi berupa konstruksi umum dan

konstruksi pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Peran sektor konstruksi sendiri cukup besar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setidaknya dalam 5 tahun terakhir dimana rata-rata kontribusinya mencapai 10,31%. Adapun pada tahun 2023 kontribusinya mencapai 9,92% terhadap PDB Nasional.



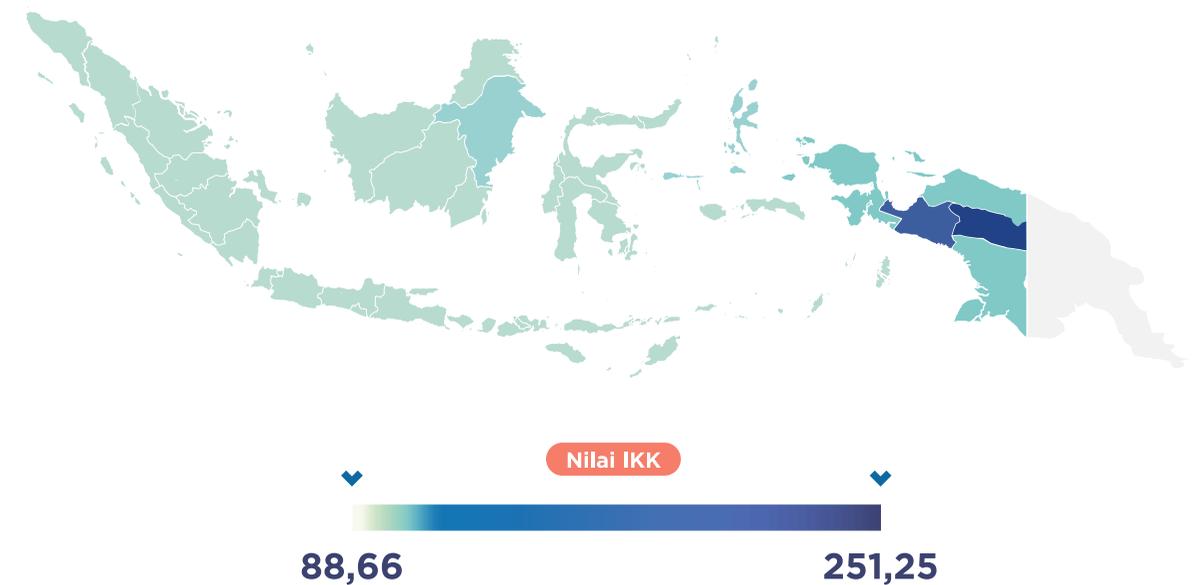
Persentase PDB Atas Harga Berlaku Sektor Konstruksi

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

## INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

Berkaitan dengan sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dimana semakin sulit letak geografisnya maka nilai IKK akan semakin tinggi yang mencerminkan tingginya tingkat

harga/biaya pembangunan di daerah tersebut. Indikator IKK telah dihitung dan digunakan sejak tahun 2003 dan terus mengalami penyesuaian dari segi metode dan formulasi perhitungannya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan sekaligus kesulitan aksesibilitas infrastruktur dan sektor konstruksi di suatu daerah. Pada tahun 2023, provinsi dengan nilai IKK tertinggi berada di Papua Pegunungan (251,25) dan Papua Tengah (215,86). Provinsi dengan IKK terendah berada di Lampung (88,65) dan Sumatera Selatan (91,39).



Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan Provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)





Gedung Kemen. PUPR, Jakarta Sumber : <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/06/the-power-of-energy-efficiency-to-achieve-net-zero-emissions.html>



**APBN**  
**KEMENTERIAN**  
**PUPR**



**BAB**

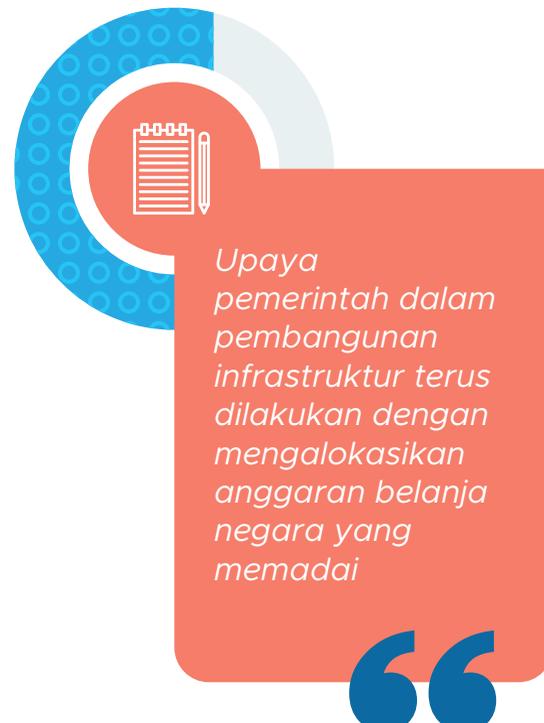
**02**

**APBN  
KEMENTERIAN  
PUPR**

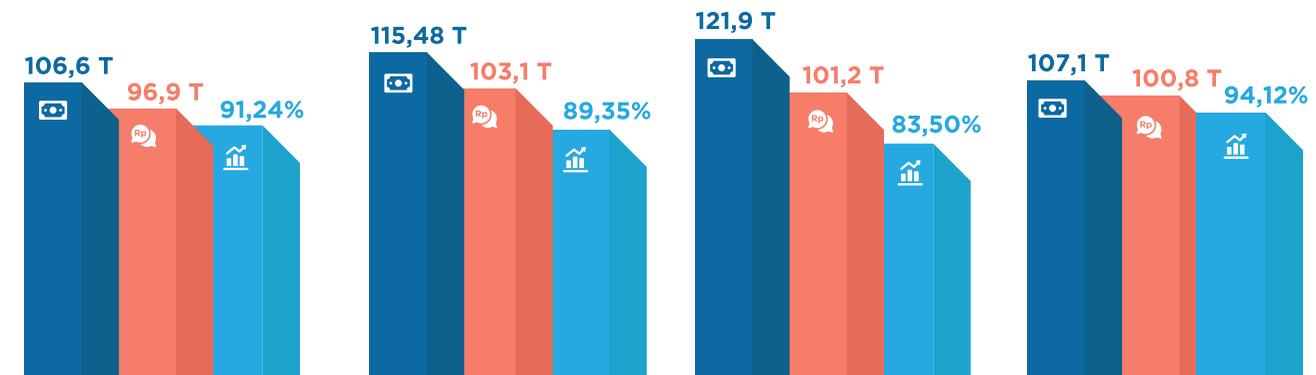
# 02

Pembangunan infrastruktur merupakan *backbone* bagi pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan infrastruktur yang handal tidak hanya menjadi roda penggerak sektor ekonomi, melainkan berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah, distribusi barang, dan lainnya. Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara yang memadai serta berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunan.

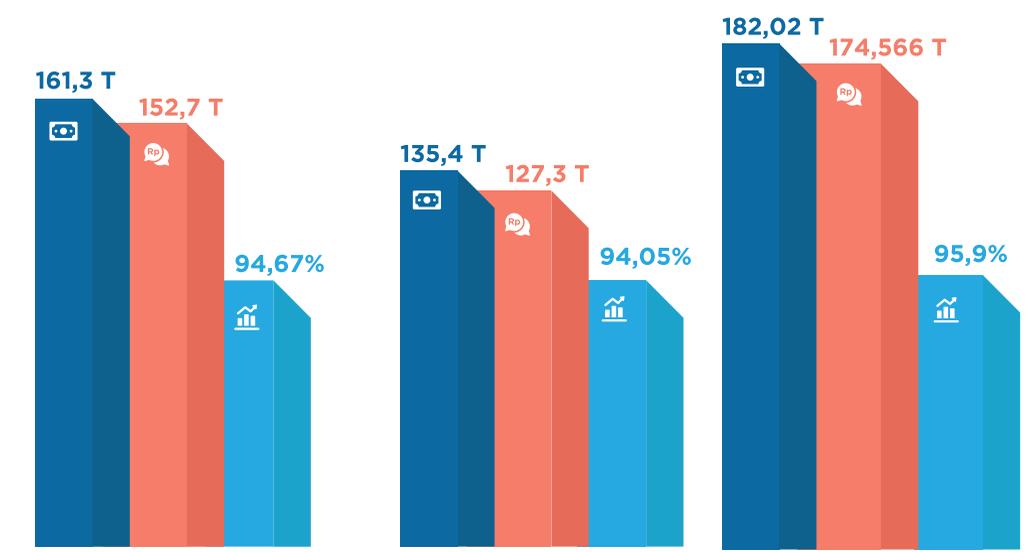
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian/lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2023 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp.182 Triliun. Anggaran ini pun mengalami tren kenaikan tiap tahunnya baik dari segi alokasi maupun realisasi sebagai bukti dari komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat tersedia.



*Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara yang memadai*



2017 2018 2019 2020



2021 2022 2023

Anggaran Realisasi % Realisasi



**APBN Kementerian PUPR**  
Sumber Data : Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2017-2023  
Status Data : 2024

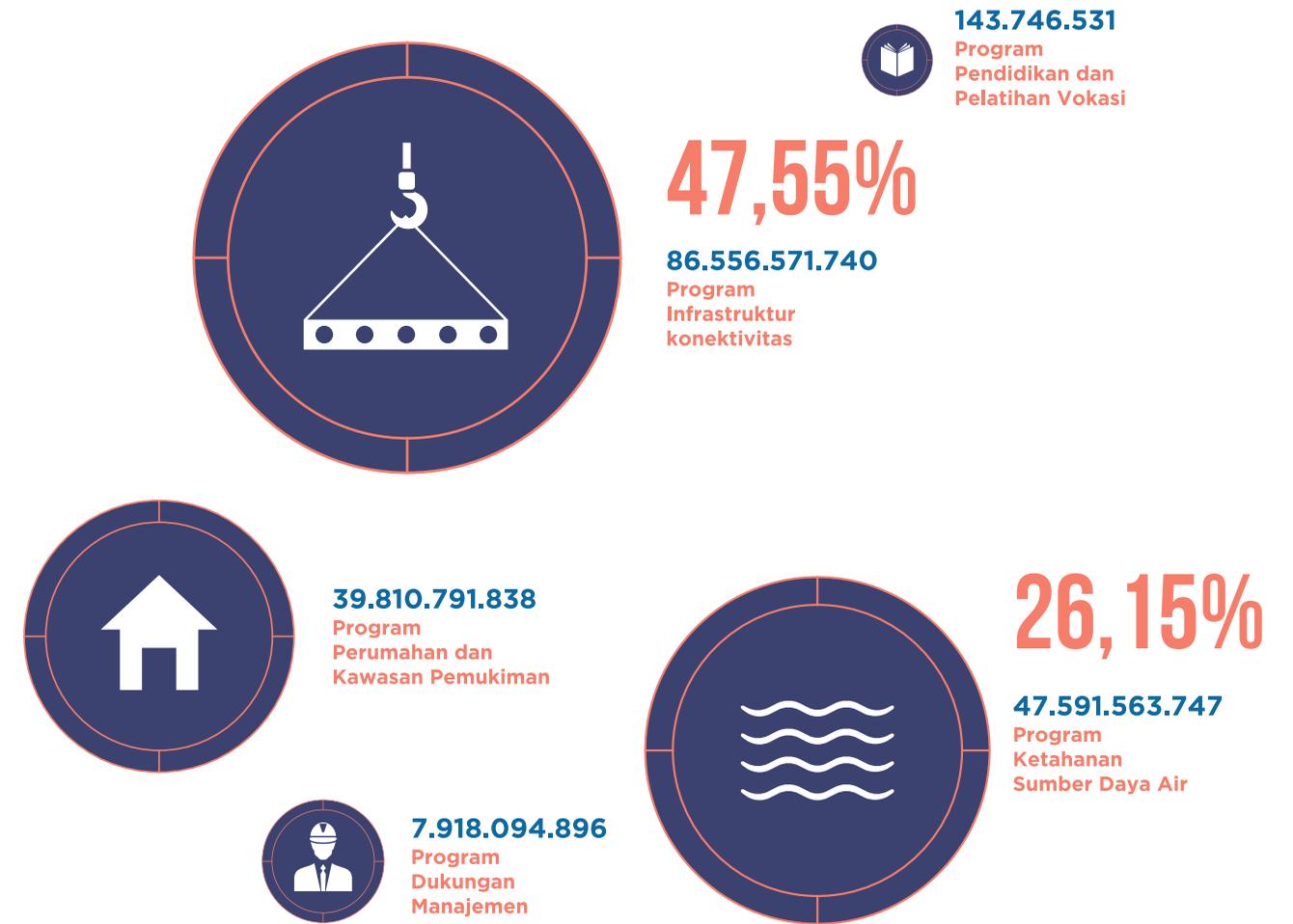
Berdasarkan jenis belanja, APBN dibagi menjadi tiga yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase terbesar pengalokasian APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah belanja modal yaitu sebesar 66% atau senilai Rp.120 triliun. Belanja barang memiliki persentase sebesar 32% atau senilai Rp.58 triliun, dan sebesar 2% dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp.2,7 triliun. Adapun detail data dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



**APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja (Ribu Rupiah)**  
 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023  
 Status Data : 2024

Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk 5 jenis program, antara lain pengelolaan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, pengembangan perumahan dan permukiman, dukungan manajemen, dan pendidikan-pelatihan vokasi. Anggaran terbesar dialokasikan untuk

program infrastruktur konektivitas yaitu senilai Rp.86,5 triliun atau sebesar 47,55% dari total anggaran dan tertinggi kedua dialokasikan untuk program ketahanan sumber daya air yaitu senilai Rp.47,5 triliun atau sebesar 26,15% sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



**APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Program (Ribu Rupiah)**  
 Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023  
 Status Data : 2024

Persentase terbesar pengalokasian APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah belanja modal yaitu sebesar 66% atau senilai Rp.120 triliun





Bendungan Lolak, Sulawesi Utara Sumber : <https://www.rii.co.id/hasional/473674/lima-bendungan-siap-diresmikan-awal-2024-ini-daftarnya>

**SUMBER**

**DAYA AIR**



**BAB**

**03**

# SUMBER DAYA AIR

# 03

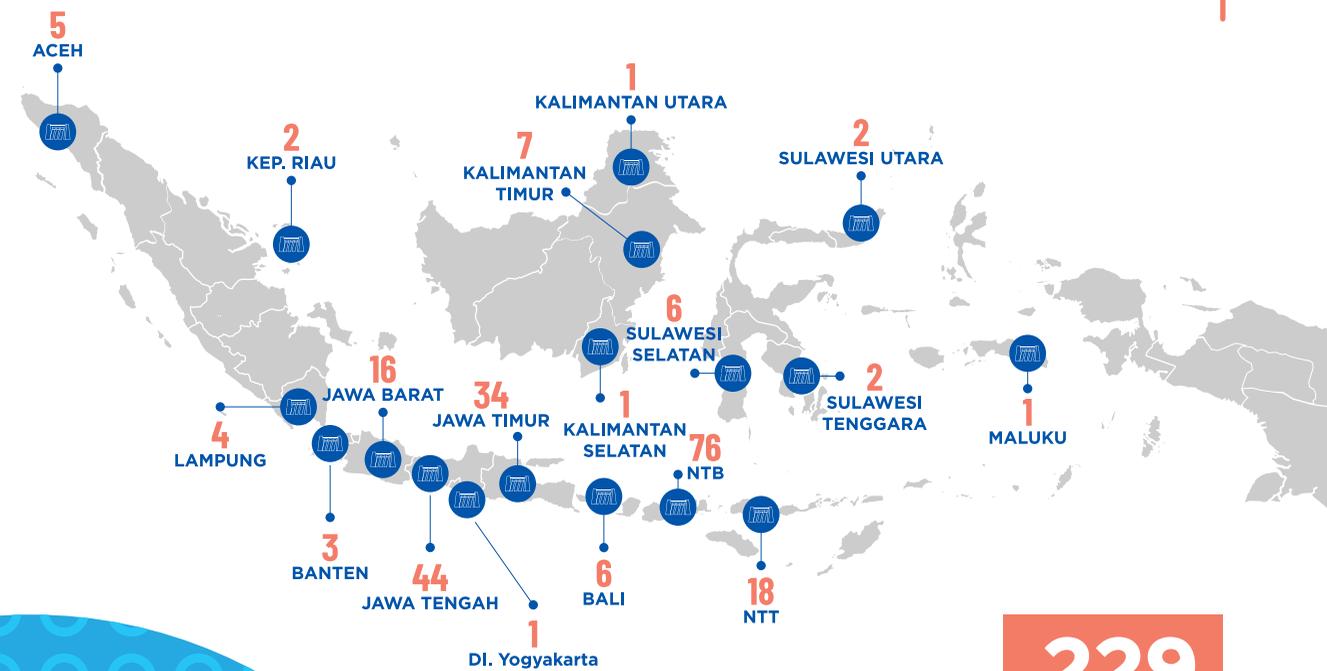
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, antara lain bendungan, embung, jaringan irigasi, prasarana pengendali banjir, lahar dan penganan pantai, serta sarana dan prasarana air tanah dan air baku. Bab ini memaparkan berbagai data dan perkembangan pembangunan infrastruktur bidang pengelolaan sumber daya air.

mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

## A. Bendungan Beroperasi

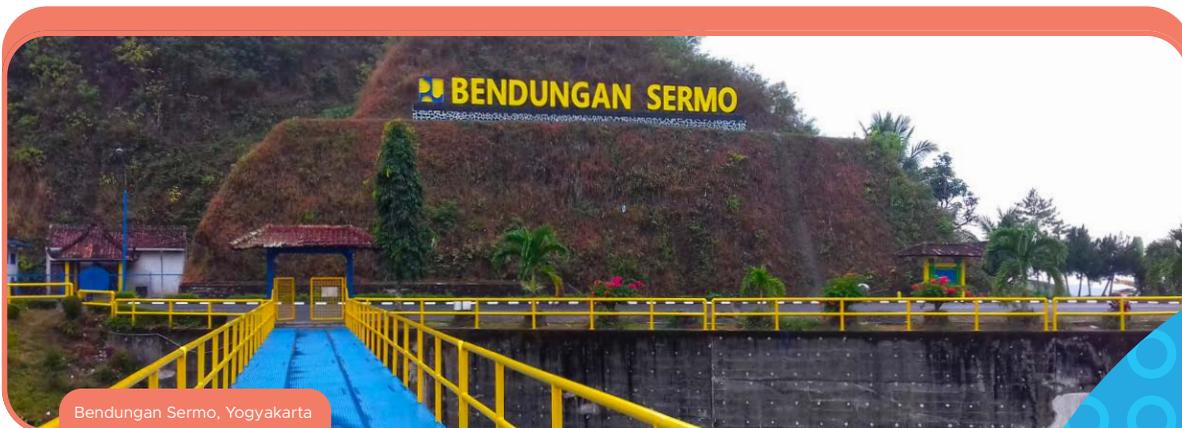
Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, dijelaskan bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur.

Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Tujuan pembangunan bendungan ada dua, yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Berikut ini adalah jumlah bendungan di setiap provinsi yang berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR.

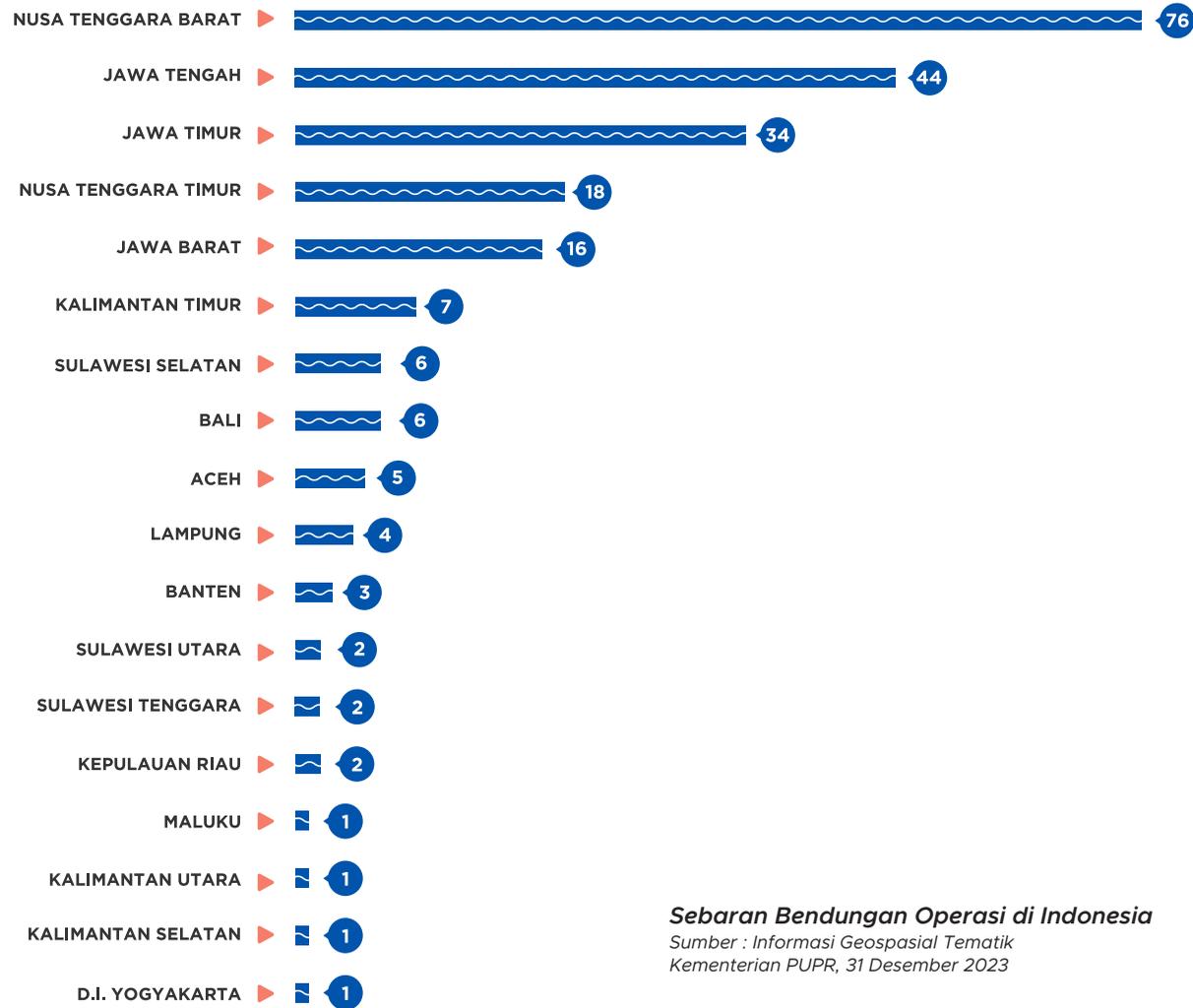


229

Bendungan Beroperasi



Bendungan Sermo, Yogyakarta



**Sebaran Bendungan Operasi di Indonesia**

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran bendungan beroperasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Desember 2023 terdapat 229 bendungan beroperasi yang tersebar di 18 provinsi dimana terbanyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 76 bendungan.

**B. Danau, Situ, Embung**

Danau merupakan tampungan air yang dikelilingi oleh daratan dan terbentuk akibat dari proses alami seperti aktivitas tektonik, vulkanik, dll. Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. Sementara embung merupakan waduk berukuran mikro yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering. Pembangunan embung dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjadi persediaan air saat kemarau.

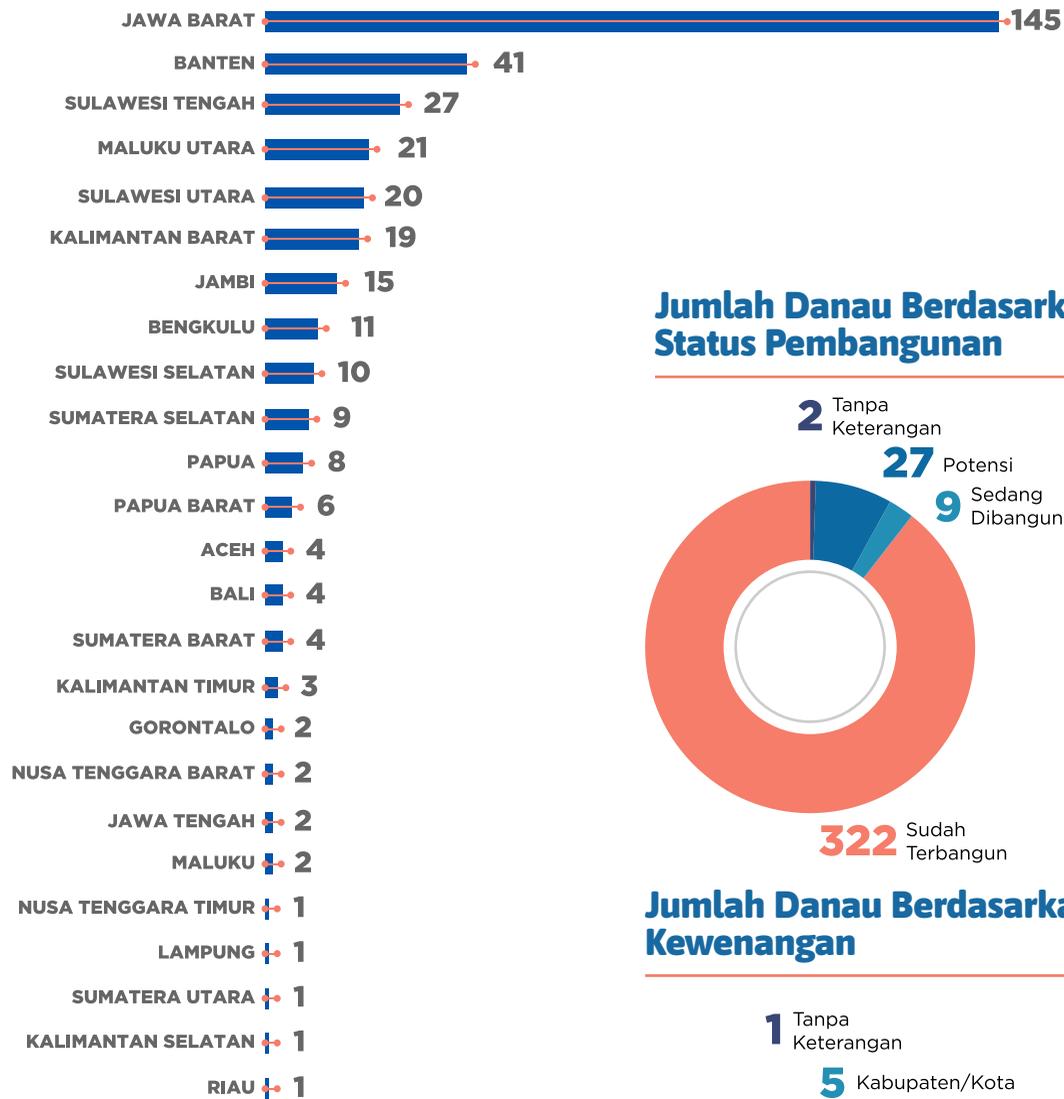
Selain infrastruktur bendungan, danau, situ dan embung menjadi aset infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan atau cadangan air bagi manusia. Beberapa danau di Indonesia mengalami kondisi kritis baik dari volume danau yang menyusut ataupun kualitas danau yang menurun. Terhadap danau-danau kritis tersebut, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi untuk mengembalikan fungsi tampungan air.

Berikut ini sebaran danau, situ dan embung di menurut provinsi yang tercatat di Kementerian PUPR.



Tujuan pembangunan bendungan ada dua, yaitu single purpose dam dan multi purpose dam





**Jumlah Danau Berdasarkan Provinsi**

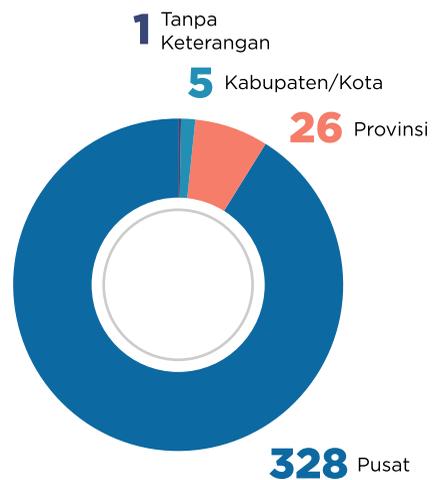
Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran jumlah danau di Indonesia. Pada tahun 2023, total infrastruktur danau secara keseluruhan ada 360 danau dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 145 danau. Berdasarkan total tersebut, terdapat 322 danau dengan status sudah terbangun, 9 danau sedang dibangun, dan 27 titik berpotensi menjadi danau. Berdasarkan kewenangannya, danau yang dikelola Kementerian PUPR sebanyak 328 danau.

**Jumlah Danau Berdasarkan Status Pembangunan**



**Jumlah Danau Berdasarkan Kewenangan**



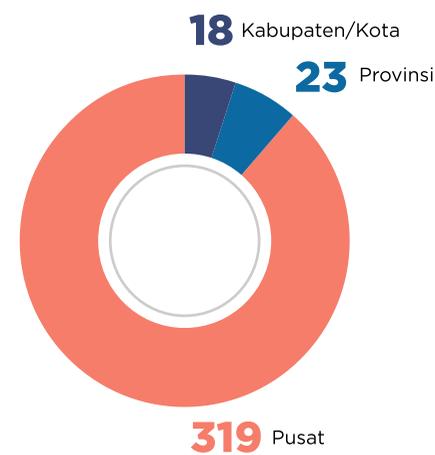
Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023



**Jumlah Situ Berdasarkan Provinsi**

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

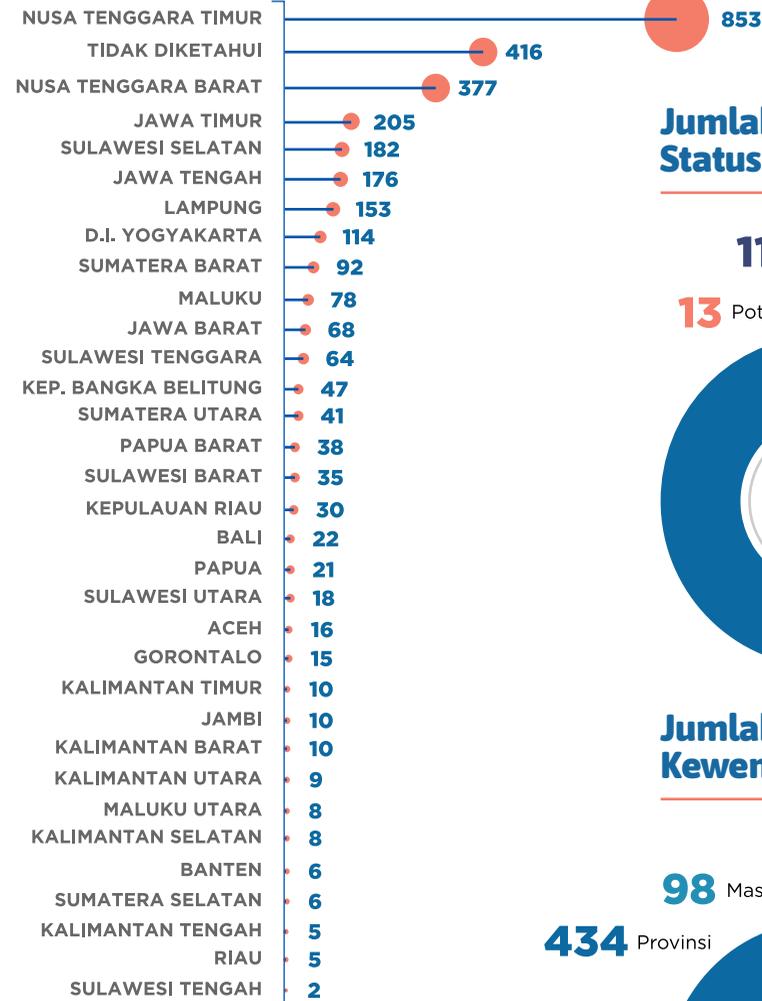
**Jumlah Situ Berdasarkan Kewenangan**



Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

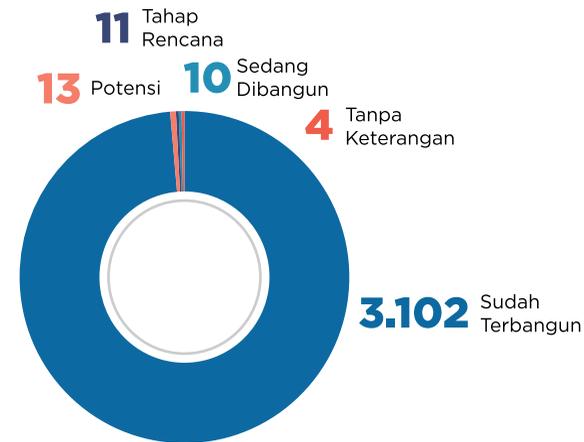
Diagram di atas merupakan sebaran jumlah situ di Indonesia. Sampai dengan Desember 2023, total infrastruktur situ secara keseluruhan adalah 360 situ dengan jumlah situ paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat yaitu 291 situ. Berdasarkan kewenangannya, situ yang dikelola oleh Kementerian PUPR sebanyak 319 situ.



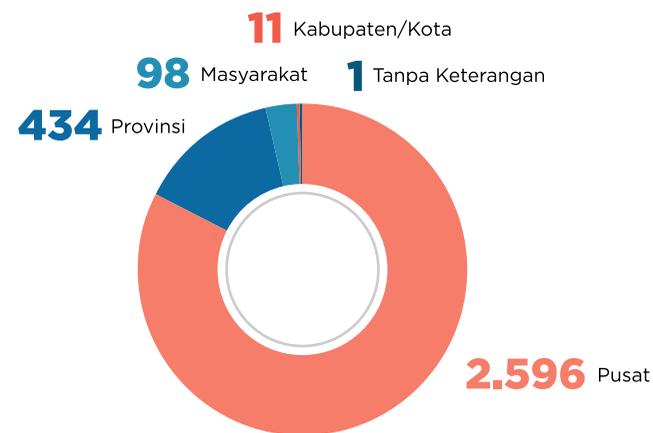


**Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi**  
 Sumber: Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

### Jumlah Embung Berdasarkan Status Pembangunan



### Jumlah Embung Berdasarkan Kewenangan



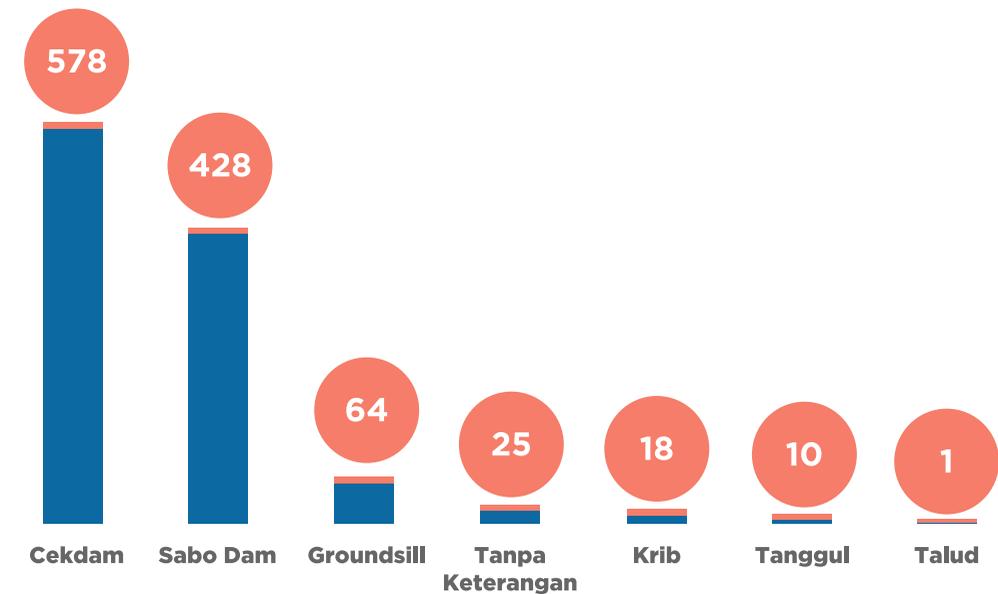
tersebut, terdapat 3.102 embung dengan status sudah terbangun, 11 embung dalam tahap rencana, 10 embung sedang dibangun, dan 13 titik berpotensi menjadi embung. Berdasarkan kewenangannya, embung yang dikelola oleh Kementerian PUPR sebanyak 2.596 embung.

Diagram di atas merupakan sebaran jumlah embung di Indonesia. Sampai dengan Desember 2023, total infrastruktur embung secara keseluruhan adalah 3.140 embung dengan jumlah embung paling banyak adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 853 embung. Berdasarkan total

## C. Pengendali Sedimen

Bangunan-bangunan pengendali sedimen berfungsi untuk mengendalikan sedimen dengan memperlambat gerakan dan secara berangsur-angsur mengurangi volume sedimen. Bangunan sedimen juga perlu dievaluasi untuk

mengetahui bangunan sedimen tersebut masih mampu atau tidak menampung sedimen karena seiring waktu dan perubahan tata guna lahan yang menyebabkan erosi volume sedimen cenderung meningkat. Bangunan pengendali sedimen yang telah dibangun Kementerian PUPR terdiri dari Cekdam, Groundsill, Krib, Sabo Dam, Talud, dan Tanggul.



**Jumlah Infrastruktur Pengendali Sedimen**

Sumber: Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas menunjukkan banyaknya infrastruktur pengendali sedimen di Indonesia. Bangunan pengendali sedimen terbanyak yaitu Cekdam sebanyak 578 unit dan Sabo Dam sebanyak 428 unit. Sementara itu, hanya 1 Talud yang telah dibangun.

Cekdam atau *check dam* merupakan bangunan yang dibuat melintang sungai yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran permukaan dan menangkap sedimen yang dibawa

aliran air sehingga kedalaman dan kemiringan sungai berkurang. Sementara itu, Sabo Dam berfungsi untuk mengendalikan dasar sungai bagian hilir agar tetap stabil meskipun ada suplai material atau sedimen yang terangkut oleh aliran air, dengan kata lain sabo dam akan mengarahkan laju aliran lahar dan mengendalikan seberapa banyak material yang diijinkan menuju ke hilir. Sabo dam banyak dibangun untuk mengurangi risiko banjir lahar gunung api.



Jembatan Pejalan Kaki Elo, Jawa Tengah



# BINA MARGA



BAB

# 04

**BINA MARGA**

# 04

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mendefinisikan Jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Adapun Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Undang-Undang Jalan mengatur perihal pembagian wewenang penyelenggaraan jalan, dimana Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam Pengembangan Sistem Jaringan jalan secara nasional, penyelenggaraan jalan secara umum dan Jalan Nasional. Adapun Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pada Jalan Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa yang berada diwilayahnya.

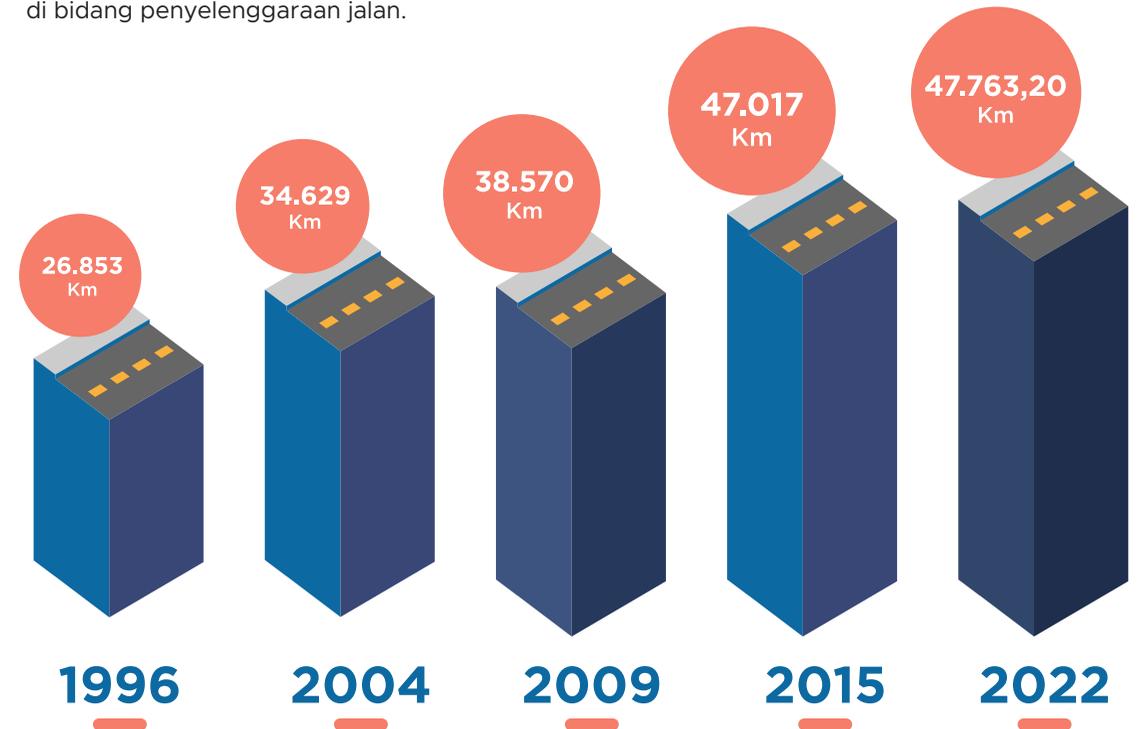


Jakasampurna - Marga Jaya

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa

## 1. Jalan Nasional

Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Kewenangan penyelenggaraan jalan nasional berada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.

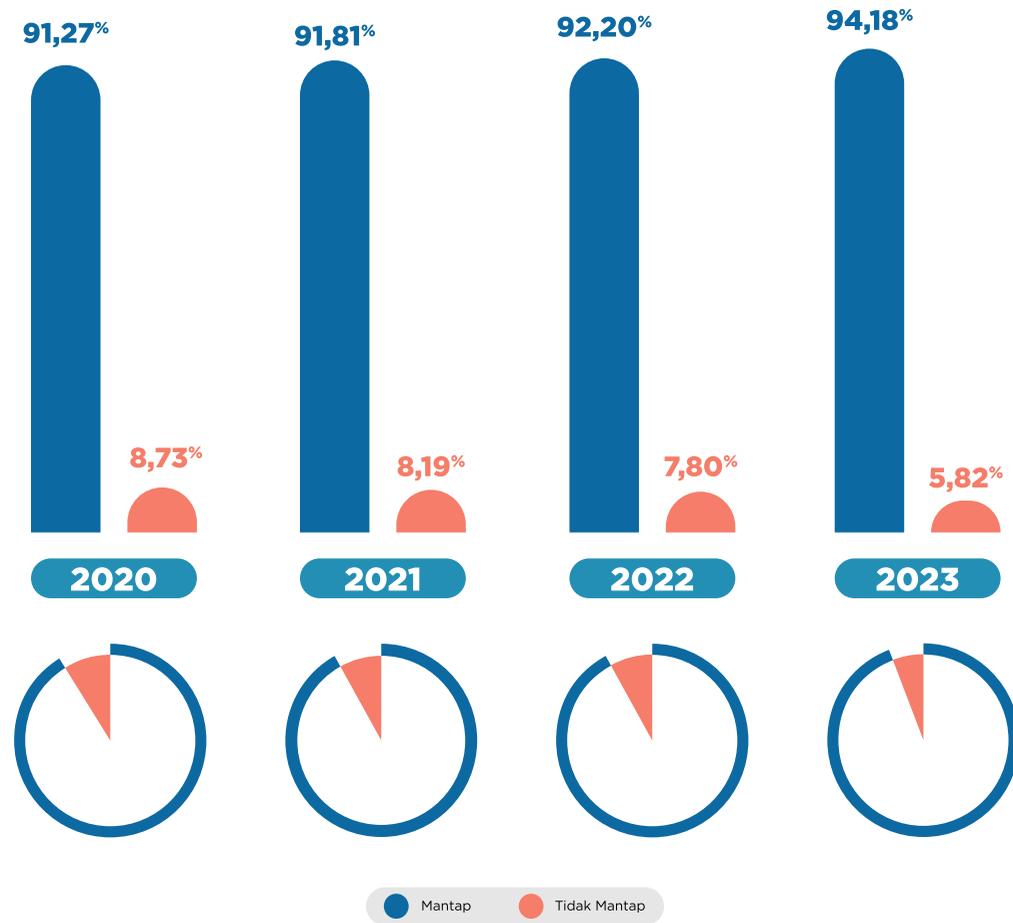


**Panjang Jalan Nasional**  
sumber : Kepmen PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (Jap) dan Jalan Kolektor Primer-1 (Jkp-1)

Panjang jalan nasional dari tahun 1996 hingga 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomo 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer, Panjang Jalan Nasional non tol seluruh Indonesia adalah 47.763,20 km

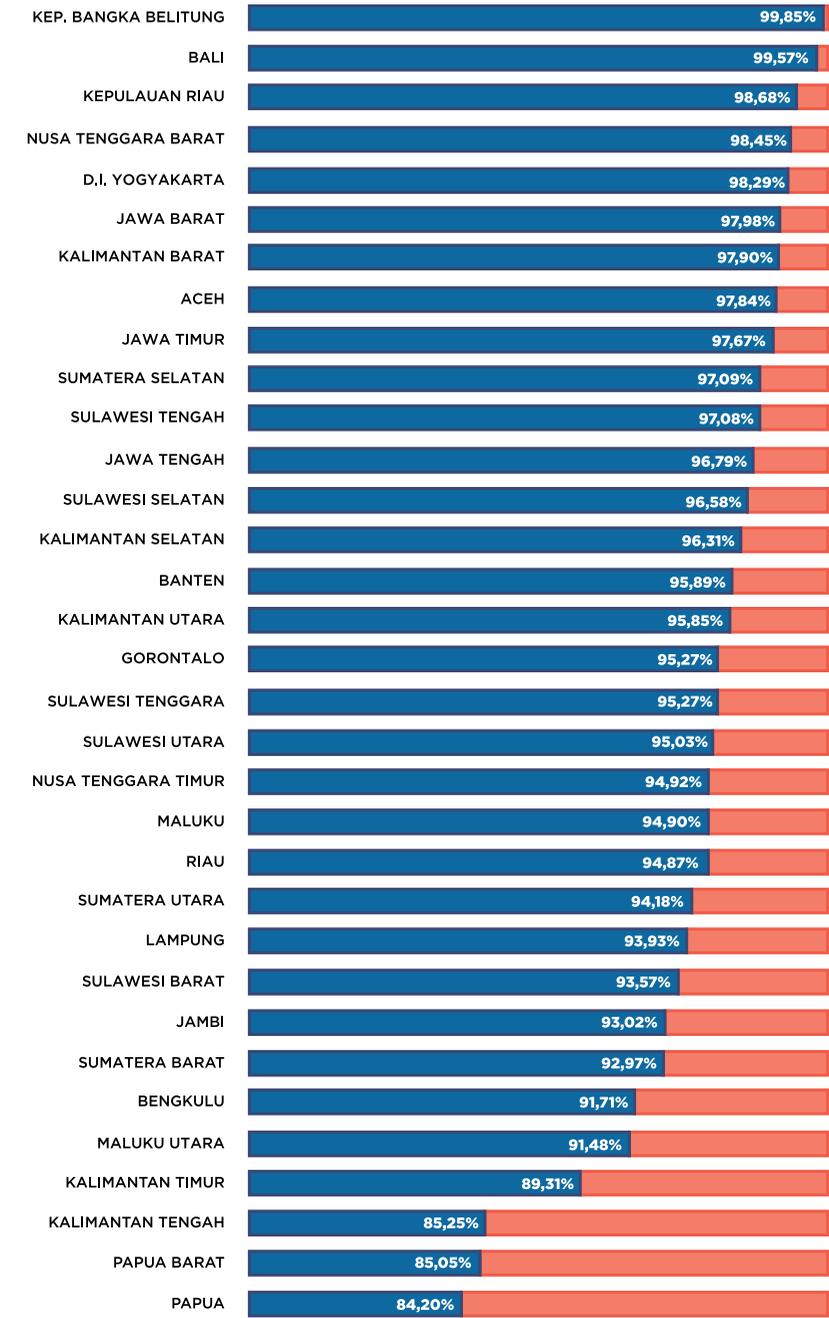
Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum di tahun 2023 dalam kondisi mantap dengan persentase 94,18 %. Kondisi ini mengalami kenaikan

dibanding tahun 2022 yang mencapai 92,20 %. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,85%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 77,56%.



**Tren Kemantapan Jalan Nasional**

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga  
Status : Februari 2024



Keterangan : Jalan Nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.



**Kemantapan Jalan Nasional 2023**

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga  
Status : Februari 2024

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, Pemerintah telah menetapkan beberapa target dalam penyelenggaraan jalan nasional. Penentuan target pembangunan diperlukan mengingat keberadaan infrastruktur jalan berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mempermudah akses distribusi barang dan jasa yang mana akan meningkatkan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, indikator jalan nasional tidak hanya dilihat dari segi kemantapan saja melainkan dari tingkat aksesibilitas, waktu tempuh, rating kondisi dan rating keselamatan jalan nasional.

Tingkat aksesibilitas jalan nasional di tahun 2023 mencapai 83,95% dengan waktu tempuh utamanya pada jalan lintas utama pulau mencapai 2,16 jam/100 km. Rating kondisi jalan nasional di tahun 2023 mencapai 2,57 Sementara itu pada indikator rating keselamatan jalan nasional di tahun 2023 mencapai 2,89.

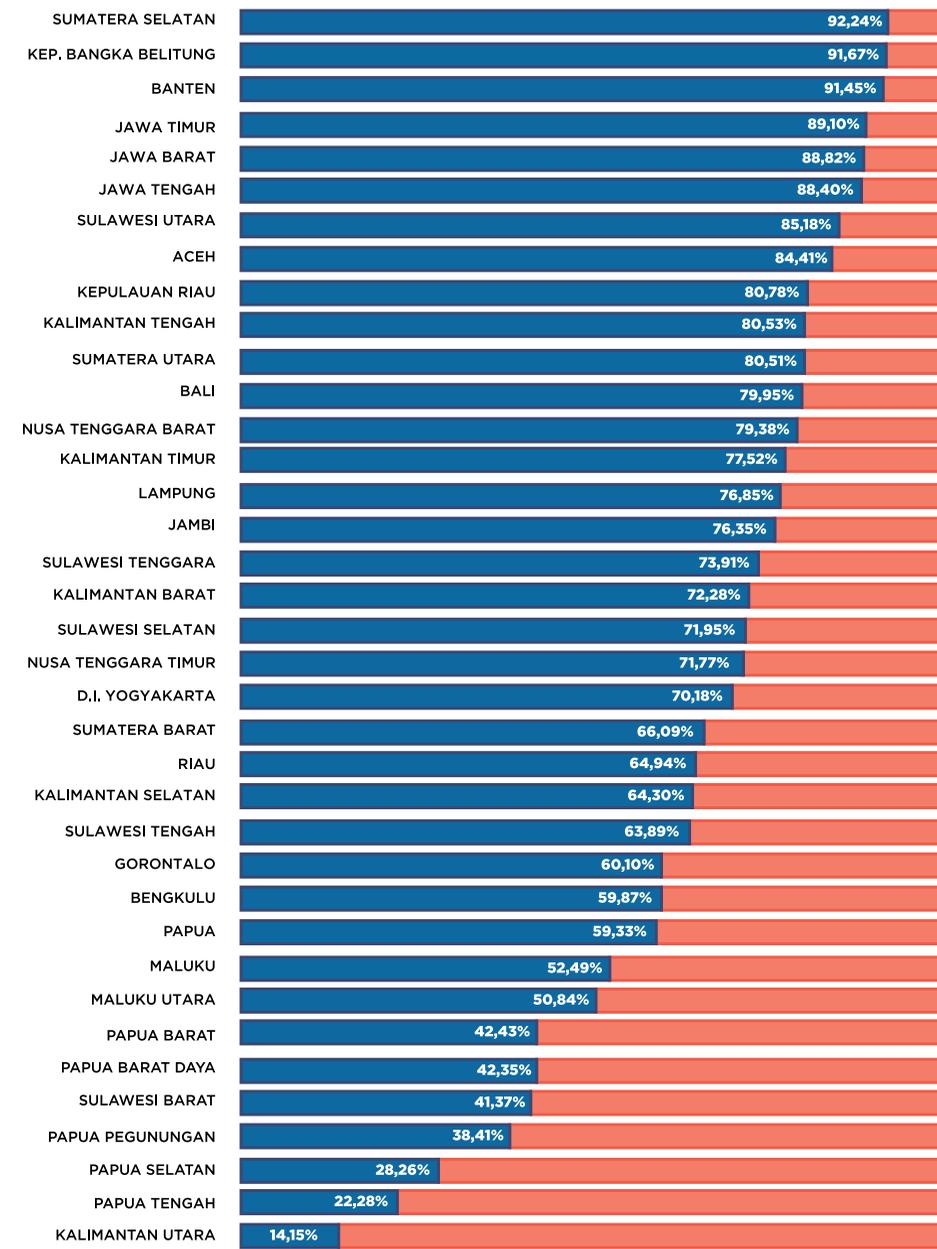
## 2. Jalan Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Adapun total panjang jalan daerah pada tahun 2023 mencapai 459.703,91 km yang terdiri atas 48.486,81 km jalan provinsi dan 411.217,1 km jalan kab/kota. Secara umum kondisi kemantapan jalan daerah di Indonesia dalam kondisi mantap mencapai 71,33% mantap untuk jalan provinsi dan 57,9% mantap jalan kabupaten/kota.

Pada Jalan Provinsi, Provinsi dengan kemantapan jalan tertinggi adalah Sumatera Selatan dengan persentase sebesar 92,24% atau sepanjang 1.396,17 km. Sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan provinsi terendah adalah Kalimantan Utara dengan persentase sebesar 14,15% atau sepanjang 120,53 km.

Pada Jalan Kabupaten/Kota, Provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/kota tertinggi adalah Jawa Barat dengan persentase sebesar 81,89% atau sepanjang 13.914,44 km. Sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/kota terendah adalah Papua Tengah dengan persentase sebesar 21,45% atau sepanjang 719,17 km.

*Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota*

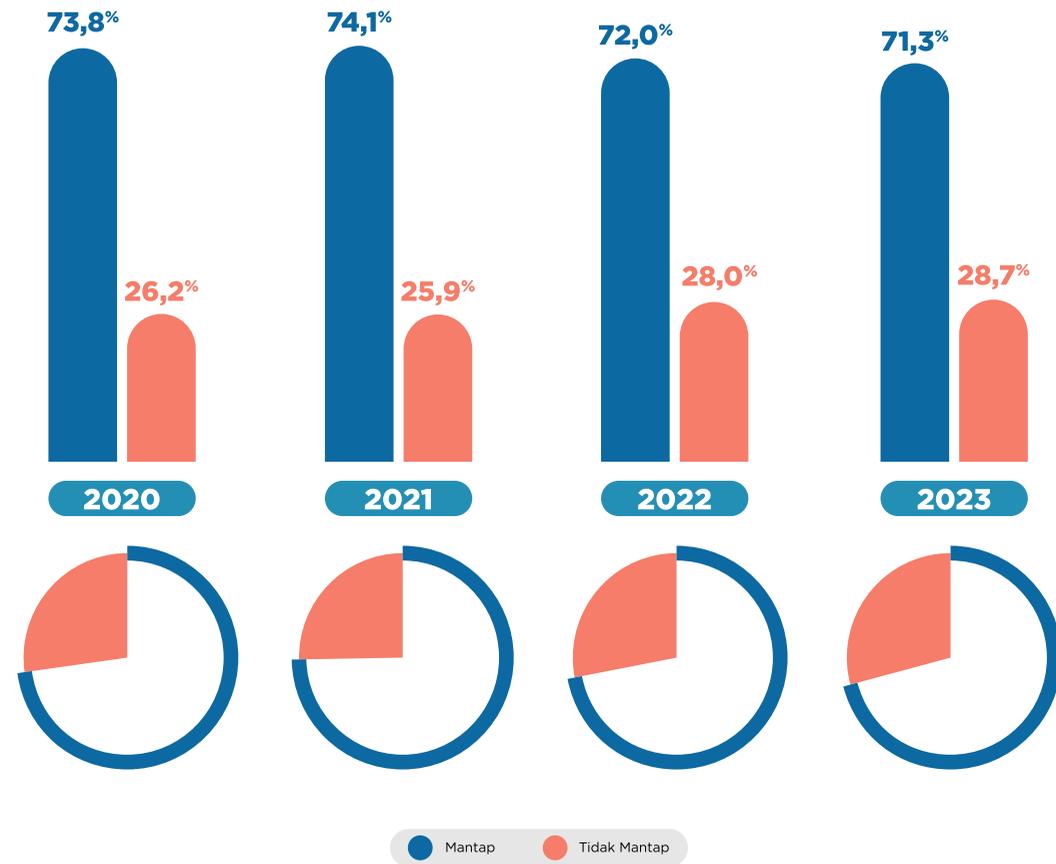


**Keterangan :** Jalan Nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.



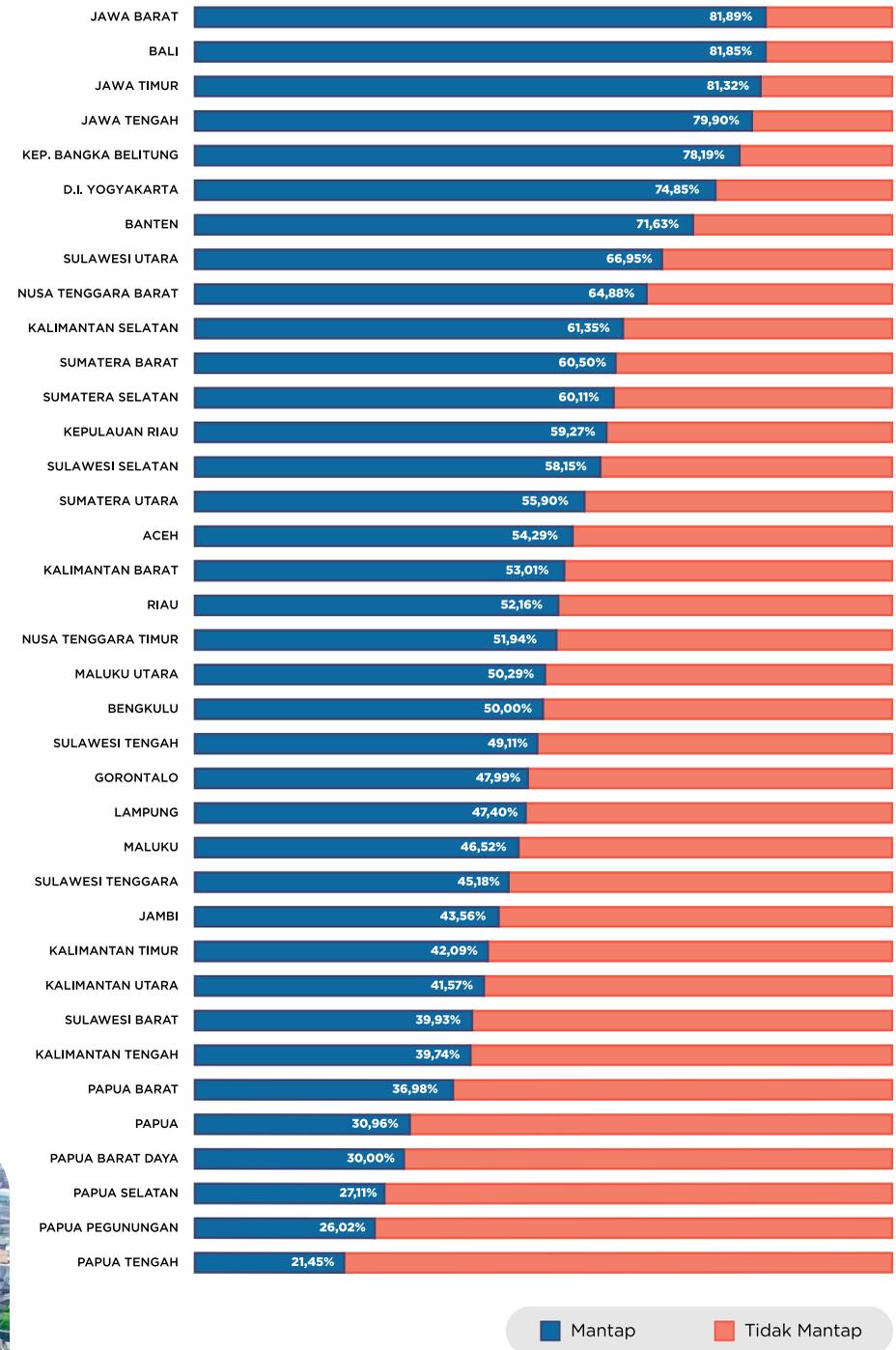
### Kemantapan Jalan Provinsi 2023

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga  
Status : Desember 2023



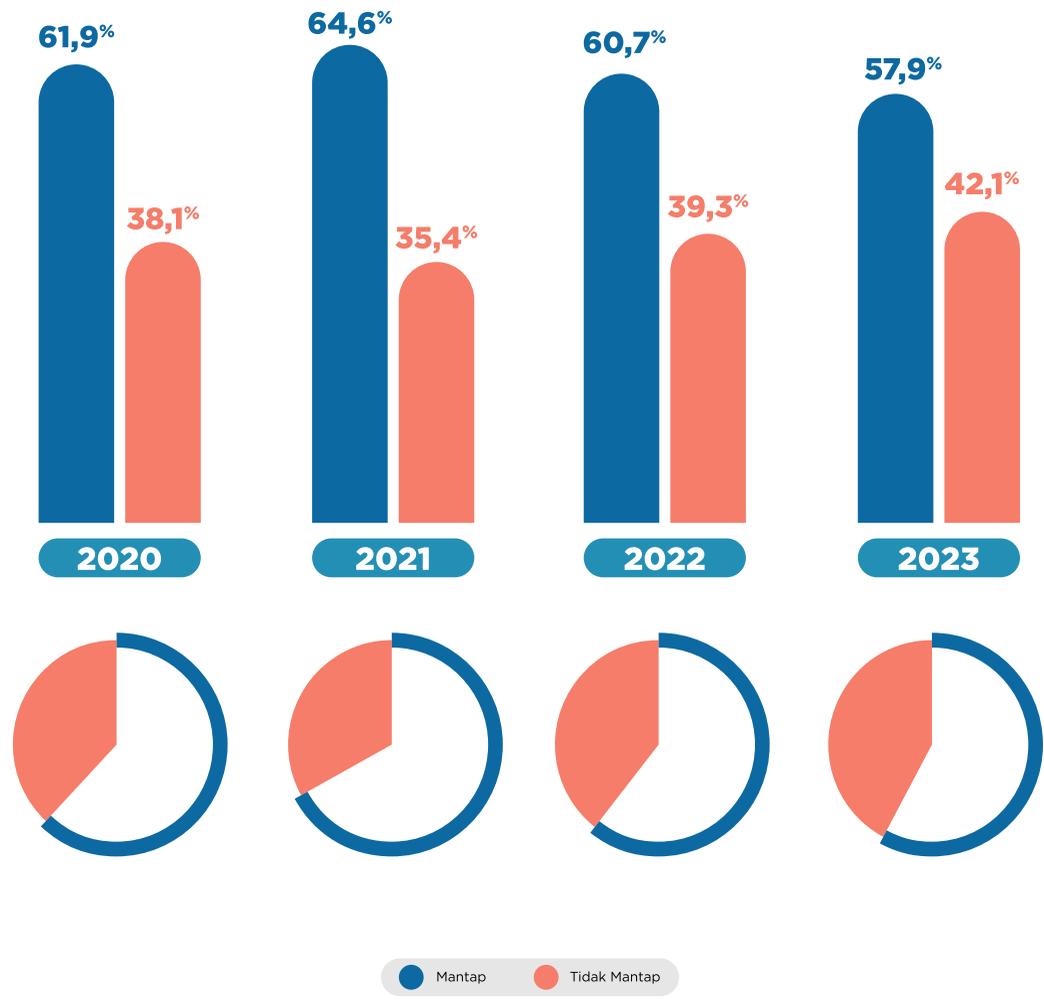
**Tren Kemantapan Jalan Provinsi**

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga  
 Status : Desember 2023



**Kemantapan Jalan Kab/Kota 2023**

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga  
 Status : Desember 2023



**Tren Kemantapan Jalan Kab/Kota**

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga  
 Status : Desember 2023



**3. Jalan Tol Beroperasi**

Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Jalan tol juga berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga arus barang & jasa antar wilayah dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah tersebut, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jalan tol yang hingga saat ini terdapat 73 ruas jalan tol dengan panjang 2.816,7 km (tanpa suramadu) yang telah beroperasi serta 27 ruas (1.742,25 km) yang masih dalam proses pembangunan. Berikut adalah sebaran jalan tol baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan.



*Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah*

# 73 Ruas Jalan Tol Operasi dengan panjang 2.816,73 Km

## Trans Sumatera 707,58 km



## Kalimantan 97,27 km

Balikpapan - Samarinda 97,27 km

## Sulawesi 61,46 km



## Non Trans 376,2 km



## Jabodetabek 425,4 km



## Trans Jawa 980,89 km



## Bali

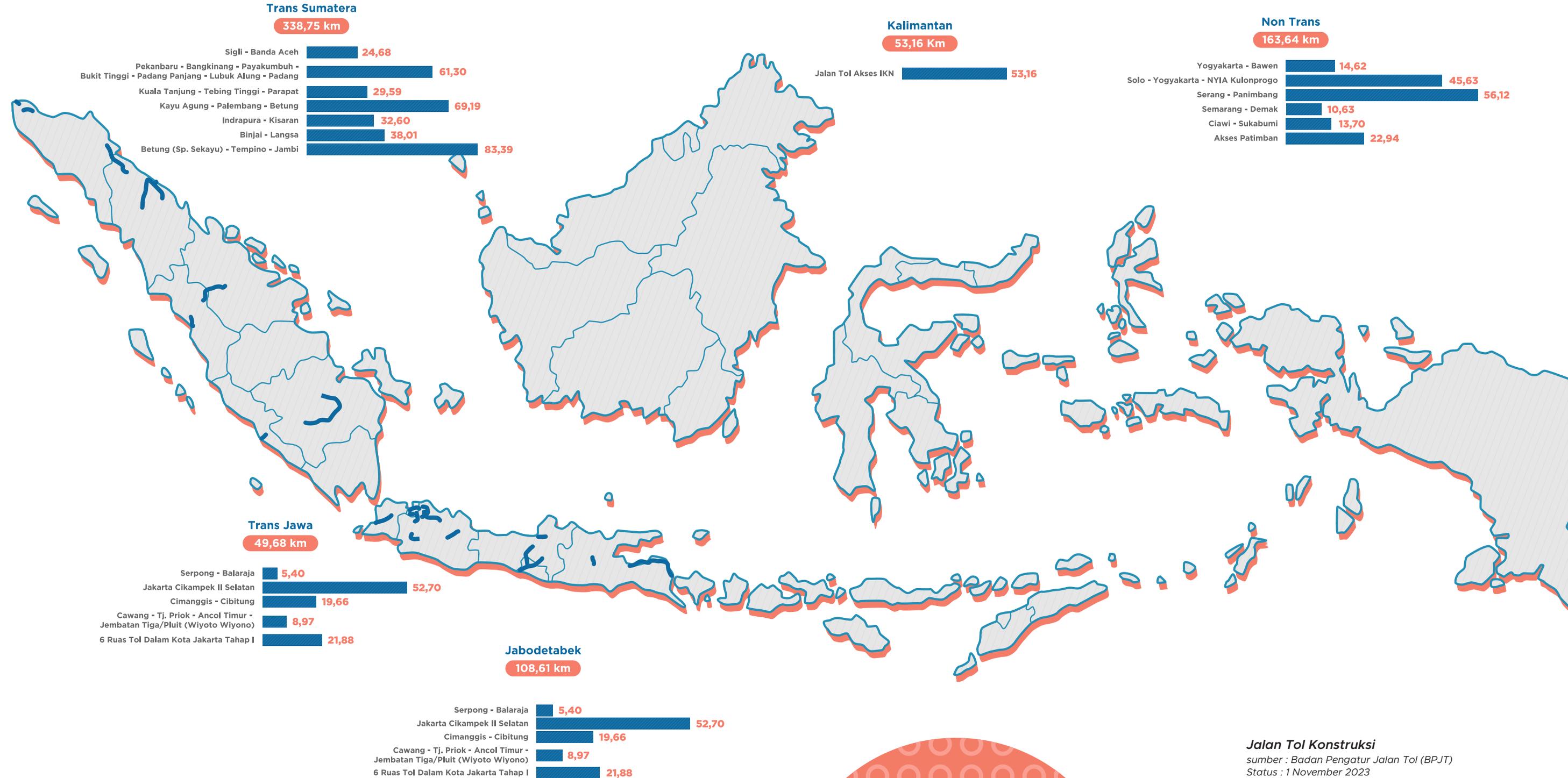
10,07 km  
Bali - Mandara 10,07 km

### Jalan Tol Operasi

sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  
Status : 1 November 2023

## 4. Jalan tol Konstruksi

### 20 Ruas Jalan Tol Konstruksi dengan panjang 713,83 km

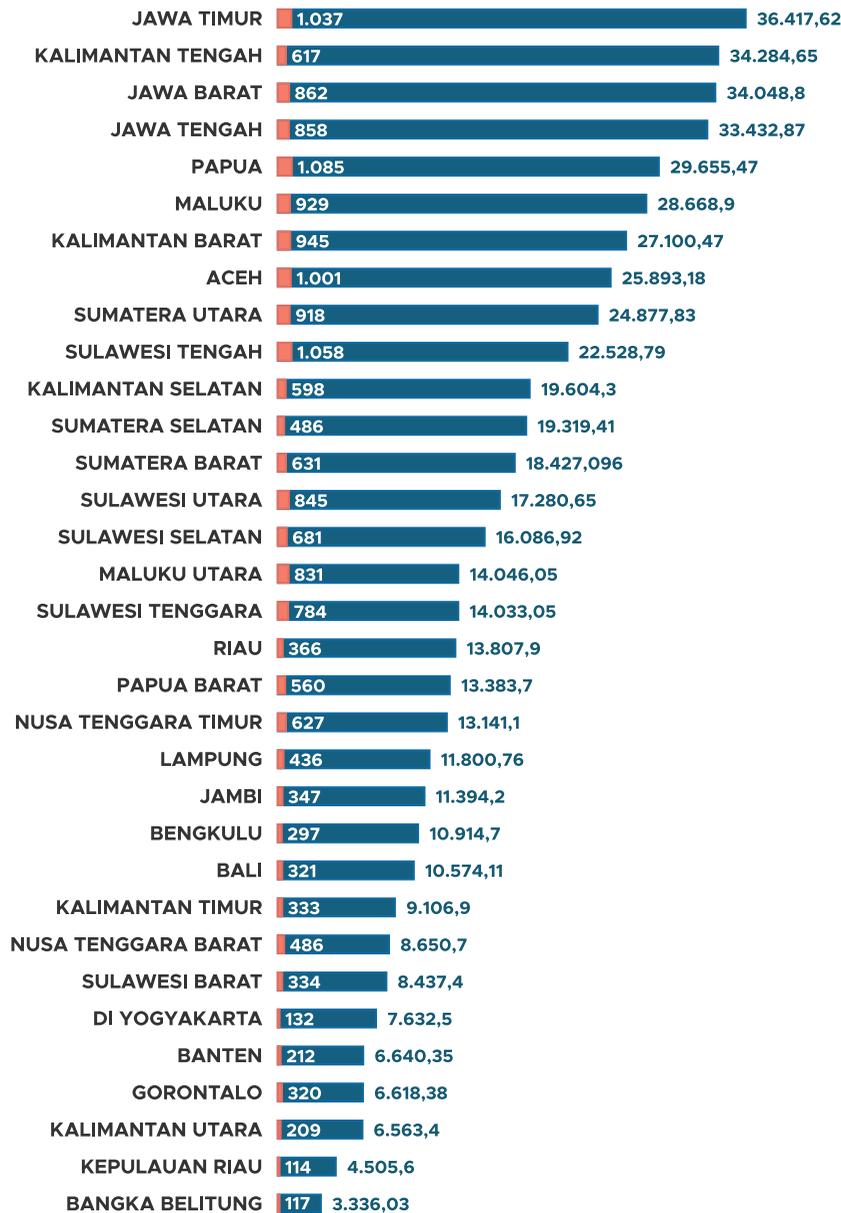


**Jalan Tol Konstruksi**  
sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  
Status : 1 November 2023

## 5. Jembatan

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi baik dari segi waktu yang ditempuh maupun kemudahan akses yang mana turut berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan. Hingga tahun 2023 terdapat 19.377 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 562.213,79 m. Provinsi yang memiliki jumlah jembatan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan 1.037 unit dan total panjang jembatan 36.417,62 m.



■ Jumlah ■ Panjang (meter)

### Jumlah Jembatan

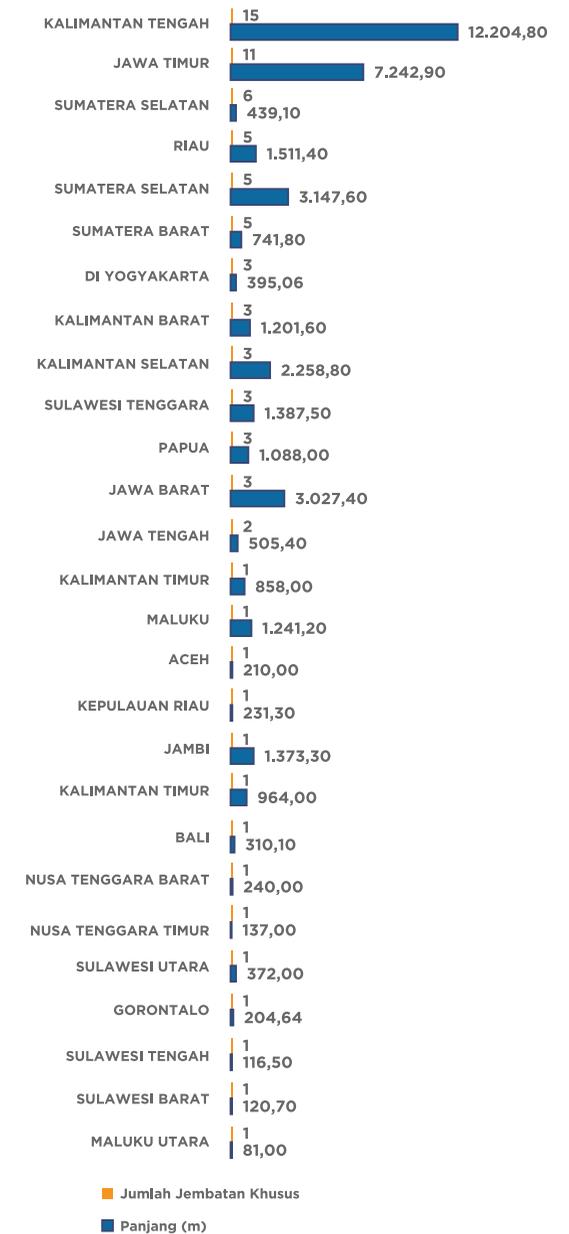
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga  
Status : 31 Desember 2023

## 6. Jembatan

### Khusus

Jembatan Khusus merupakan jembatan yang memiliki Spesifikasi teknis dan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan spesifikasi peralatan utama yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi dengan keadaan yang khusus pula. Jembatan yang memiliki tinggi pilar diatas 40m dapat dikategorikan sebagai jembatan khusus.

Tercatat hingga Tahun 2023 terdapat sebanyak 80 unit jembatan khusus di Indonesia dengan total panjang 41.610,3 m. Provinsi dengan jumlah jembatan khusus terbanyak adalah provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah jembatan khusus sebanyak 15 unit dan total panjang jembatan 12.204 m.



■ Jumlah Jembatan Khusus ■ Panjang (m)

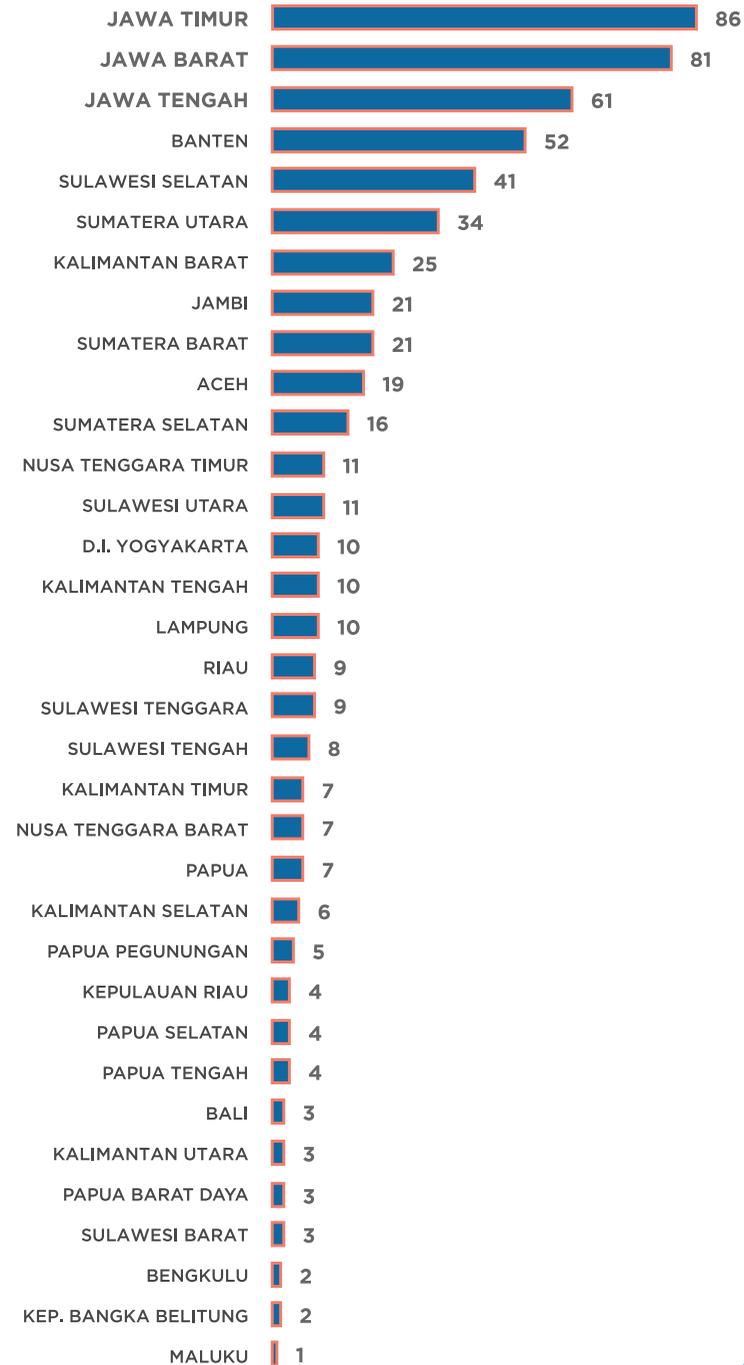
### Jumlah Jembatan Khusus (Unit)

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga  
Status Data : 31 Desember 2023

## 7. Jembatan Gantung

Jembatan gantung adalah jembatan dengan sistem struktur jembatan yang menggunakan *wire rope* (kabel) sebagai pemikul utama beban lalu lintas dan berat sendiri. Pada sistem ini *wire rope* utama memikul beberapa hanger (penggantung) yang menghubungkan antara *wire rope* utama dengan gelagar/struktur jembatan.

Hingga tahun 2023 tercatat ada sebanyak 596 jembatan gantung di Indonesia dengan total panjang 44.615,6 m. Provinsi yang memiliki jembatan gantung terbanyak adalah Jawa Timur dengan mencapai 86 unit dan total panjang 5.737,9 m.



### Jumlah Jembatan Gantung (Unit)

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga  
 Status Data : 31 Desember 2023



Hingga tahun 2023 terdapat 19.377 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 562.213,79 meter



Jembatan Kretek, D.I. Yogyakarta



**CIPTA  
KARYA**



**BAB**

**05**

# 05



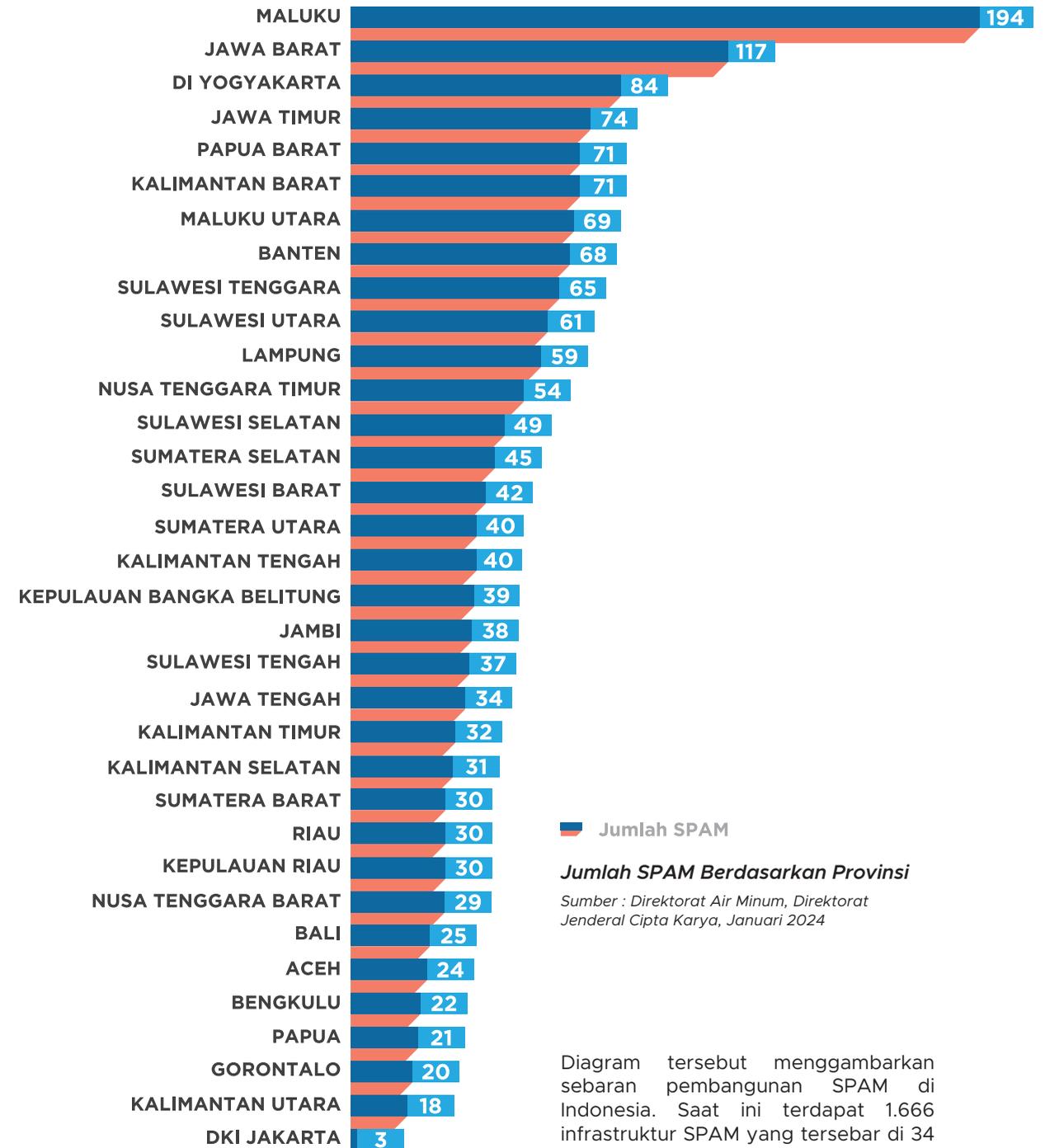
Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pos lintas batas negara, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga tahun 2023, infrastruktur permukiman tersebut terus bertambah baik dari segi ketersediaan (kuantitas) maupun kualitasnya. Bab ini memaparkan berbagai data dan perkembangan pembangunan infrastruktur permukiman yang berada dalam ranah tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya.

## A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penyediaan air minum yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.



Jumlah SPAM

Jumlah SPAM Berdasarkan Provinsi

Sumber : Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Diagram tersebut menggambarkan sebaran pembangunan SPAM di Indonesia. Saat ini terdapat 1.666 infrastruktur SPAM yang tersebar di 34 provinsi dimana terbanyak berada di Provinsi Maluku dengan 194 SPAM.

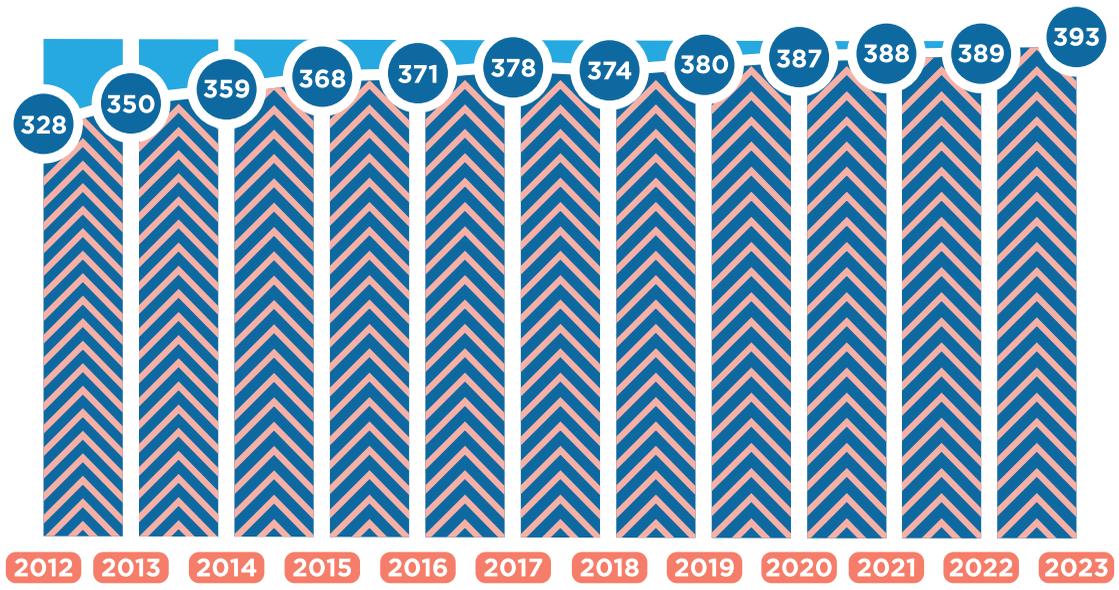




**B. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum**

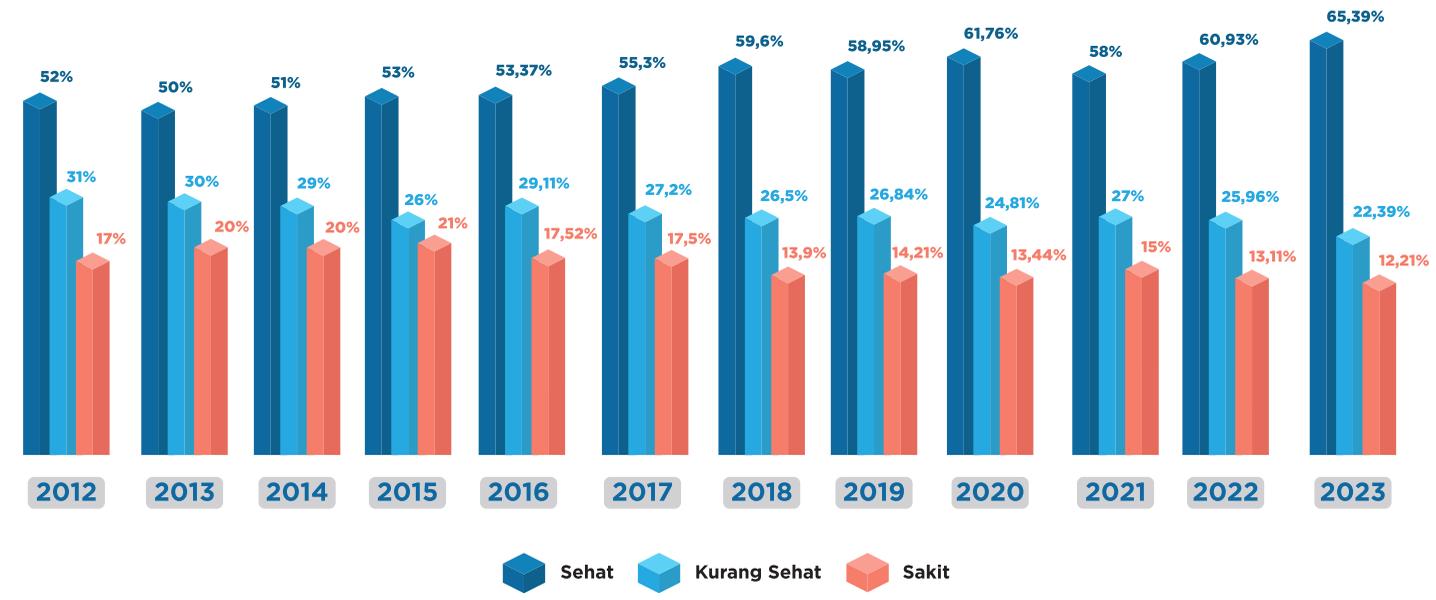
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kelompok masyarakat, dan badan usaha. Khusus penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMD Air Minum, Direktorat Air Minum

Ditjen Cipta Karya melakukan penilaian kinerja secara berkala setiap tahunnya untuk memastikan kualitasnya semakin meningkat. Penilaian tersebut dilakukan pada 4 aspek kinerja, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.



**Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai Kinerjanya Tahun 2012-2023**  
 Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai kinerjanya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 393 BUMD Air Minum. Jumlah ini meningkat sebanyak 4 BUMD Air Minum dibandingkan dengan tahun 2022.



**Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2012-2023**  
 Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

BUMD Air Minum di Indonesia dengan kinerja Sehat mengalami kenaikan berturut-turut dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, BUMD Air Minum berkinerja Sehat sebanyak 257 (65,39%), berkinerja Kurang Sehat sebanyak 88 (22,39%), dan berkinerja Sakit sebanyak 48 (12,21%).

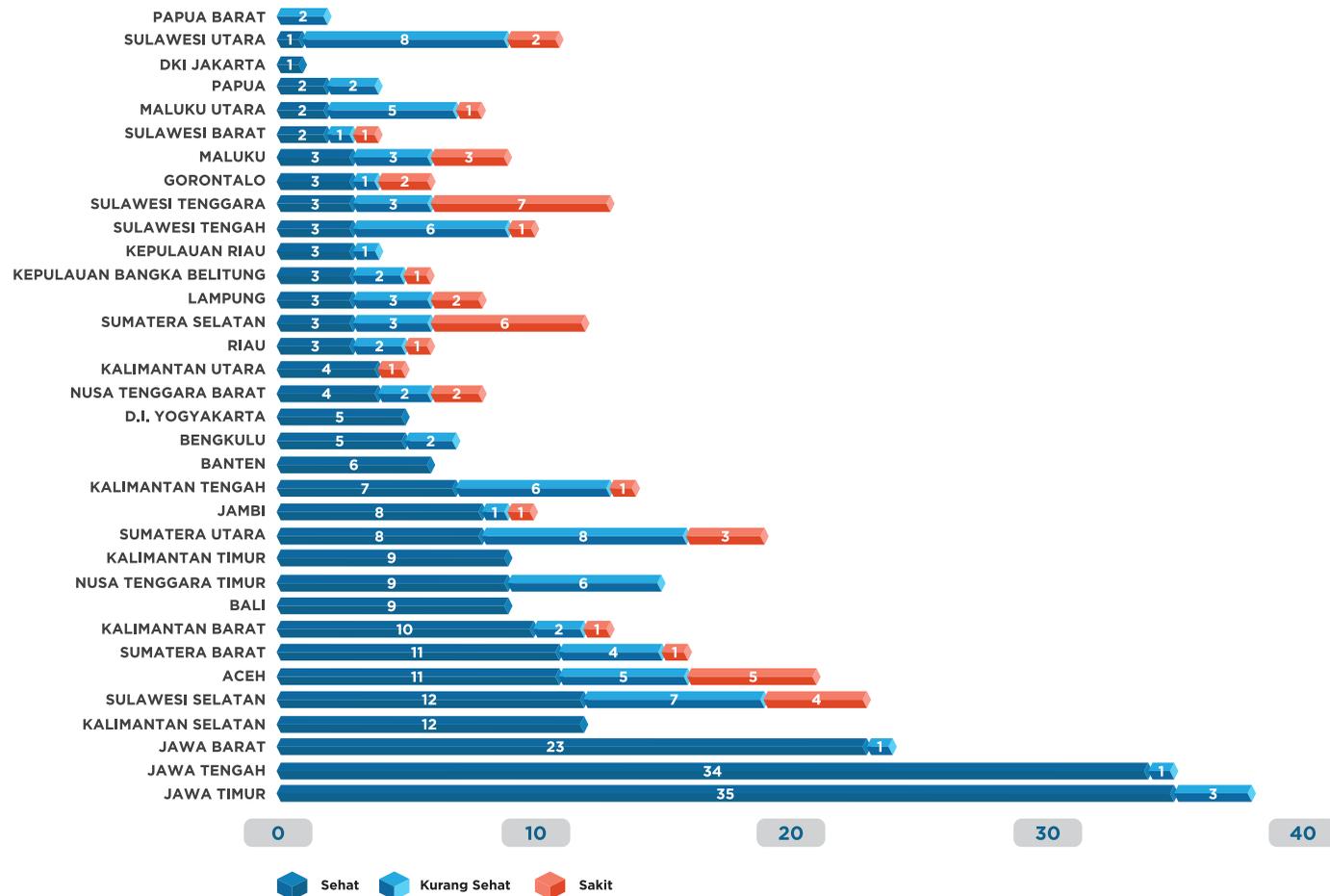




Capaian BUMD Air Minum berkinerja Sehat tersebut mengalami kenaikan 4,46% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 60,93%. Adapun persentase BUMD Air Minum dengan kategori Kurang Sehat mengalami penurunan 3,57% di tahun 2023 menjadi 22,39%. Selain itu, BUMD Air Minum dengan kategori Sakit mengalami penurunan sebanyak 0,9% di tahun 2023 dari sebelumnya sebanyak 13,11% di tahun 2022 menjadi 12,21% di tahun 2023. Hal ini menandakan mulai pulihnya kinerja BUMD Air Minum pasca diterpa pandemi Covid-19.



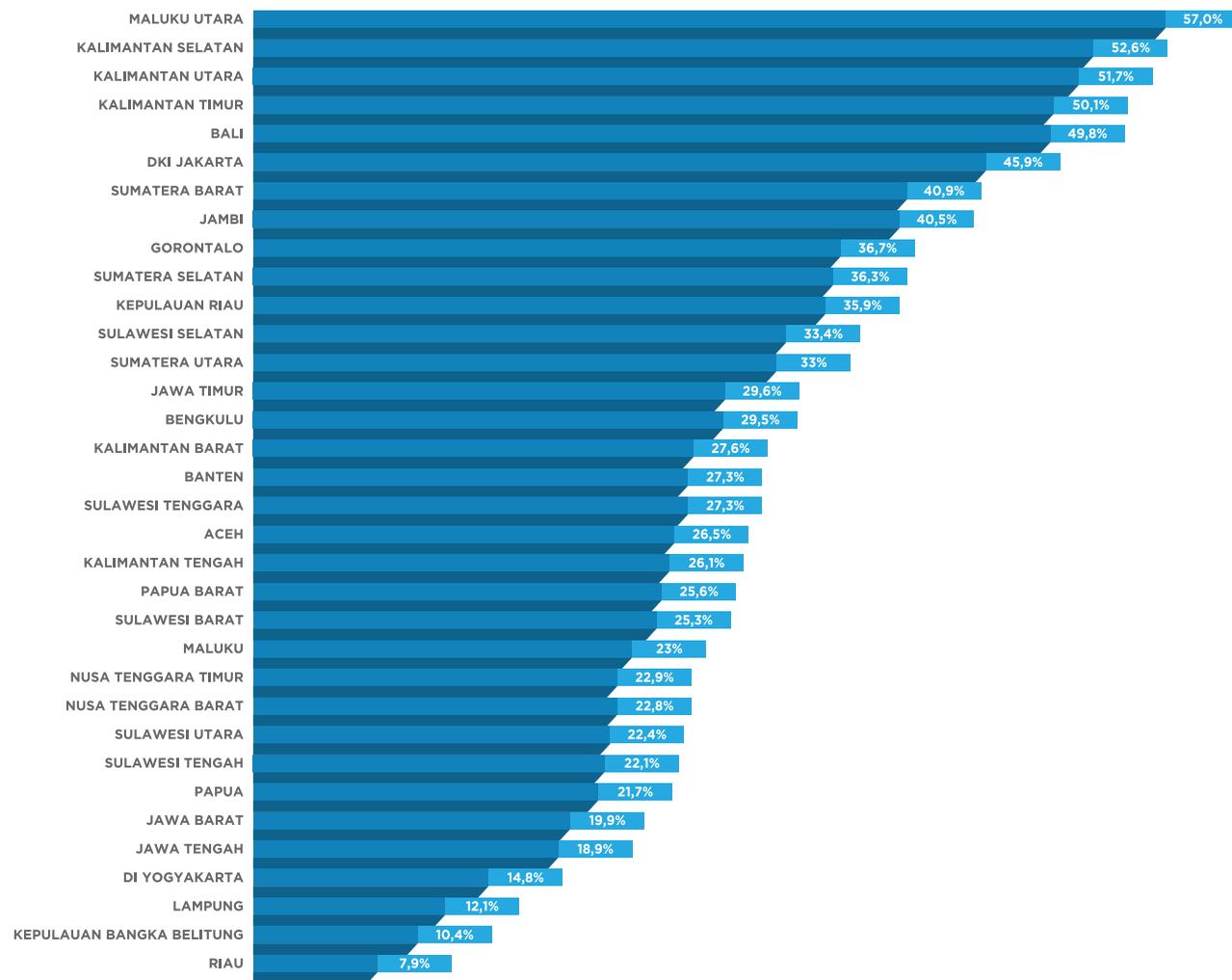
*Pada tahun 2023, BUMD Air Minum berkinerja Sehat sebanyak 257 (65,39%), berkinerja Kurang Sehat sebanyak 88 (22,39%), dan berkinerja Sakit sebanyak 48 (12,21%).*

**Kinerja BUMD Air Minum Berdasarkan Provinsi**  
Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023



Berdasarkan provinsinya, hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023 menunjukkan provinsi yang memiliki BUMD Air Minum dengan kinerja Sehat 100% antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Banten, D.I. Yogyakarta, dan DKI Jakarta.



**Persentase Penduduk Terlayani**

Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023

Persentase penduduk terlayani tertinggi di Maluku Utara sebesar 57% atau sebanyak 434.354 jiwa dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya sebanyak 761.364 jiwa. Sedangkan penduduk terlayani terbanyak adalah

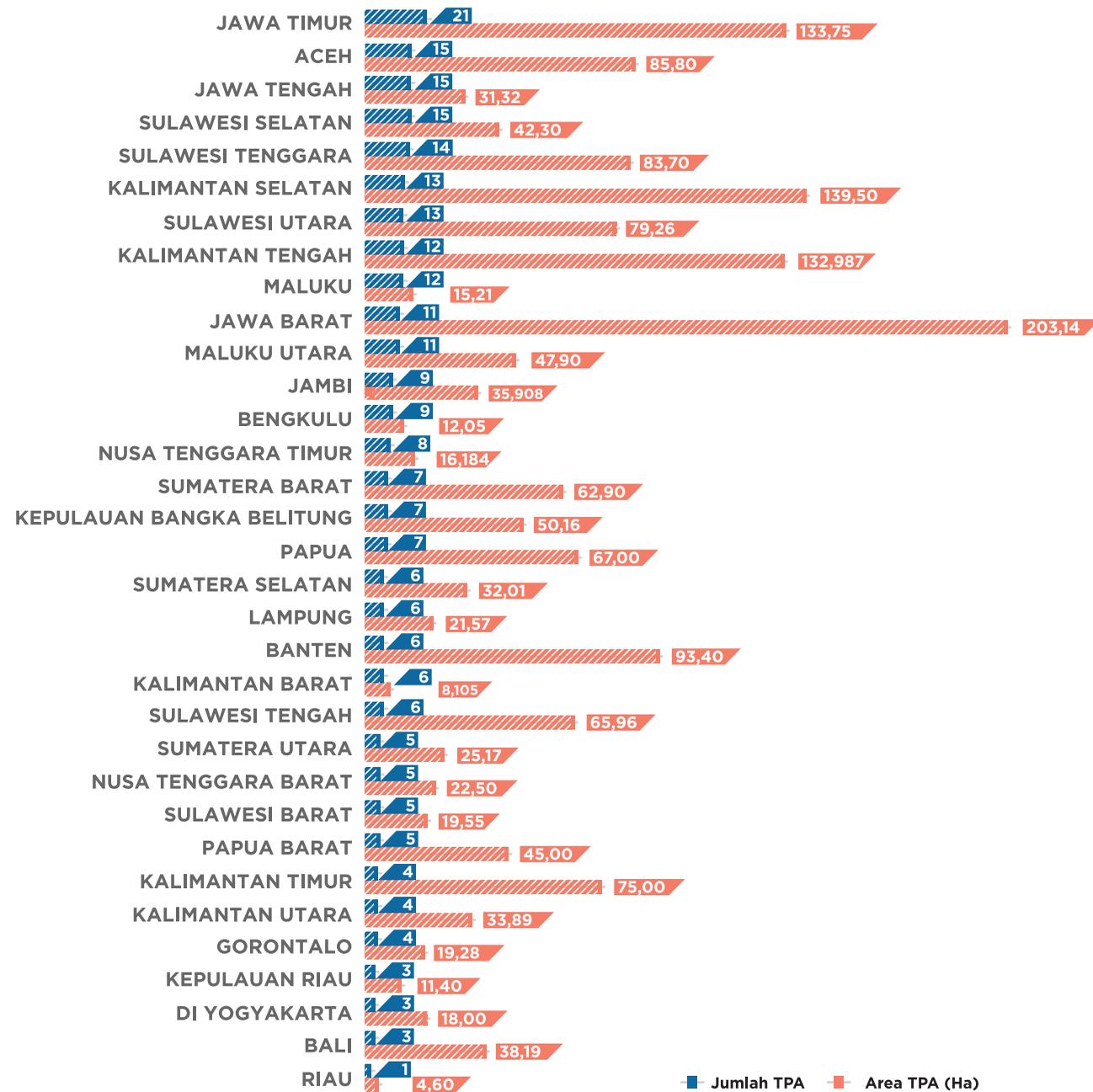
terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 8.782.709 jiwa atau sebesar 29,6% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Adapun persentase terendah berada di Provinsi Riau yang hanya mencapai 7,9%.

### C. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan bersih sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Salah satu tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR ialah infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Luasnya area TPA yang memadai di kota-kota besar dan seluruh wilayah dibutuhkan untuk mengatasi kuantitas sampah yang masuk. Berikut ini adalah data jumlah TPA beserta area TPA (Ha) pada setiap provinsi.





**Jumlah TPA dan Area (Ha) Berdasarkan Provinsi**

Sumber Data : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan grafik di atas, total infrastruktur TPA yang terbangun adalah 271 TPA dengan luas total fasilitas pengolahan persampahan 1772,693 Ha. Saat ini, TPA terbanyak terdapat pada

Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 21 TPA dengan luas area TPA 133,75 Ha, sedangkan total area TPA terluas terdapat pada provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 203,14 Ha.

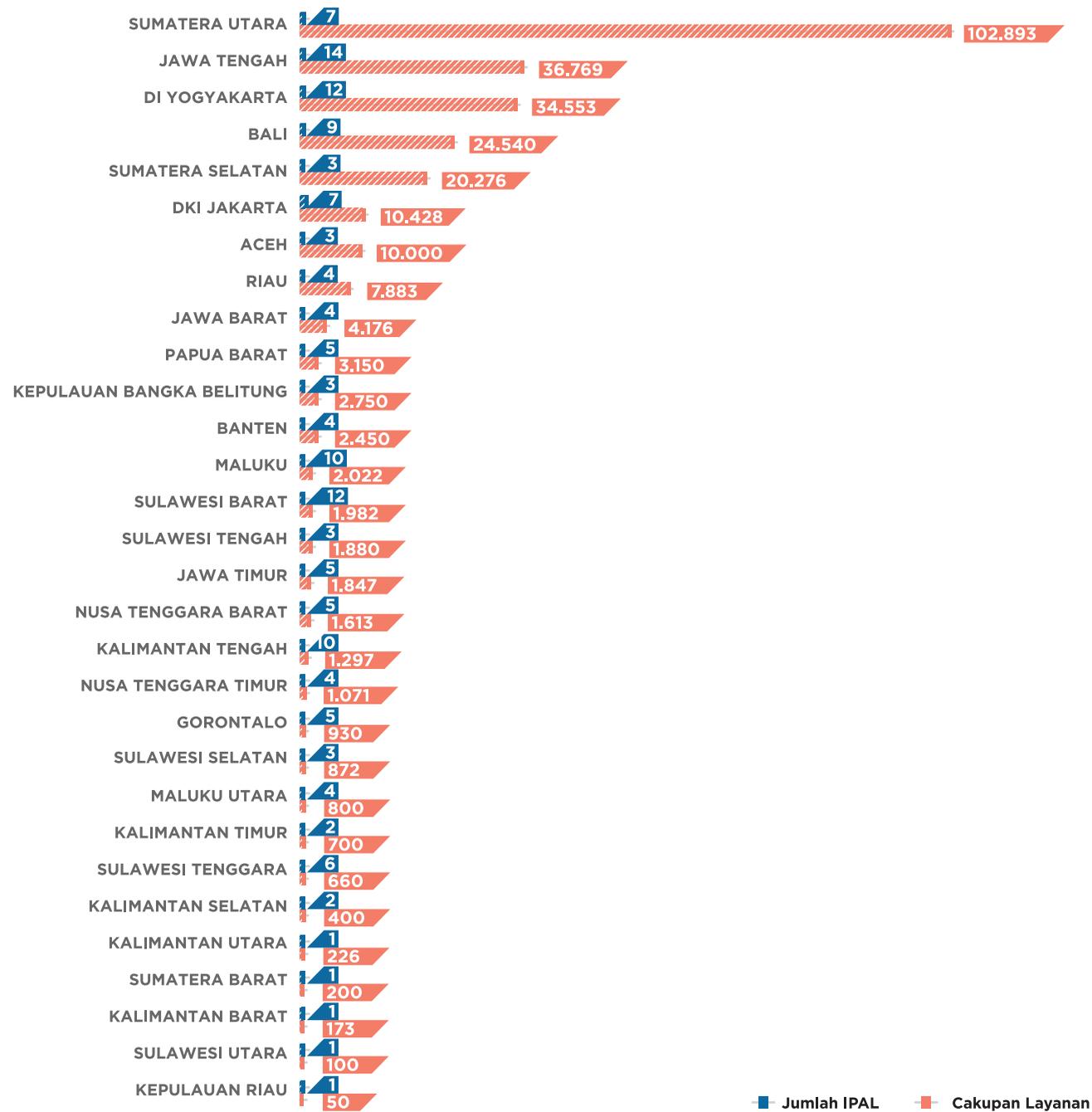
## D. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Lingkungan layak huni dan sehat adalah lingkungan yang terjaga kebersihan, kerapian dan kelestariannya. Salah satu tantangan terbesar saat ini selain sampah ialah limbah yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak kualitas tanah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan dua cara yaitu sistem setempat/ kawasan (*on site*) dan sistem terpusat (*off site*). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar. Oleh sebab itu, dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.



*Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah*



**Jumlah IPAL dan Cakupan Layanan (KK) Berdasarkan Provinsi**

Sumber Data : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

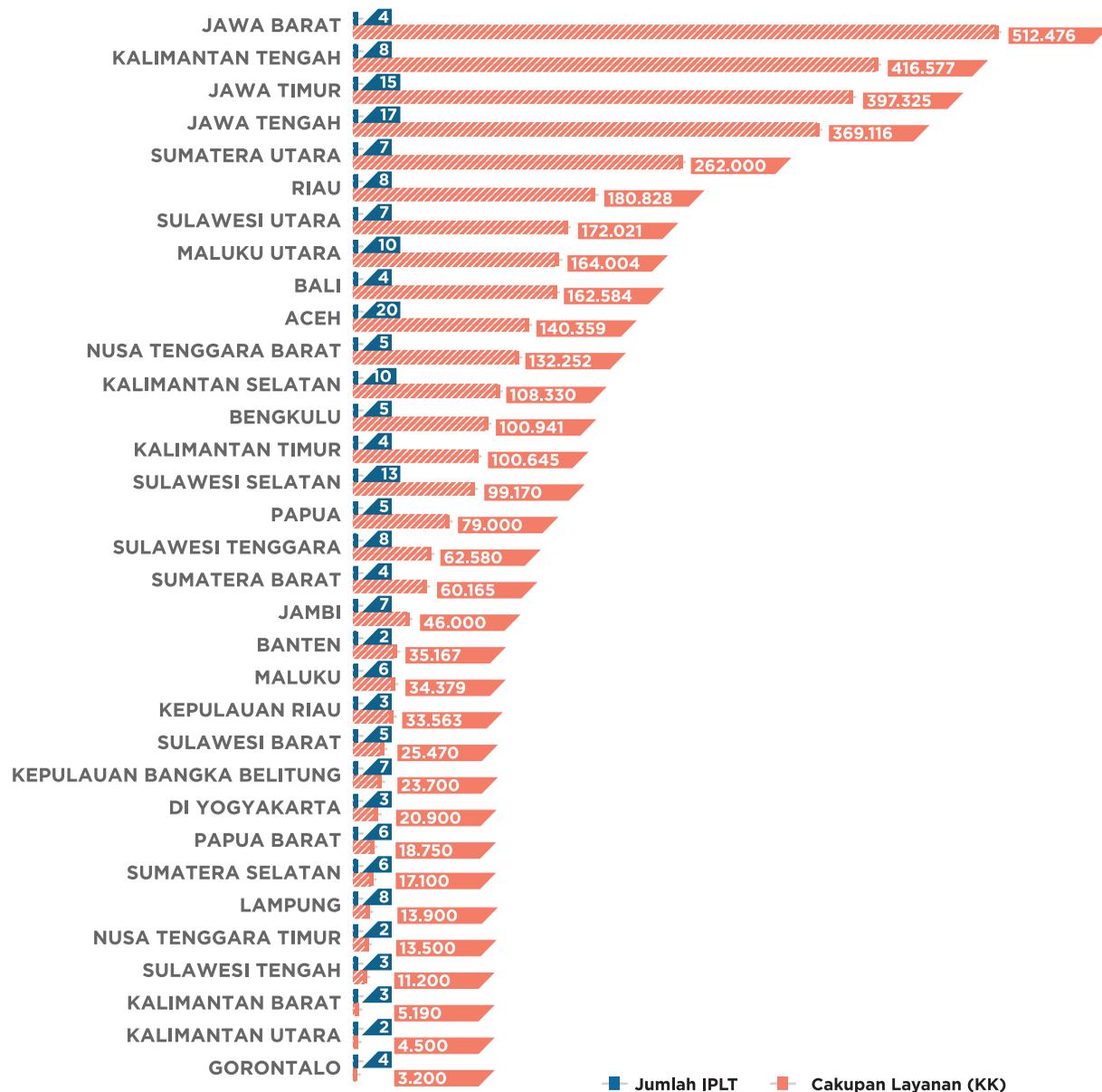
Berdasarkan diagram di atas, cakupan layanan IPAL paling banyak pada Provinsi Sumatera Utara dengan banyaknya keluarga 102.893 KK. Sedangkan total infrastruktur IPAL

terbangun adalah 151 IPAL dengan total cakupan layanan 276.691 KK. Jumlah IPAL terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan 14 IPAL.

## E. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Keberadaan sanitasi layak dapat secara signifikan menurunkan tingkat kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Selain itu, keberadaan sanitasi layak dapat turut menurunkan prevalensi stunting dan tingkat penyakit yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah bangunan yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.





**Jumlah IPTL dan Cakupan Layanan (KK) Berdasarkan Provinsi**

Sumber Data : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, cakupan layanan IPTL terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya keluarga 512.476 KK. Sedangkan total

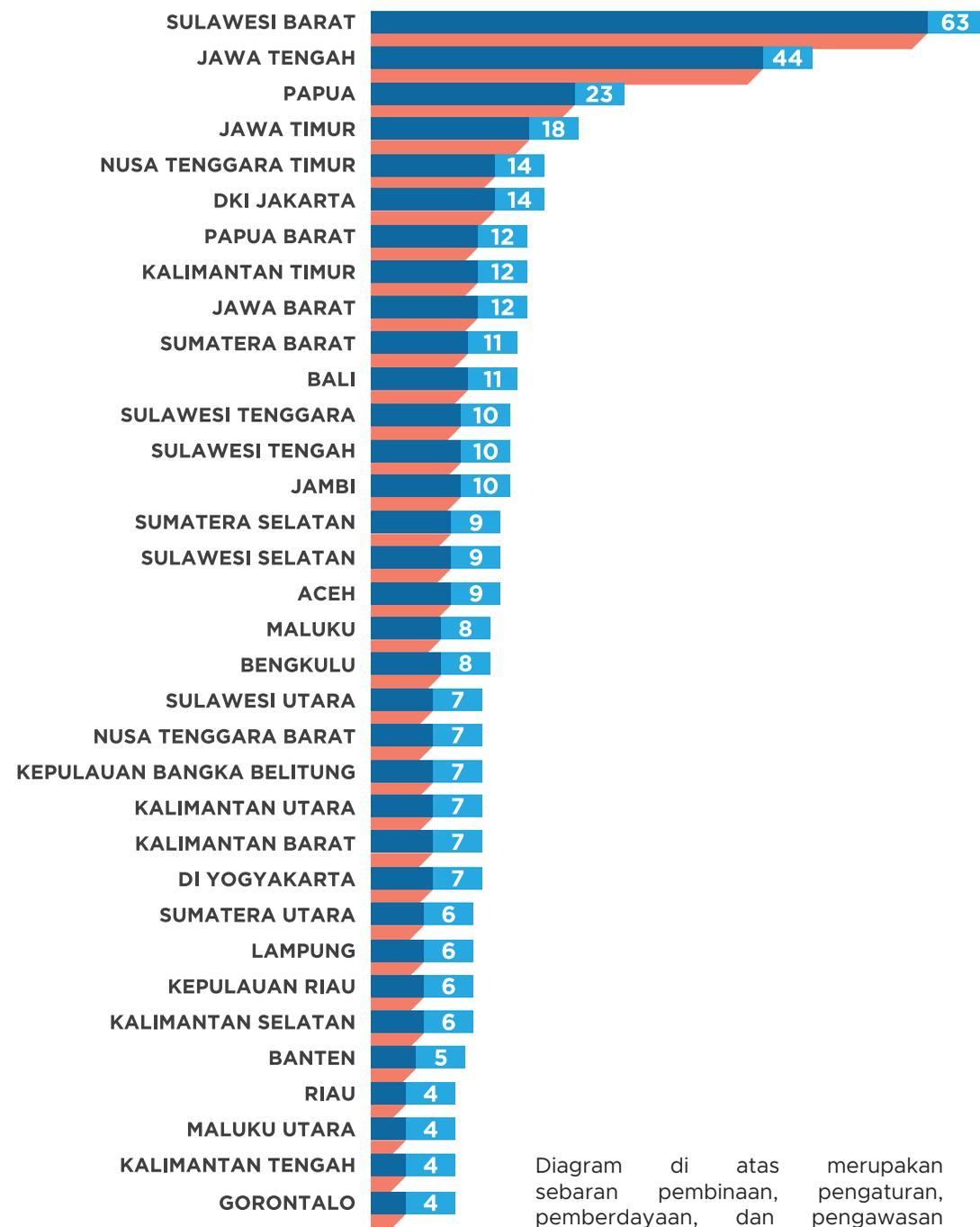
infrastruktur IPTL terbangun adalah 221 IPTL dengan jumlah IPTL terbanyak terdapat pada Provinsi Aceh yaitu sebanyak 20 IPTL.

## F. Bina Penataan Bangunan (BPB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara. Program dari Bina Penataan Bangunan di antaranya adalah penataan bangunan kawasan pesisir, renovasi atau penataan kawasan sarana ibadah, penataan istana kepresidenan, kebun raya, gedung pemerintah, dan lain-lain.

Terbangunnya gedung-gedung dan penataan bangunan dan lingkungan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan bangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan cita-cita yang dapat diwujudkan melalui kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan.





Jumlah BPB

**Jumlah BPB Berdasarkan Provinsi**

Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Diagram di atas merupakan sebaran pembinaan, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2023, Direktorat BPB telah konsisten melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan bangunan gedung di 394 kabupaten/kota dengan provinsi tertinggi yaitu Sulawesi Barat.

**G. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)**

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan

perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang. Pengembangan kawasan perbatasan diantaranya dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanaan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
PLBN Terpadu Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Sebatik	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Midang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Sei Pancang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
PLBN Terpadu Napan	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Motaain	Belu	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Skouw	Kota Jayapura	Papua
PLBN Terpadu Sota	Merauke	Papua
PLBN Terpadu Yetetkun	Boven Digoel	Papua

Sebaran PLBN di Indonesia

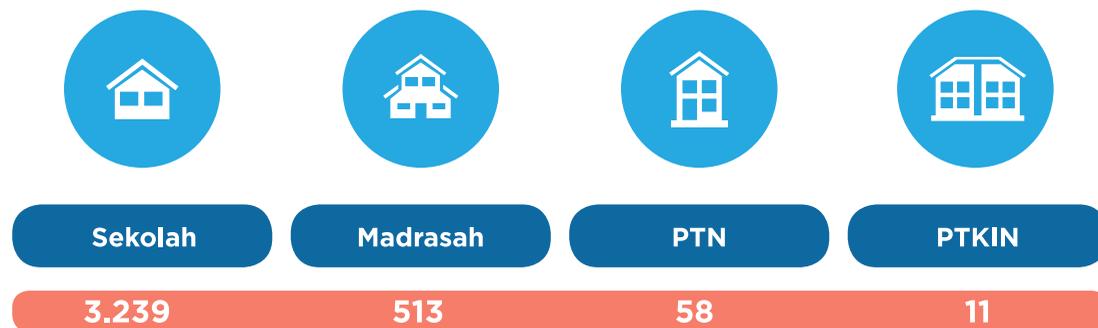
Sumber Data : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 17 PLBN yang tersebar di Indonesia. Terdapat penambahan 1 PLBN di tahun 2023 yaitu PLBN Sei Pancang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

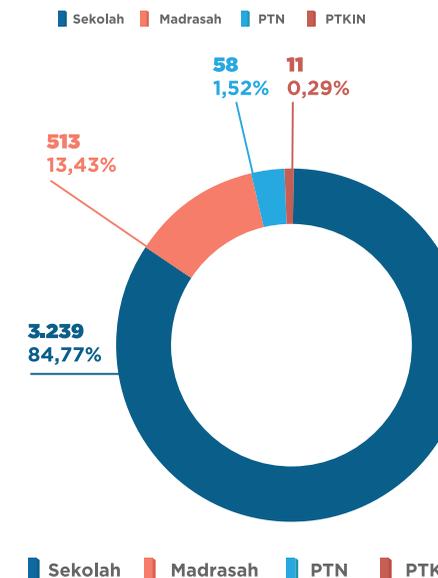
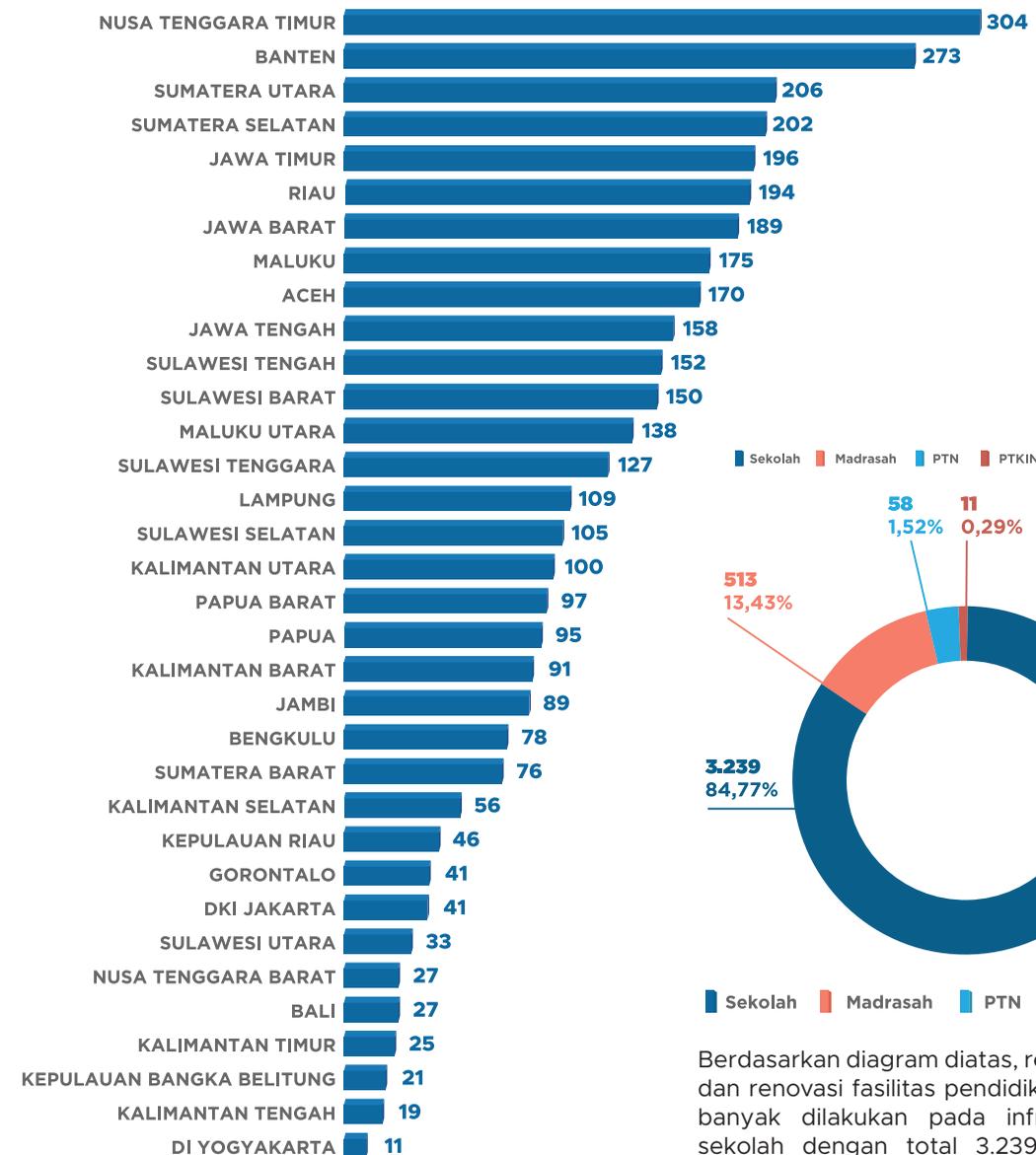
## H. Fasilitas Pendidikan

Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang terdiri dari sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Pekerjaan rehabilitasi sarana pendidikan dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



Sampai dengan Desember 2023, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR mencapai 3.821 fasilitas pendidikan, dengan rincian 3.239 sekolah, 513 madrasah, 58 PTN, dan 11 PTKIN.



### Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Provinsi

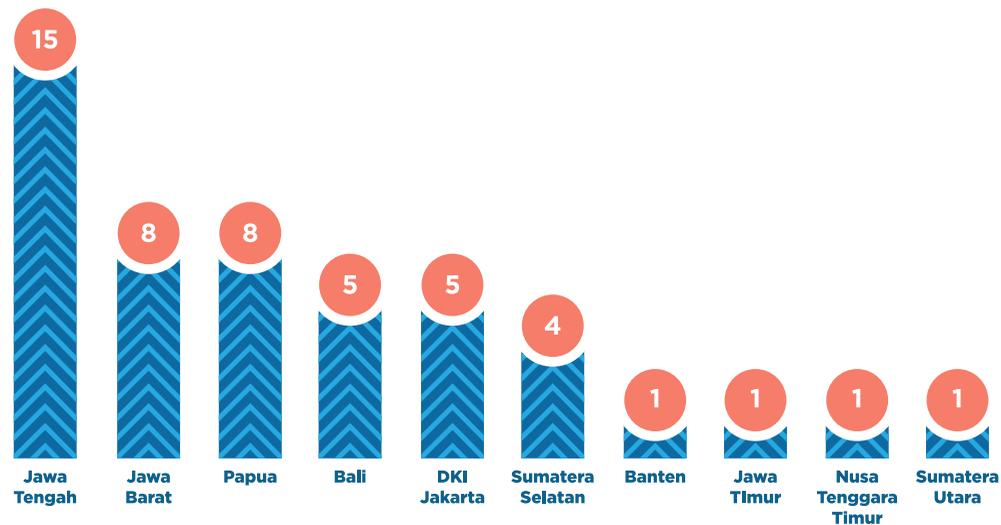
Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram diatas, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan paling banyak dilakukan pada infrastruktur sekolah dengan total 3.239 Sekolah atau 84.77% dari total rehabilitasi dan renovasi sebanyak 3.821 fasilitas pendidikan. Sementara itu, provinsi dengan fasilitas pendidikan yang dilakukan rehabilitasi dan renovasi paling banyak terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total 304 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 298 sekolah dan 6 PTN. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

## I. Sarana Olahraga

Selain melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan, Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga sesuai dengan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019. Dukungan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta memberikan ruang pembinaan bagi atlet dan pengembangan prestasi olahraga.



Jumlah Sarana Olahraga Berdasarkan Provinsi

Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, total sarana olahraga yang telah dibangun atau direnovasi atau direhabilitasi oleh Kementerian PUPR sebanyak 49 sarana olahraga, dengan sarana olahraga terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 sarana olahraga.

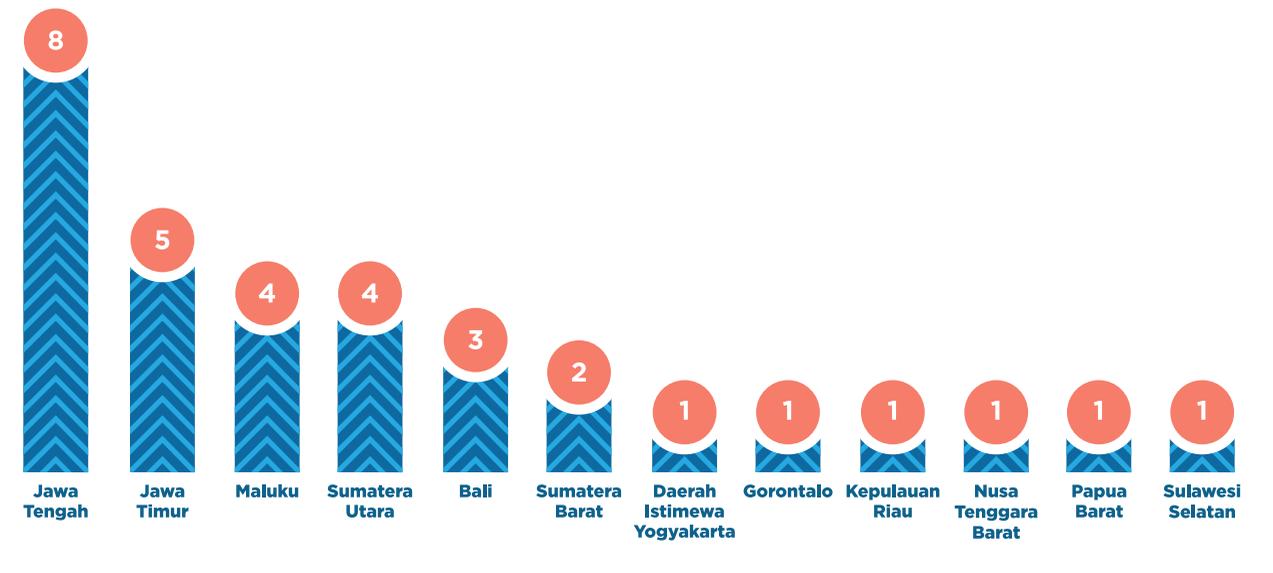


Stadion teladan, medan

## J. Pasar Rakyat

Dalam rangka dukungan untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pasar rakyat.

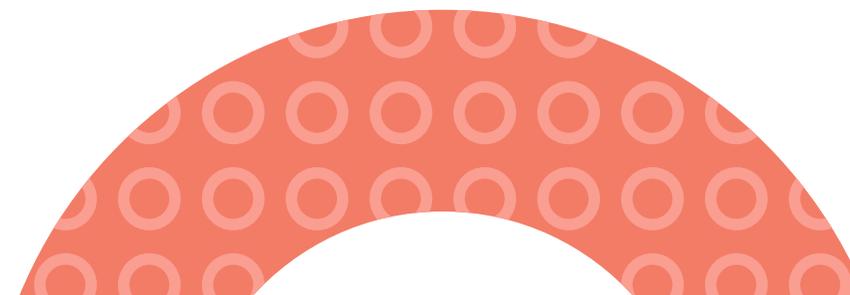
Pembangunan infrastruktur pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata.



Jumlah Infrastruktur Pasar Berdasarkan Provinsi

Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

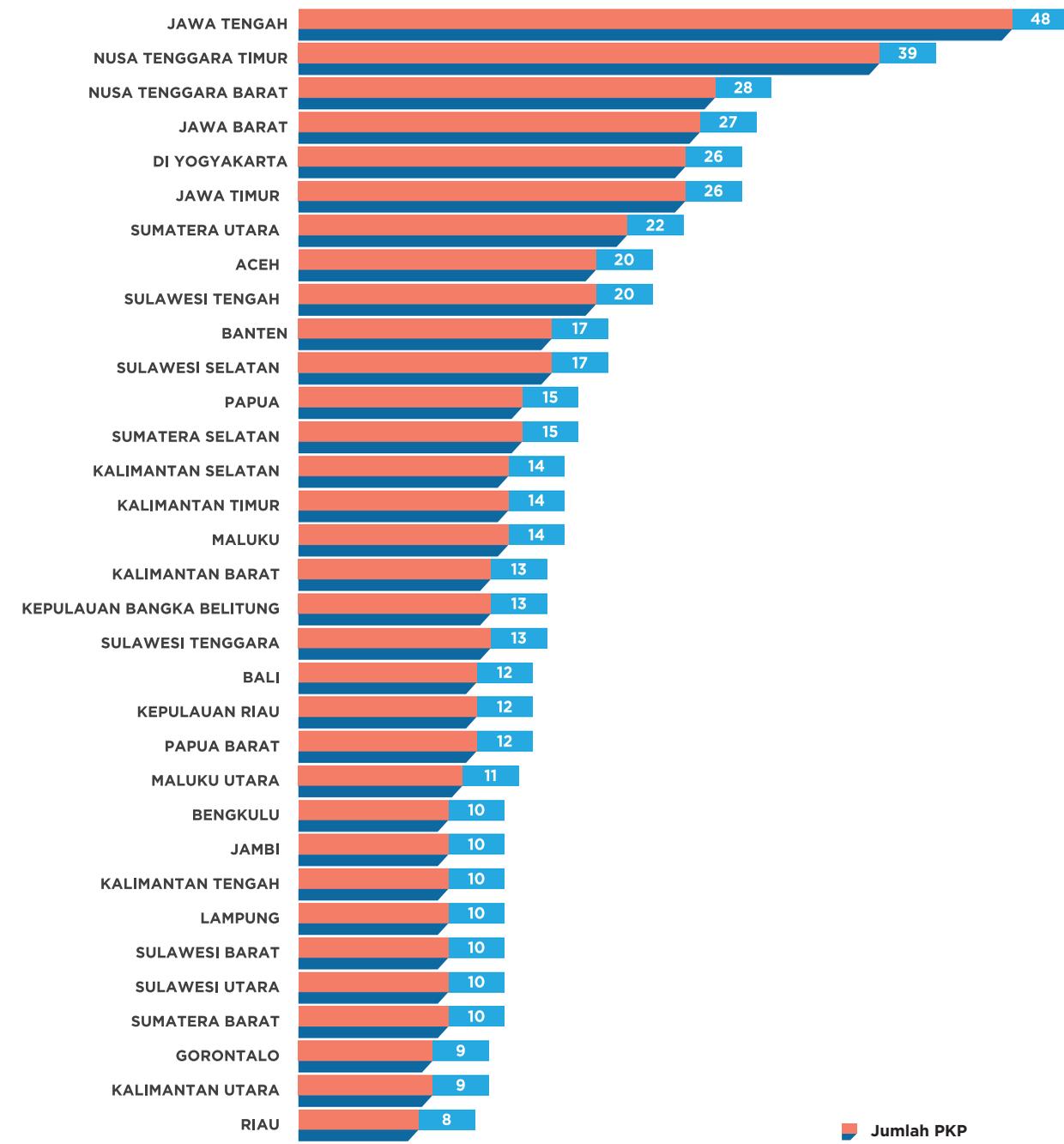
Berdasarkan diagram di atas, total pembangunan pasar yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah 32 pasar, dengan jumlah infrastruktur pasar terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 8 pasar.



# K. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

Bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat di Indonesia menyebabkan peningkatan arus urbanisasi. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Kebutuhan tempat tinggal yang layak huni berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pengembangan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman.



**Jumlah PKP Berdasarkan Provinsi**  
 Sumber Data :  
 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, total jumlah PKP di Indonesia adalah 544 PKP dengan PKP terbanyak terdapat Provinsi Jawa Tengah yaitu 48 PKP.



Rumah Khusus Nelayan Karuak, Lombok

Sumber : <https://harian.disway.id/read/718171/jokowi-buka-bukaan-di-munas-rei-121-juta-orang-indonesia-tak-punya-rumah>



# PERUMAHAN



BAB

# 06

# PERUMAHAN

# 06

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebagian diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan meluncurkan beberapa program

pembangunan rumah dan juga bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



*Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan meluncurkan beberapa program pembangunan rumah dan juga bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan*

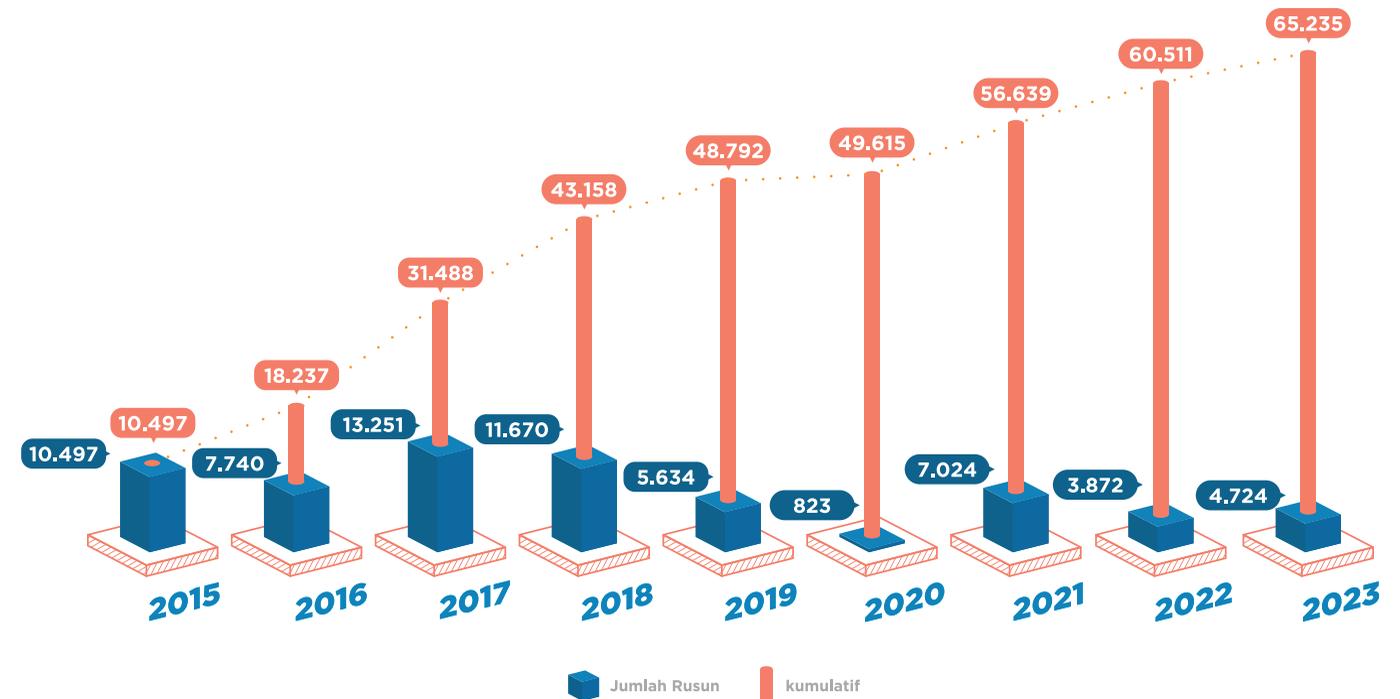


## 1. Rumah Susun

Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pembangunan rumah susun bisa menjadi alternatif solusi permasalahan kebutuhan perumahan

dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan ketersediaan lahan terbatas. Melalui desain *vertical housing*, pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kepentingan bersama.

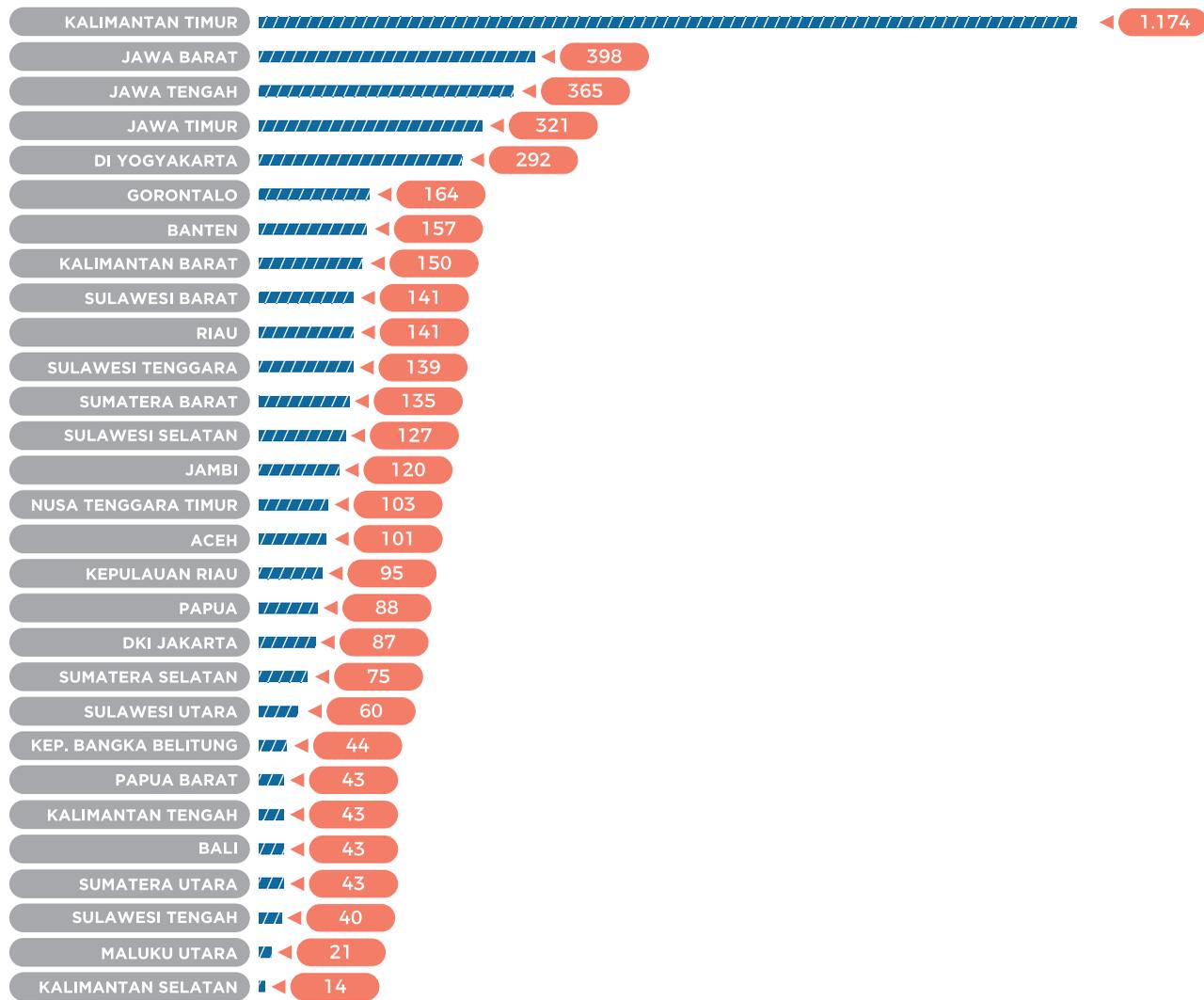
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, Kementerian PUPR telah membangun 65.235 unit rumah susun. Jumlah rumah susun yang dibangun pada tahun 2023 mengalami peningkatan 852 lebih banyak dibandingkan tahun 2022, yaitu berjumlah 4.724 unit rumah susun. Berikut ini adalah jumlah unit rumah susun yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2023.



**Jumlah Rumah Susun Tahun 2015-2023**

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024



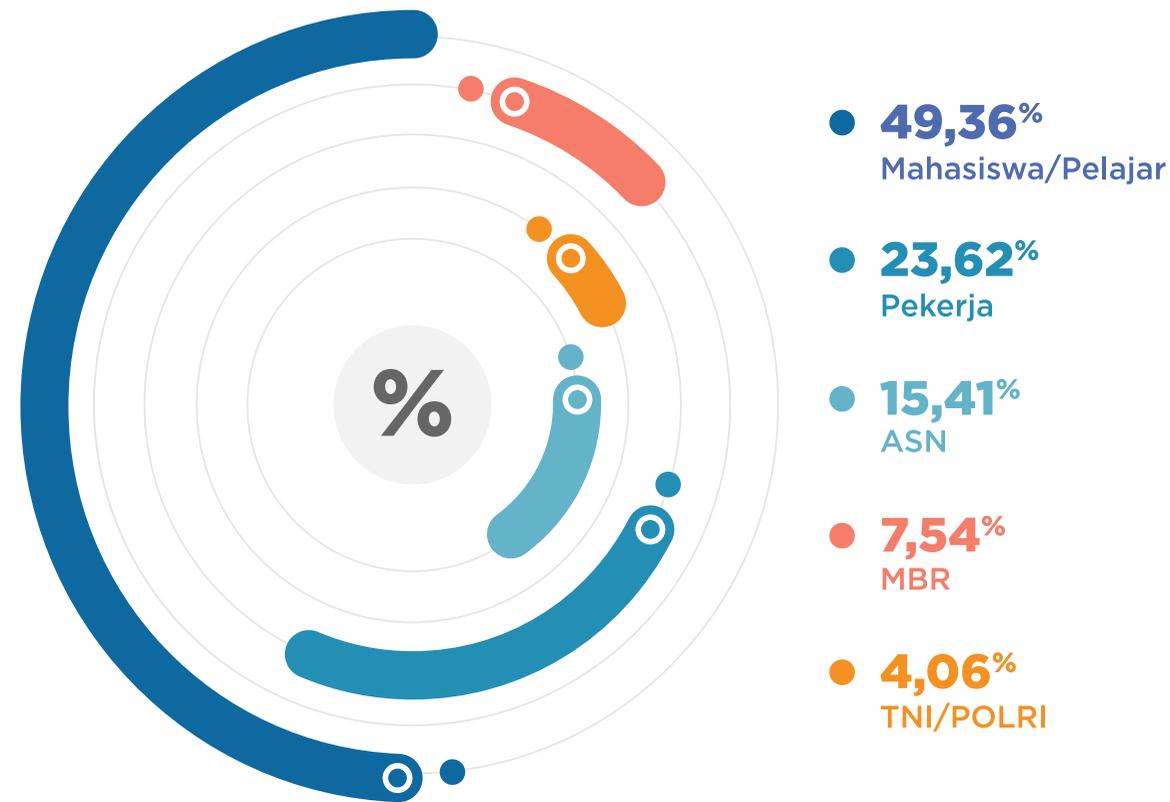


////// Rumah Susun

### Sebaran Rumah Susun Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

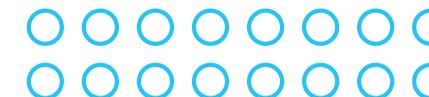
Berdasarkan grafik persebarannya di Indonesia, pada tahun 2023 hampir 25% jumlah Rumah Susun atau terbanyak yang dibangun berada di Provinsi Kalimantan Timur yakni sebanyak 1.174 Rumah Susun.



### Presentase Penerima Rumah Susun Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Penerima rumah susun terbanyak di tahun 2023 berasal dari kalangan Mahasiswa/Pelajar dengan proporsi 49,36%, kemudian dari kalangan Pekerja sebanyak 23,62%, ASN sebanyak 15,41%, MBR sebanyak 7,54%, dan kalangan TNI/POLRI menjadi yang paling sedikit menerima rumah susun yaitu hanya sebanyak 4,06% dari total jumlah rumah susun.



## 2. Rumah Khusus

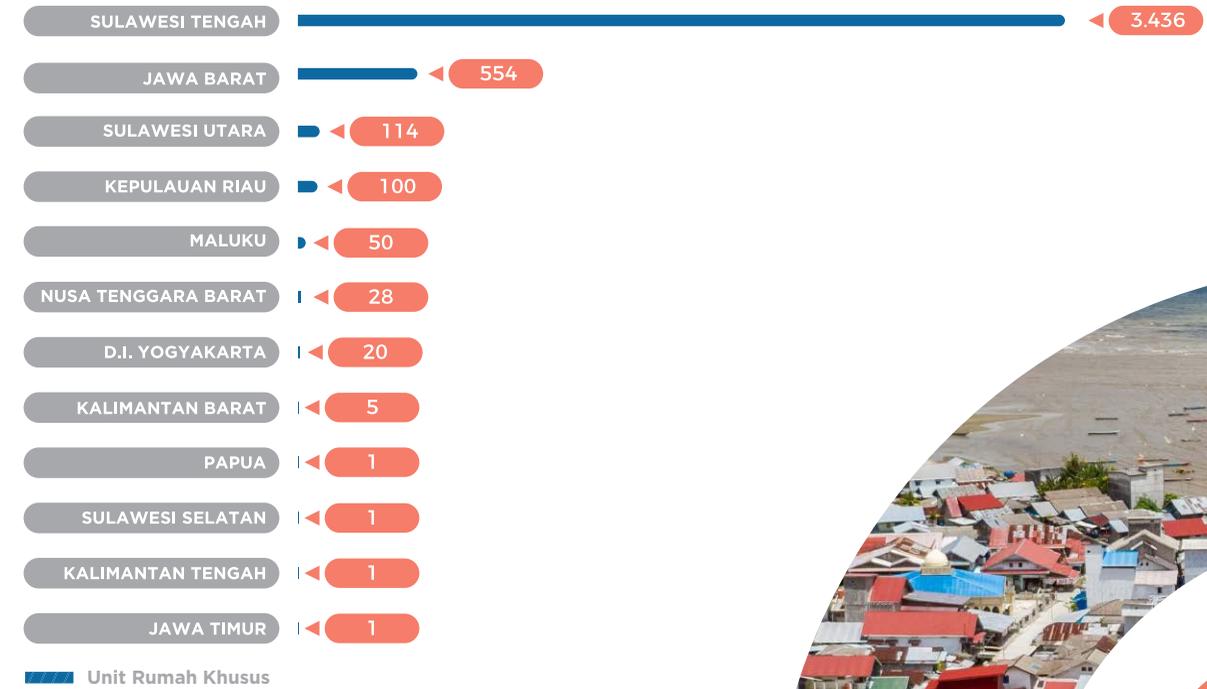
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah terkait peruntukannya, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, TNI/Polri,

dan lainnya. Berikut adalah jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR beserta komposisi penerima manfaat rumah khusus tahun 2015-2023 dimana rumah khusus yang dibangun pada 2023 adalah sebanyak 4.311 unit. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya, pada 2022, yang berjumlah 4.359 unit.



**Jumlah Rumah Khusus Tahun 2015-2023**

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

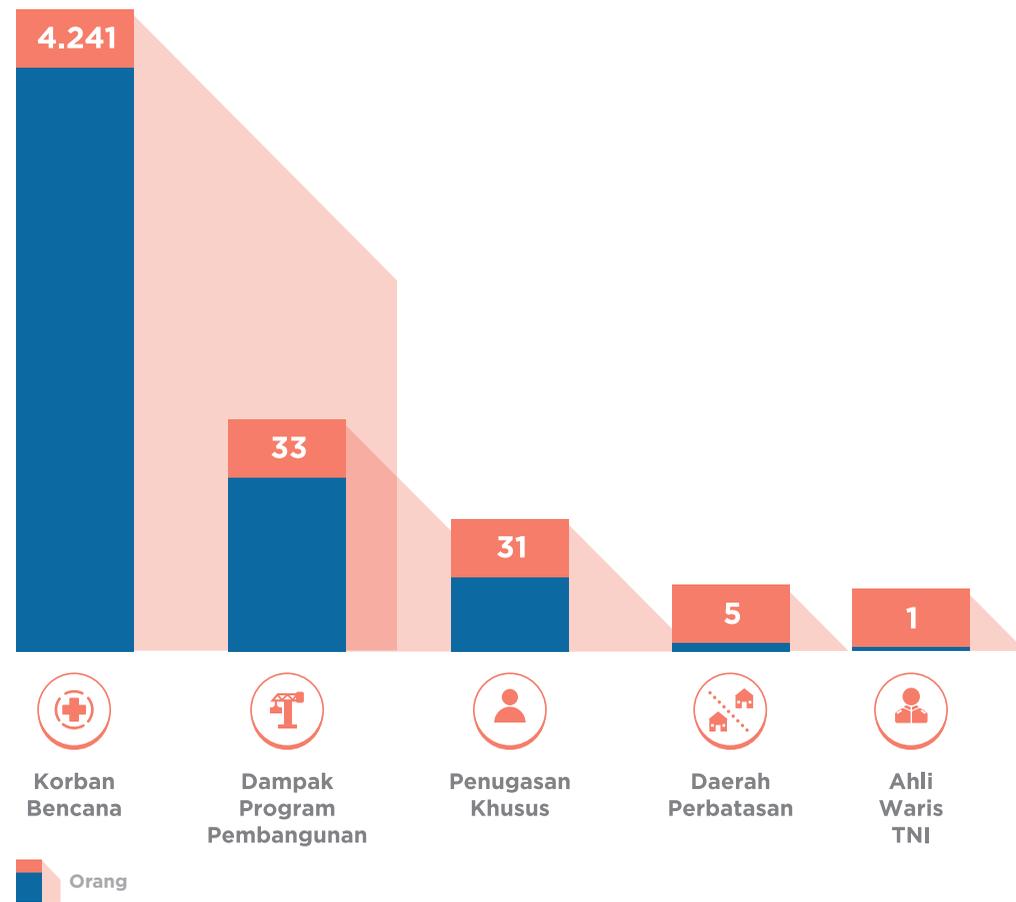


**Sebaran Rumah Khusus Tahun 2023**

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi  
Penyelenggaraan Perumahan  
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, persebaran pembangunan rumah khusus paling banyak berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebanyak 3.436 dari total 4.311 rumah.





**Penerima Rumah Khusus Tahun 2023**

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, penerima rumah khusus terbanyak pada tahun 2023 adalah masyarakat yang menjadi korban bencana seperti banjir atau gempa bumi.

**3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Undang Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Namun kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni dari segi sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. BSPS hadir sebagai program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

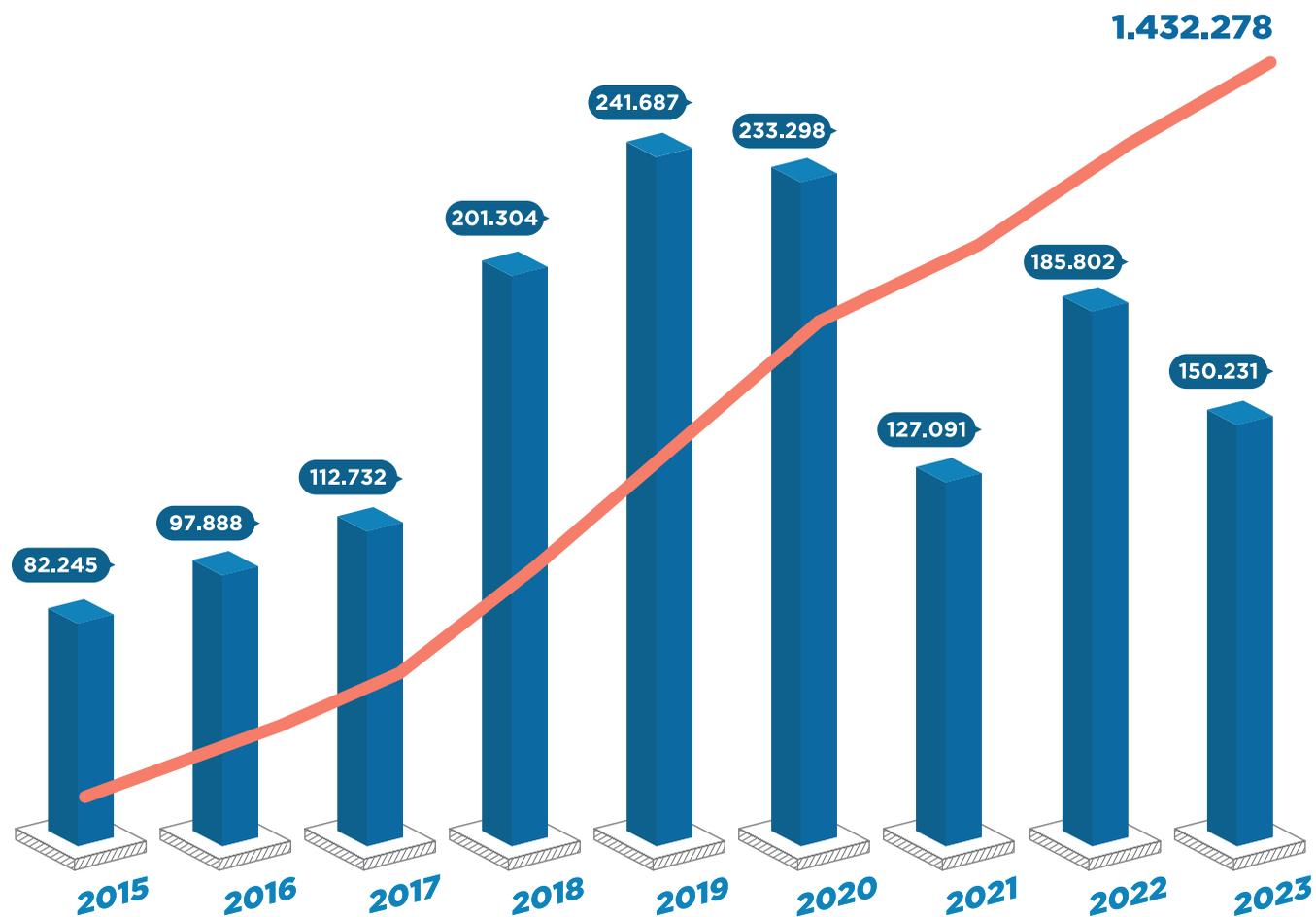
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2022, Penerima bantuan kegiatan BSPS merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan yang terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program.

Masyarakat yang menjadi sasaran penerima BSPS adalah MBR yang memenuhi persyaratan, di antaranya adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, menguasai tanah dengan alas hak yang sah, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP), menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan Pemerintah untuk bantuan perumahan, bersedia bereswadaya, dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung bersama-sama.

Berikut adalah realisasi BSPS tahun 2015-2023 beserta sebaran program BSPS di Indonesia.

*Pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni*

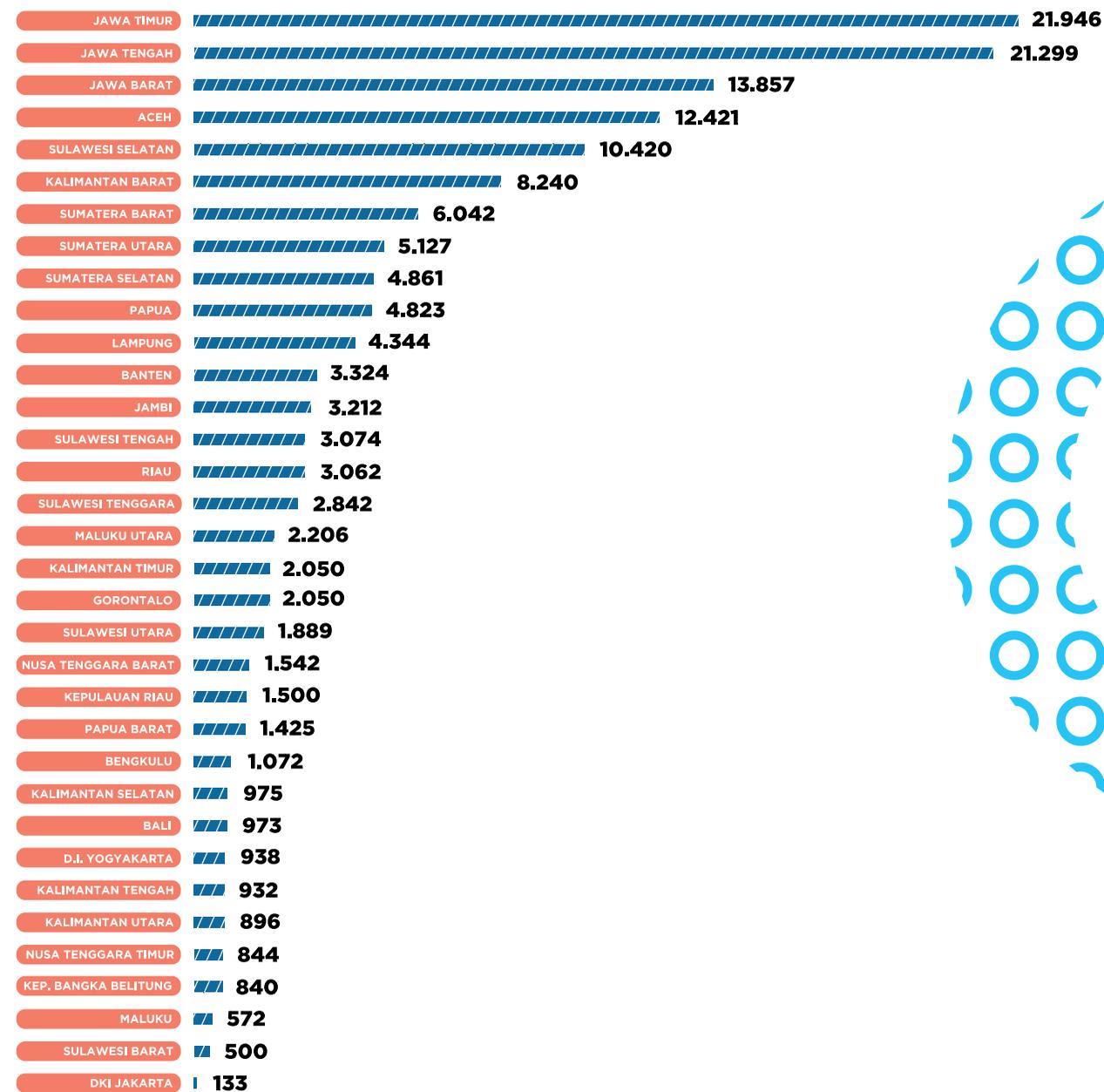




**Jumlah Unit Rumah Penerima BSPS Tahun 2015 - 2023**  
 Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  
 Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024



BSPS hadir sebagai program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni



**Sebaran BSPS Tahun 2023**

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan  
 Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

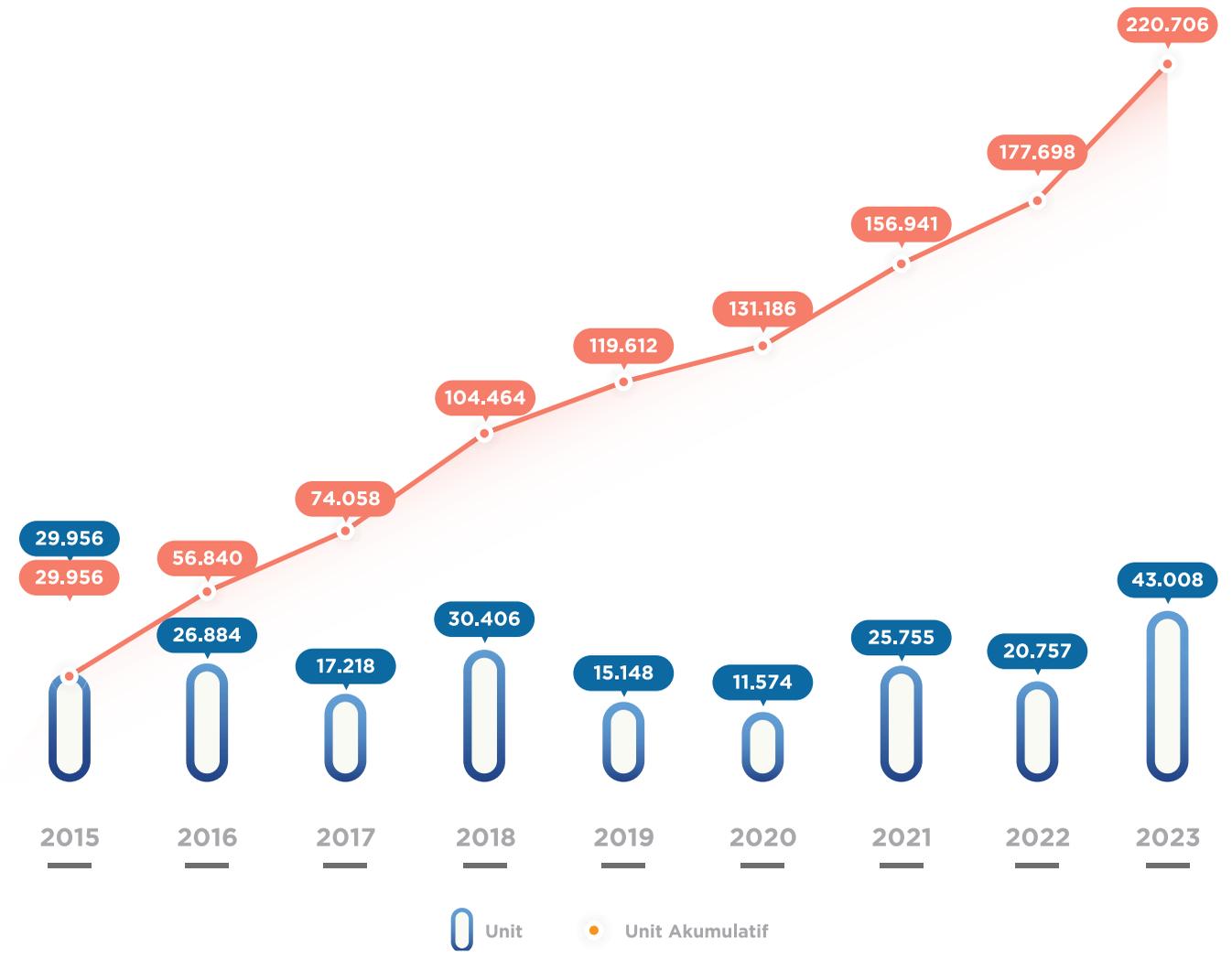
BSPS yang disalurkan pada tahun 2023 mencapai 150.231. Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 35.571. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak mendapatkan BSPS,

kemudian diikuti Provinsi Jawa Tengah. Kedua provinsi tersebut mendapatkan BSPS lebih dari 21.000. Sementara Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling sedikit mendapatkan BSPS, sebanyak 133.

#### 4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)

Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian untuk memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022, bentuk bantuan pembangunan PSU meliputi jalan, drainase, sistem penyediaan air minum, dan prasarana dan sarana persampahan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah lebih dari 100% dibanding tahun 2022, yaitu sebanyak 43.008 PSU yang tersalurkan. Berikut ini adalah jumlah unit rumah yang mendapat bantuan PSU pada tahun 2015-2023.



**Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2015-2023**  
 Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah lebih dari 100% dibanding tahun 2022, yaitu sebanyak 43.008 PSU yang tersalurkan



**BINA  
KONSTRUKSI**



**BAB**

**07**

# BINA KONSTRUKSI

# 07

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa. Kementerian PUPR melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas melalui sektor jasa konstruksi. Berdasarkan PP No.22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No.14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi, konstruksi merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah. Kegiatan konstruksi inilah yang melahirkan berbagai infrastruktur vital seperti gedung, jalan, jembatan, bangunan air, sistem drainase, sanitasi, dan berbagai fasilitas penting lainnya yang menjadi pondasi bagi kemajuan suatu negara.

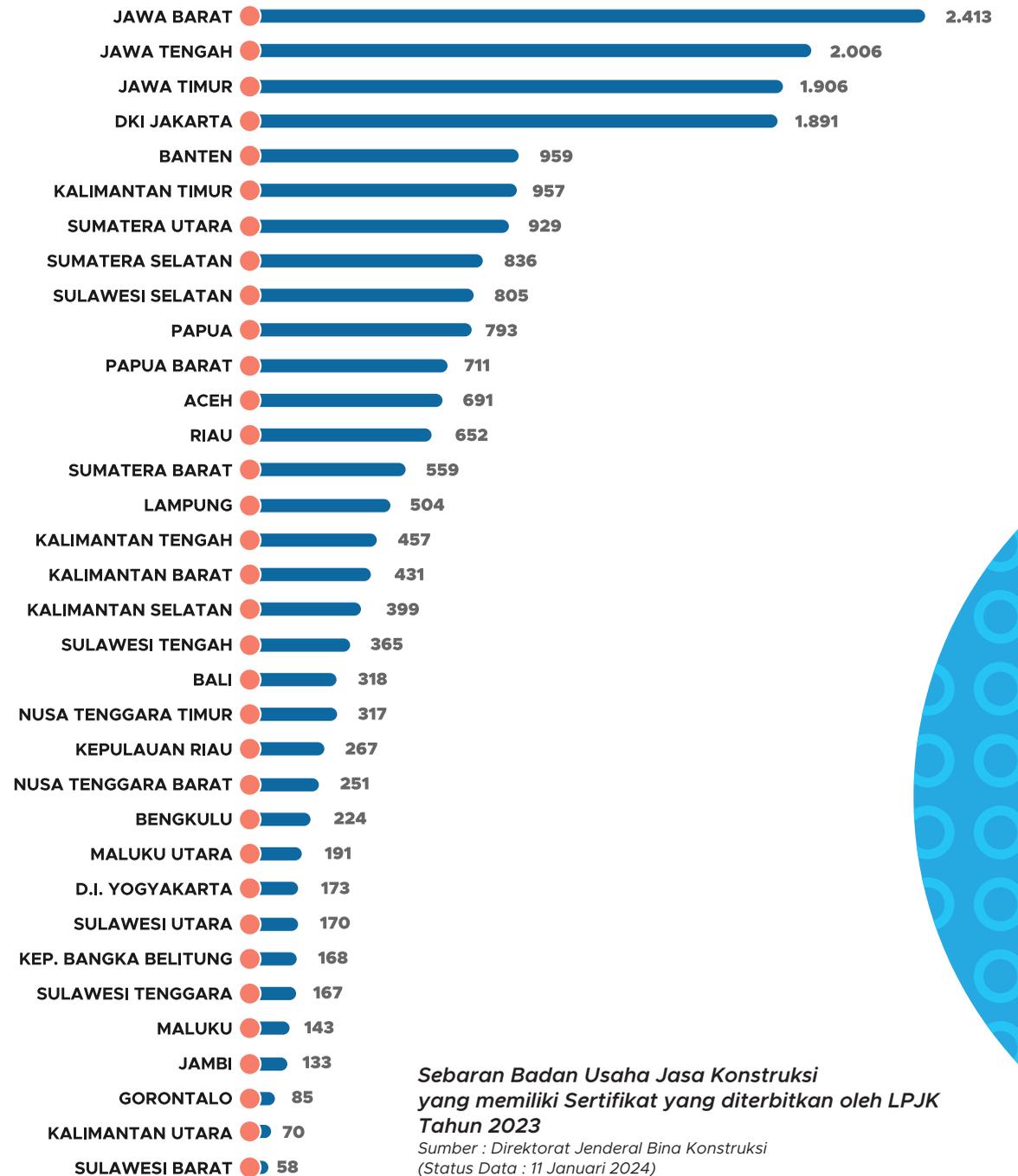
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 sektor konstruksi menempati posisi ke-4 dalam kontribusinya pada pembentukan Produk Domestik Bruto. Peran sektor konstruksi tersebut tidak terlepas dari komitmen penuh para pemangku kepentingan yang terus berupaya menjaga iklim industri konstruksi agar terus kondusif. Dari sisi Pemerintah, Kementerian PUPR berupaya mendukung industri konstruksi dengan berbagai kebijakan pembinaan untuk mendukung percepatan dan kemudahan perizinan berusaha, efisiensi proses dan peningkatan kualitas produk jasa konstruksi, modernisasi pengadaan barang/jasa, serta peningkatan kapasitas dan perbaikan tata Kelola usaha dan sumber daya secara berkesinambungan.

Harapannya, dengan penyelenggaraan infrastruktur jasa konstruksi yang berkualitas maka akan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan dan tercapai pertumbuhan ekonomi yang positif.

## 01. Badan Usaha Jasa Konstruksi

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

BUJK menjalankan jenis usaha, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai legalitas dalam menjalankan usaha. Sebelum beroperasinya LSBU untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha, pada masa transisi, LPJK diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha (pelaksanaan masa transisi sampai dengan bulan Mei 2022). Setelah Bulan Mei 2022 proses pelaksanaan sertifikasi badan usaha dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS). SBU memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 masih terdapat SBU terbitan LPJK yang sah untuk digunakan pada pelaksanaan usaha jasa konstruksi.

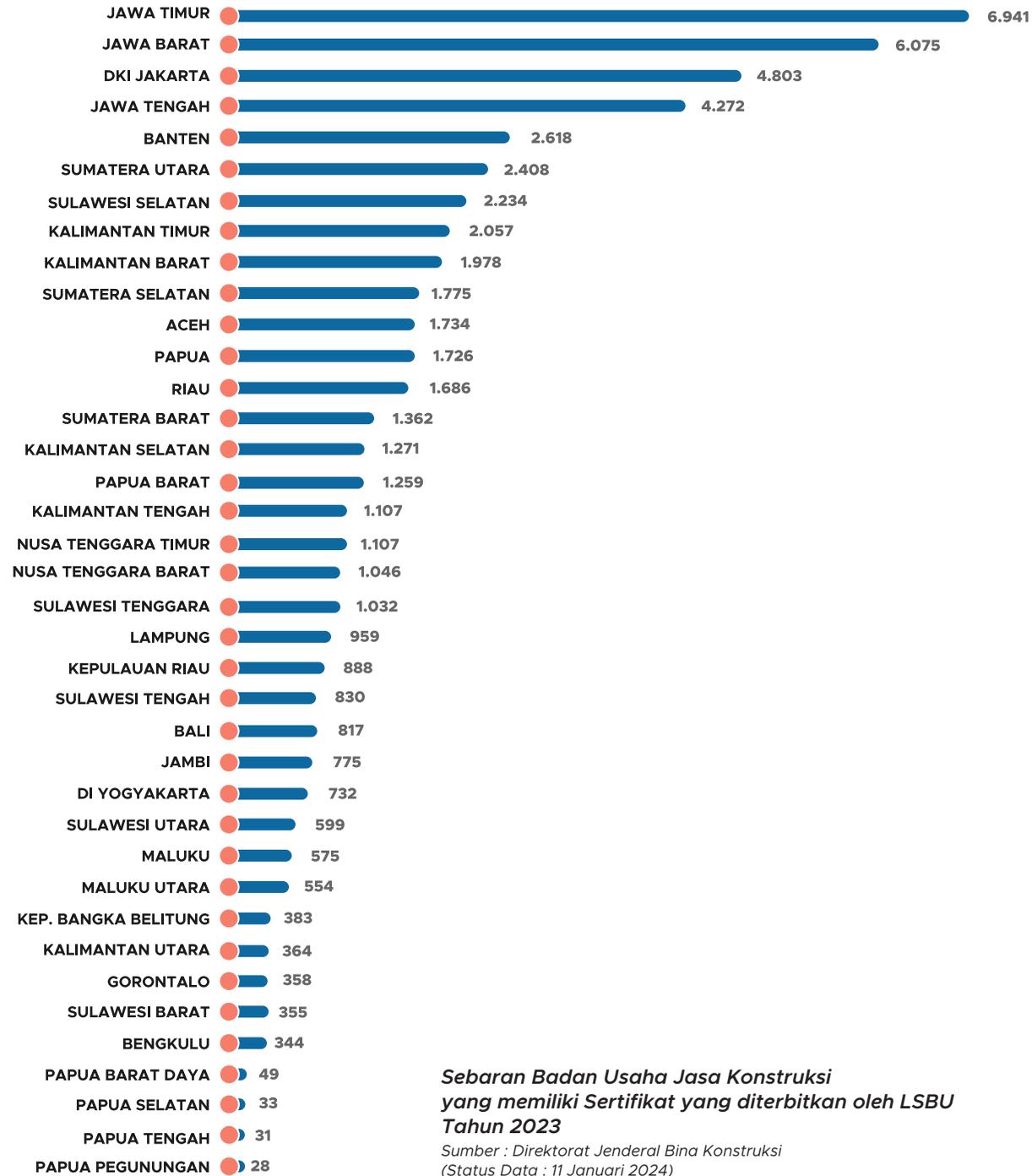


**Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik sebaran BUJK yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK di atas, pada tahun 2023 terdapat

20.999 BUJK dengan jumlah BUJK terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 2.413 BUJK.



**Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LSBU Tahun 2023**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
(Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik sebaran BUJK yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh LSBU di atas, pada tahun 2023 tercatat

ada 57.165 BUJK dengan jumlah BUJK terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 6.941 BUJK.

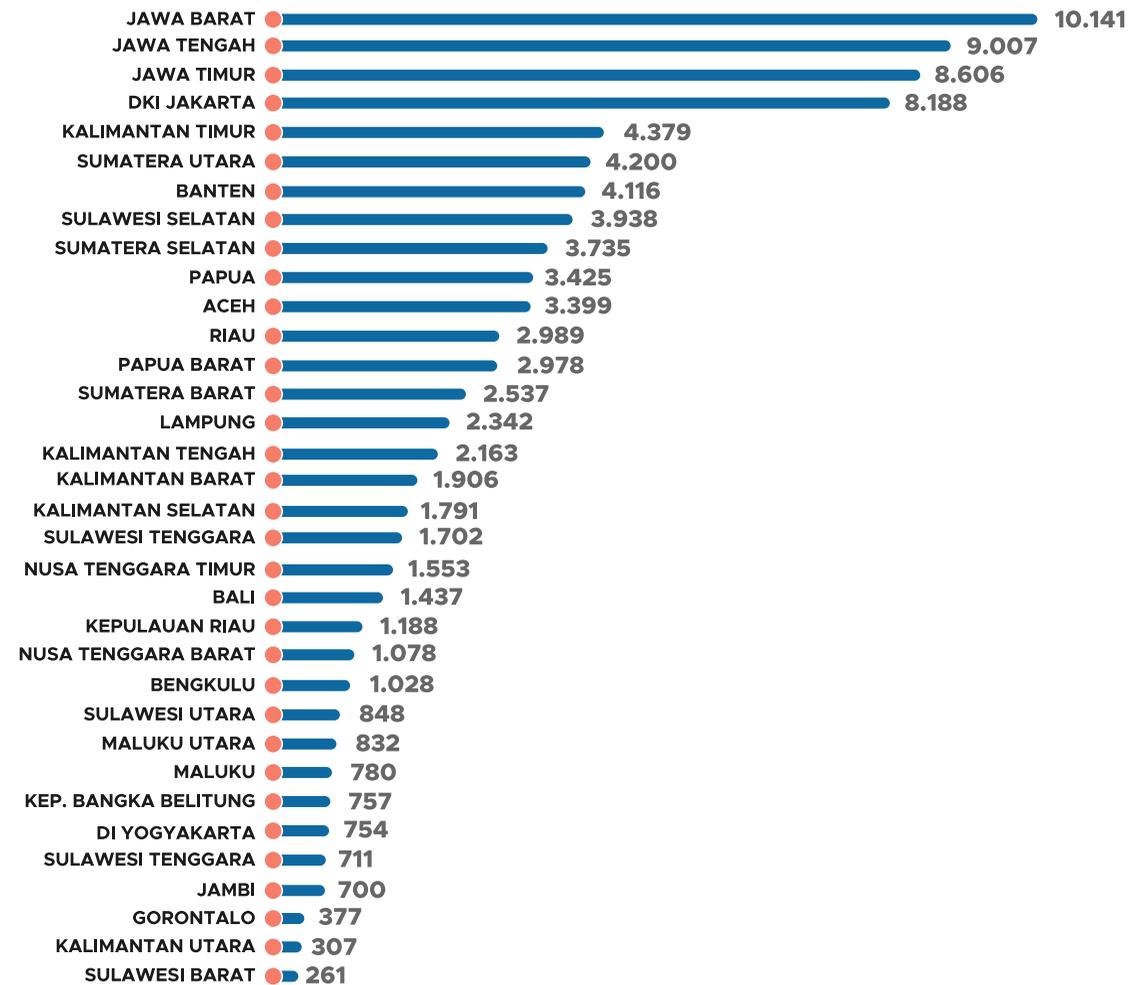
## 02 . Sertifikat Badan Usaha

BUJK harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai legalitas dalam mengerjakan pekerjaan jasa konstruksi. Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021, SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJK asing yang diterbitkan oleh LSBU.

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022, LSBU menerbitkan SBU berdasarkan subklasifikasi BUJK yang menggunakan KBLI 2020. Untuk kebutuhan masa transisi selama penerbitan SBU belum dapat dilaksanakan oleh LSBU, LPJK menerbitkan SBU berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK yang mengacu pada KBLI 2017.

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat SBU terbitan LPJK dan SBU terbitan LSBU yang keduanya diakui dan sah untuk digunakan pada pelaksanaan usaha jasa konstruksi.

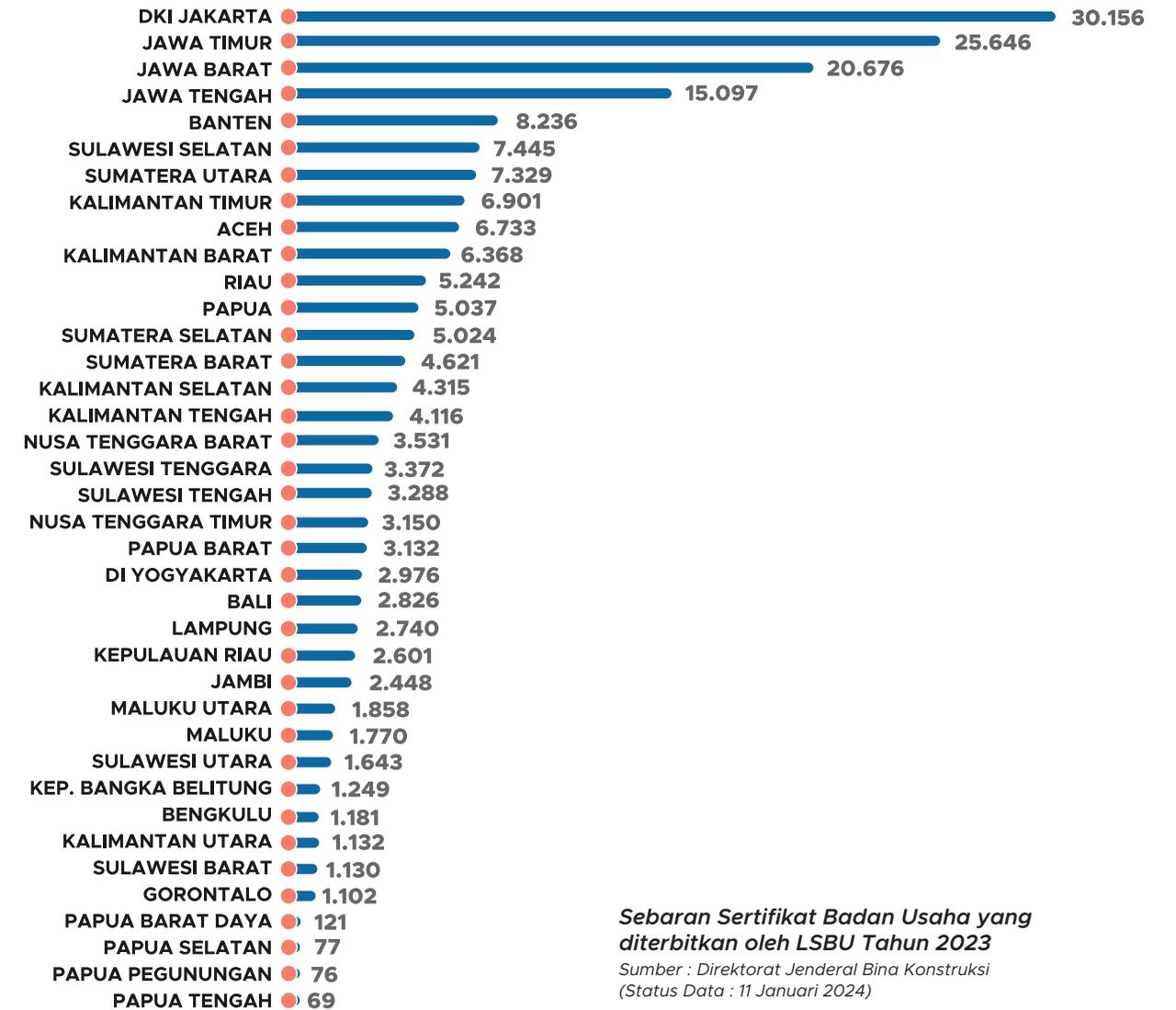




**Sebaran Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023**

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU terbitan LPJK di atas, pada tahun 2023 tercatat ada 94.153 SBU yang diterbitkan oleh LPJK dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.141 SBU.



**Sebaran Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh LSBU Tahun 2023**

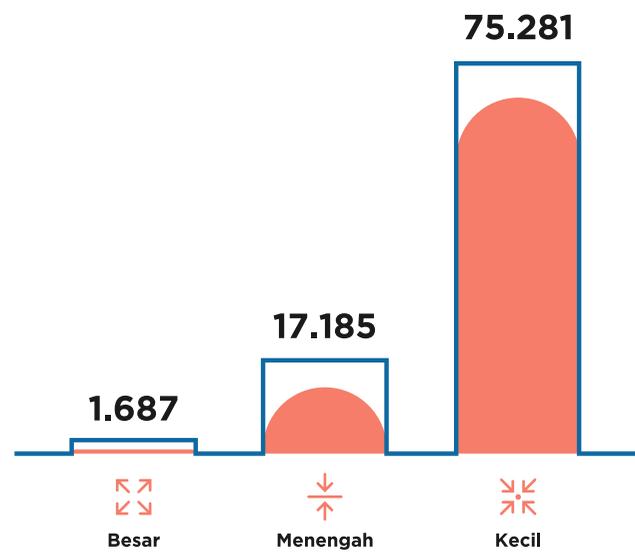
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU terbitan LSBU di atas, pada tahun 2023 tercatat ada 204.414 SBU yang terdaftar pada LSBU dengan jumlah terbanyak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30.156 SBU.



Salah satu data yang tercantum dalam sertifikat yaitu kualifikasi. Kualifikasi adalah pengelompokan usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja menurut PP No.14 Tahun 2021. Dalam Permen PUPR No.8 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penetapan kualifikasi BUK yang bersifat umum dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan

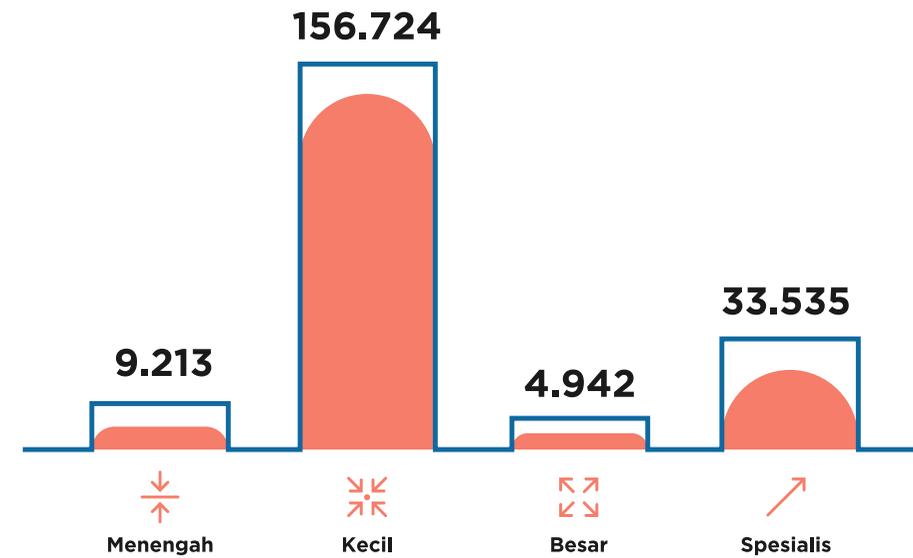
terhadap dokumen penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, dan kemampuan penyediaan peralatan. Kualifikasi akan menentukan besaran proyek yang dapat dikerjakan oleh BUK. Sama seperti sebaran SBU, sampai saat ini pengelompokan usaha jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi masih berlaku 2 (dua) versi terbitan yaitu dari LPJK dan LSBU.



**Jumlah Sertifikat Badan Usaha Berdasarkan Kualifikasi yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Jumlah SBU berdasarkan kualifikasi terbitan LPJK, SBU dengan kualifikasi kecil paling banyak yaitu 75.281 SBU, sedangkan SBU dengan kualifikasi besar paling sedikit yaitu 1.687 SBU.

*Kualifikasi adalah pengelompokan usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja*



**Jumlah Sertifikat Badan Usaha Berdasarkan Kualifikasi yang di terbitkan LSBU Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Jumlah SBU Berdasarkan Kualifikasi terbitan LSBU, SBU dengan kualifikasi kecil merupakan kualifikasi paling banyak yaitu 156.724 SBU, sementara itu SBU dengan kualifikasi besar merupakan kualifikasi paling sedikit yaitu 4.942 SBU.



### 03 . Tenaga Kerja

#### Konstruksi

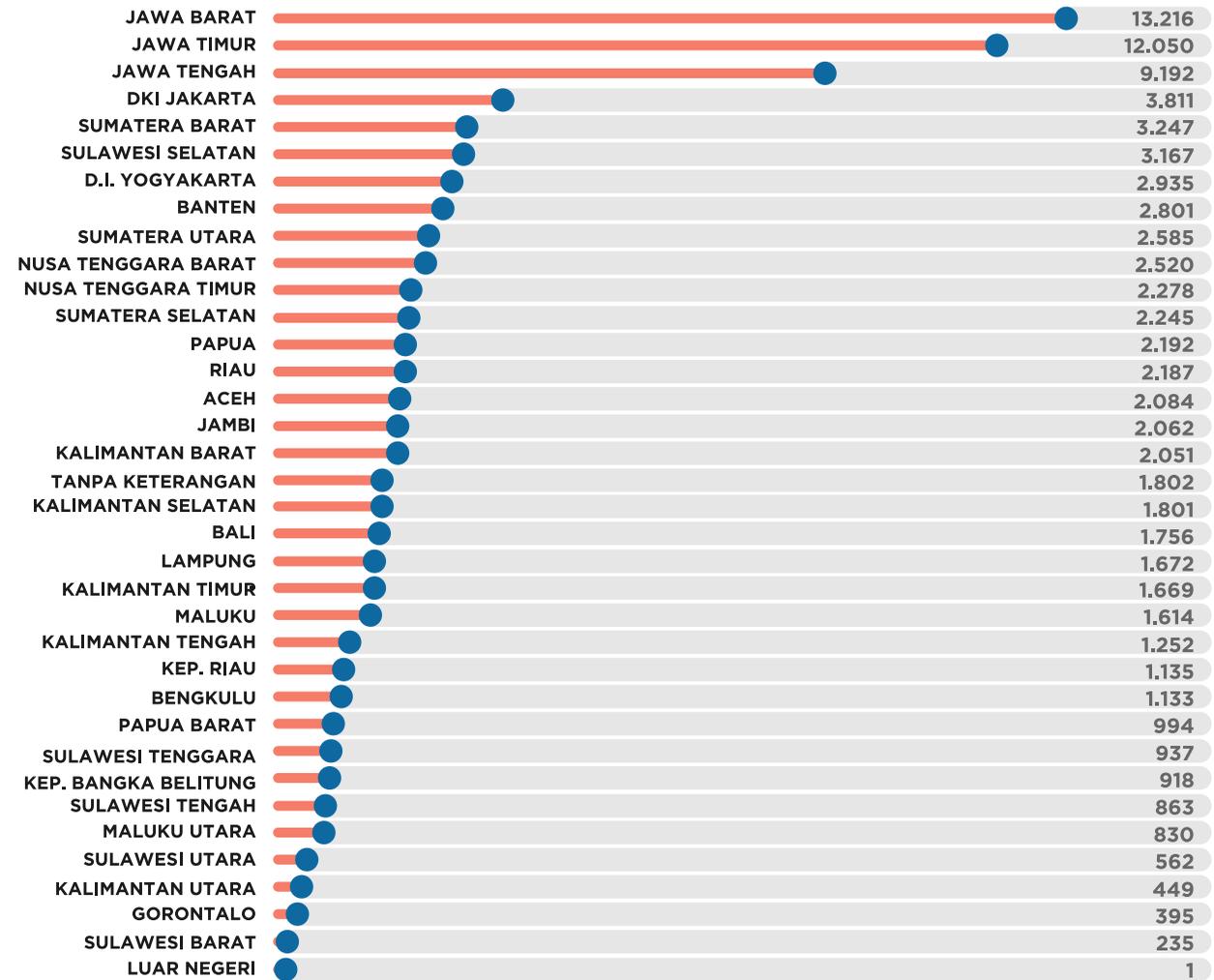
Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. TKK wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang didalamnya terdapat standar kompetensi kerja TKK tersebut berdasarkan dari kualifikasi dan klasifikasinya.

TKK dibedakan berdasarkan kualifikasi jabatannya, yaitu operator, teknisi atau analis, dan ahli. Serta diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan terkait jasa konstruksi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, TKK hanya dapat mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimiliki.



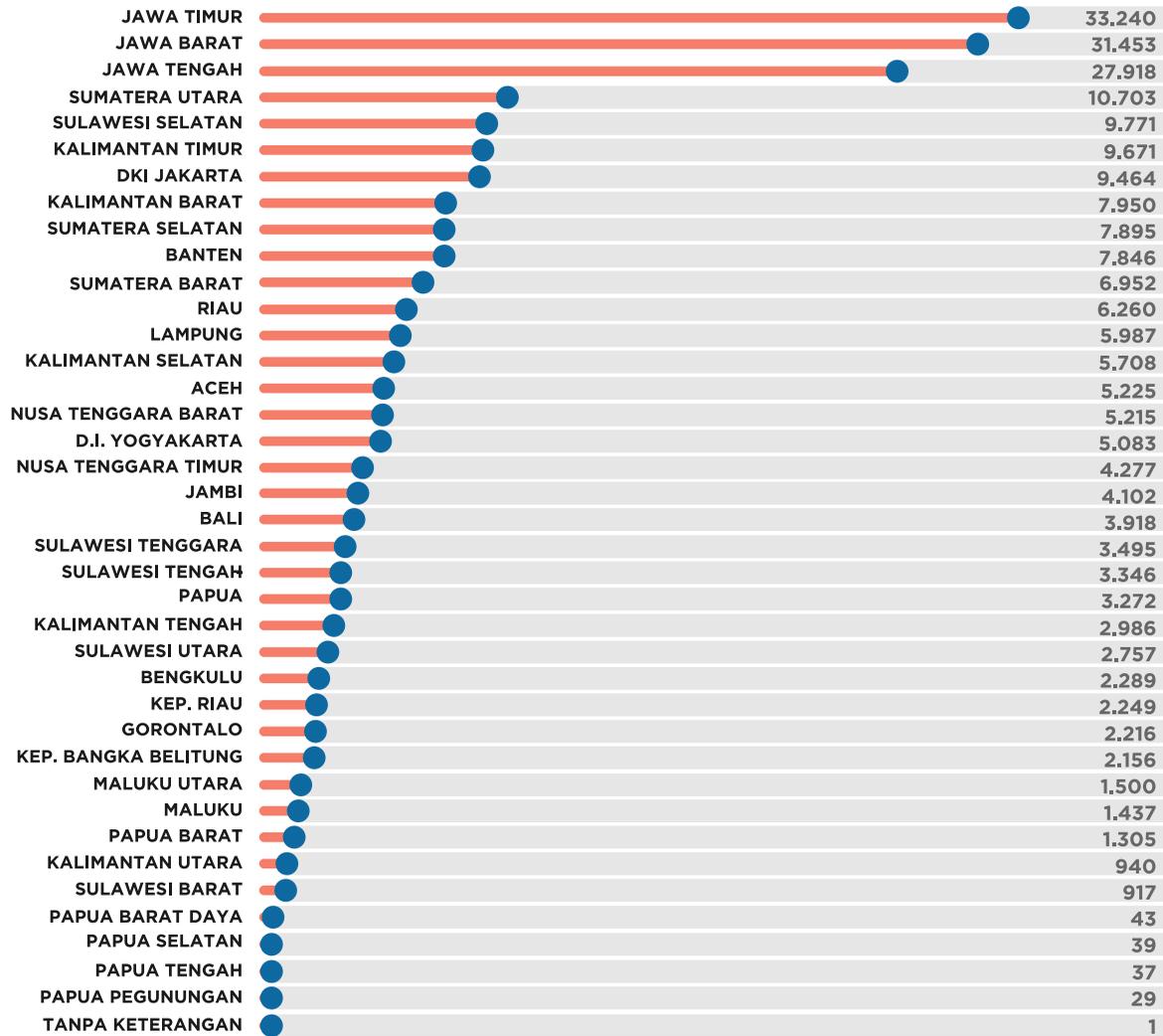
**Jumlah TKK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 13.216 TKK**



**Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat yang Diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LPJK Tahun 2023 terdapat 90.641 TKK dengan jumlah TKK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 13.216 TKK.



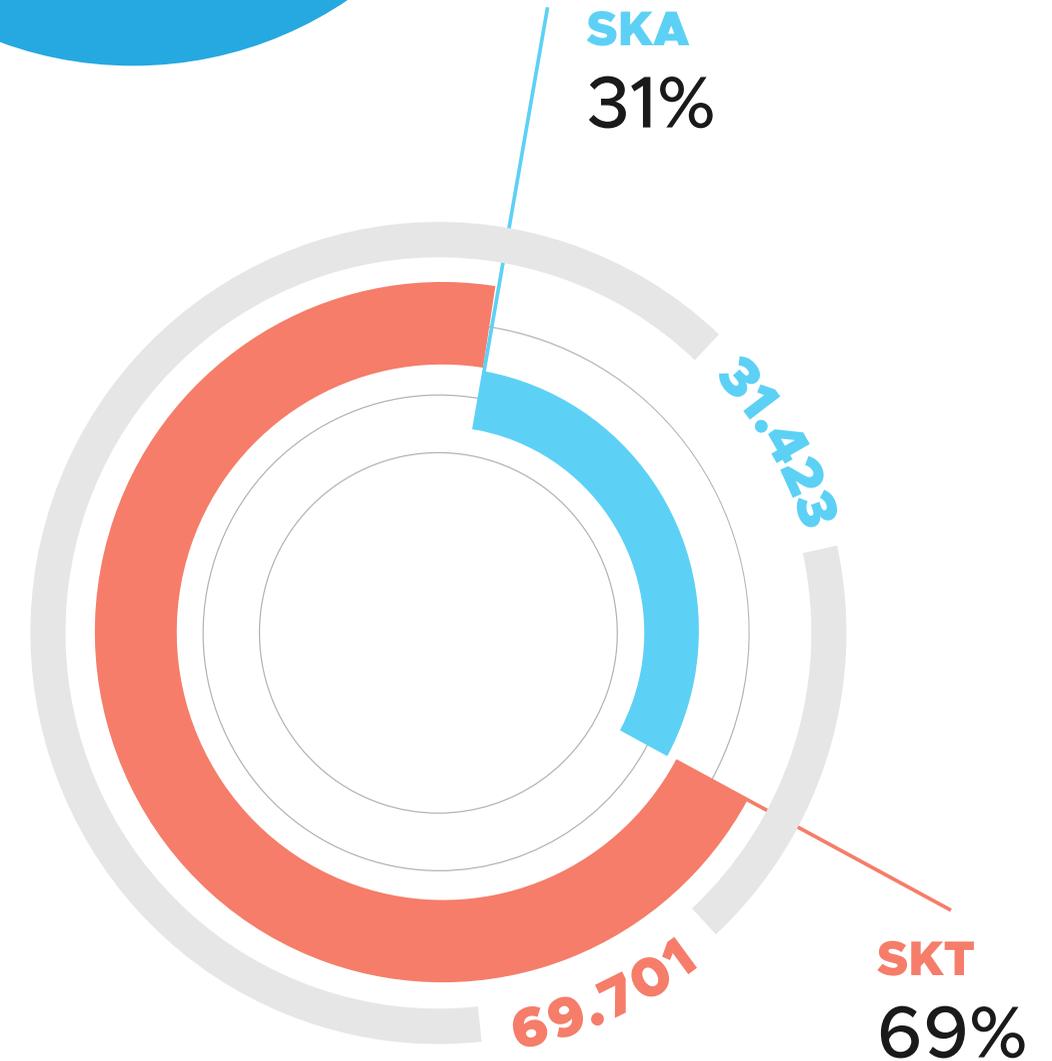


**Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat yang Diterbitkan oleh LSP Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LSP Tahun 2023 terdapat 239.652 TKK dengan jumlah TKK terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 33.240 TKK.

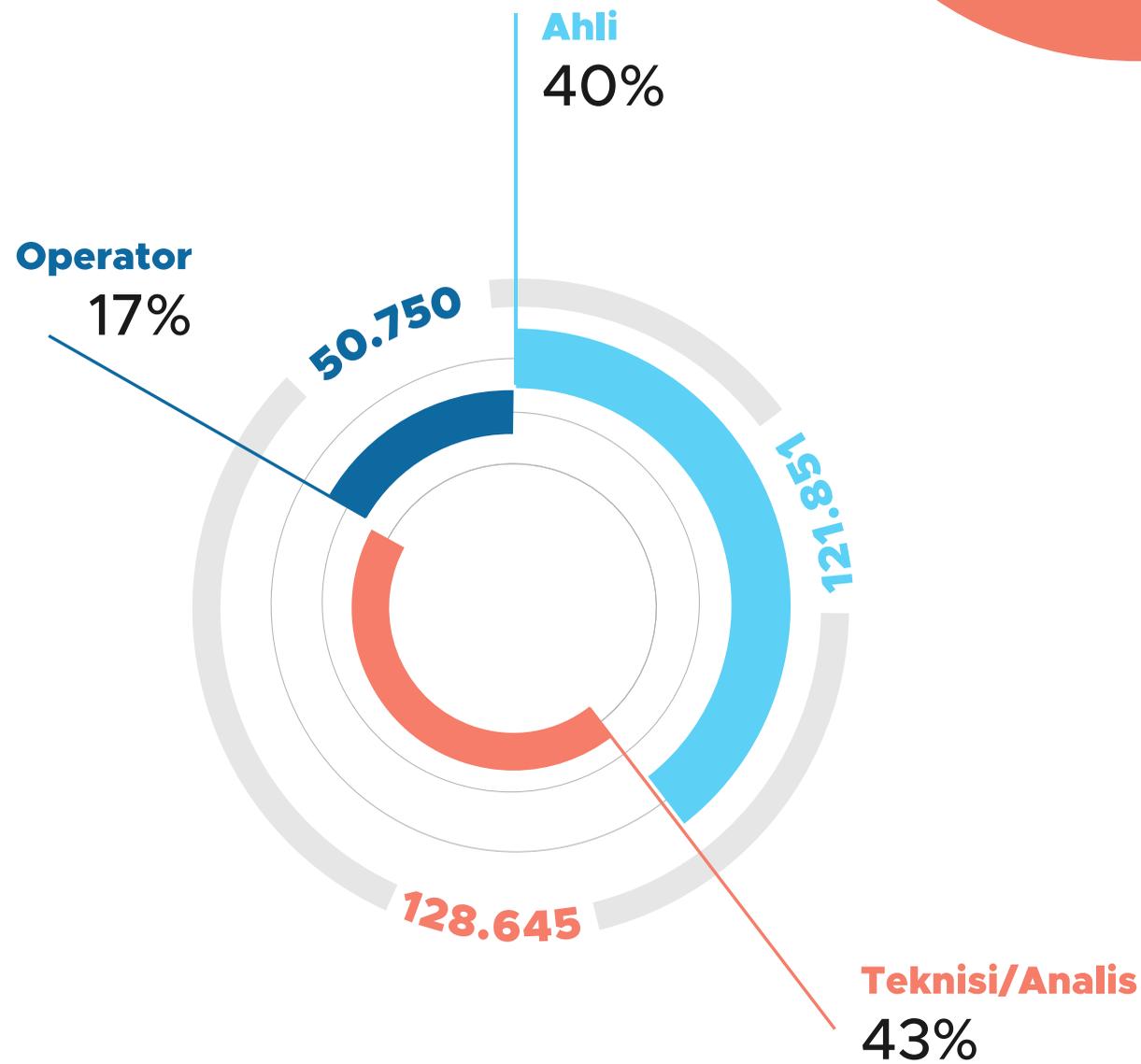
Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021, penerbitan SKK dilakukan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP). Namun, karena belum bisa dilaksanakan seluruhnya,

maka terdapat penerbitan SKK yang juga masih dilaksanakan oleh LPJK. Sehingga, sampai dengan akhir tahun 2023 SKK terbitan LPJK masih diakui dan sah untuk pembuktian standar kompetensi kerja di bidang konstruksi bersama dengan SKK terbitan LSP.



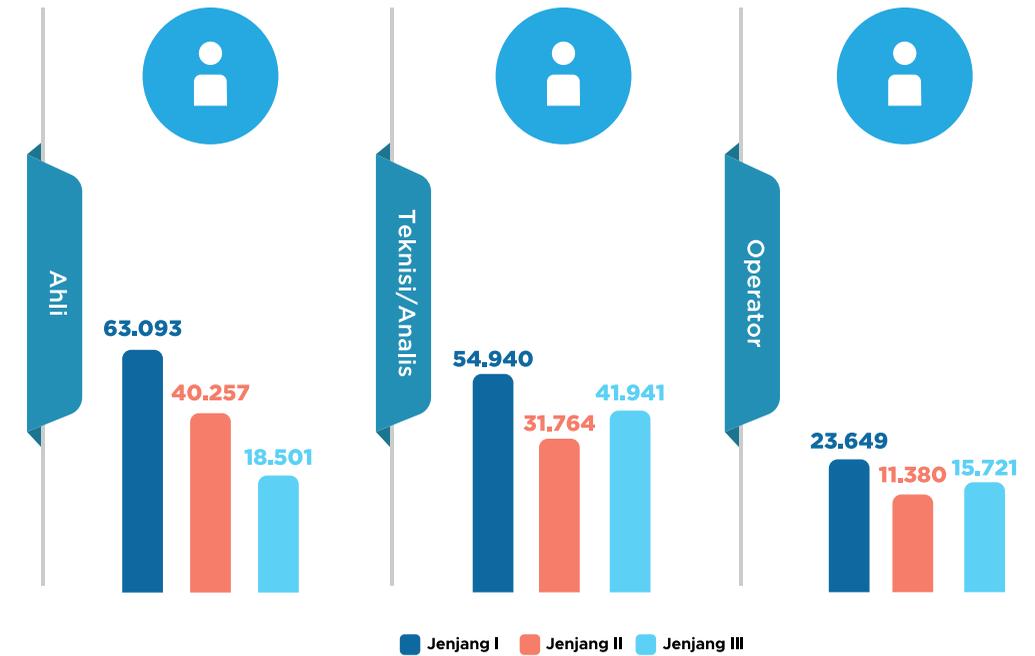
**Sertifikat Berdasarkan SKA dan SKT yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 101.124 Sertifikat yang tercatat pada LPJK. Persentase SKA sebesar 31% dengan jumlah 31.423 Sertifikat, sedangkan persentase SKT sebesar 69% dengan jumlah 69.701 Sertifikat.



**Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan Kualifikasi yang Diterbitkan oleh LSP Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 301.246 SKK yang tercatat pada LSP. Persentase SKK dengan dengan kualifikasi Teknisi/Analisis merupakan kualifikasi dengan persentase terbanyak yaitu 43% atau 128.645 SKK. Selanjutnya, kualifikasi Ahli dengan persentase 40% atau 121.851 SKK. Terakhir, kualifikasi Operator dengan persentase 17% atau 50.750 SKK.



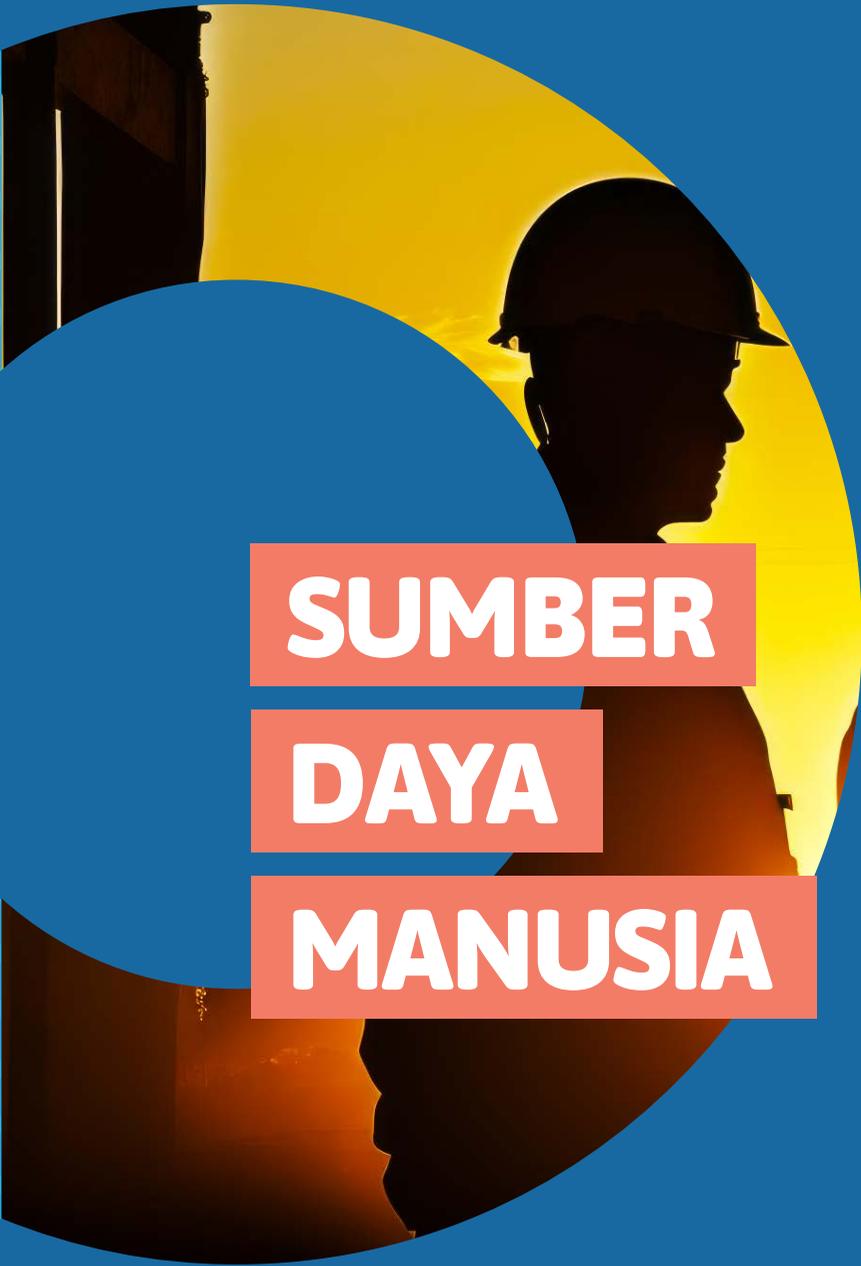
**Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan Jenjang yang diterbitkan oleh LSP Tahun 2023**  
 Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik terbitan LSP di atas, jenjang I merupakan jumlah SKK terbanyak diantara jenjang yang lainnya pada tiap kualifikasi. Jenjang I pada kualifikasi Ahli mencapai 63.093 SKK, Jenjang I pada kualifikasi teknisi/analisis mencapai 54.940 SKK, dan jenjang I pada kualifikasi operator mencapai 23.649 SKK.





Jembatan suramadu, Bangkalan



**SUMBER  
DAYA  
MANUSIA**



**BAB**

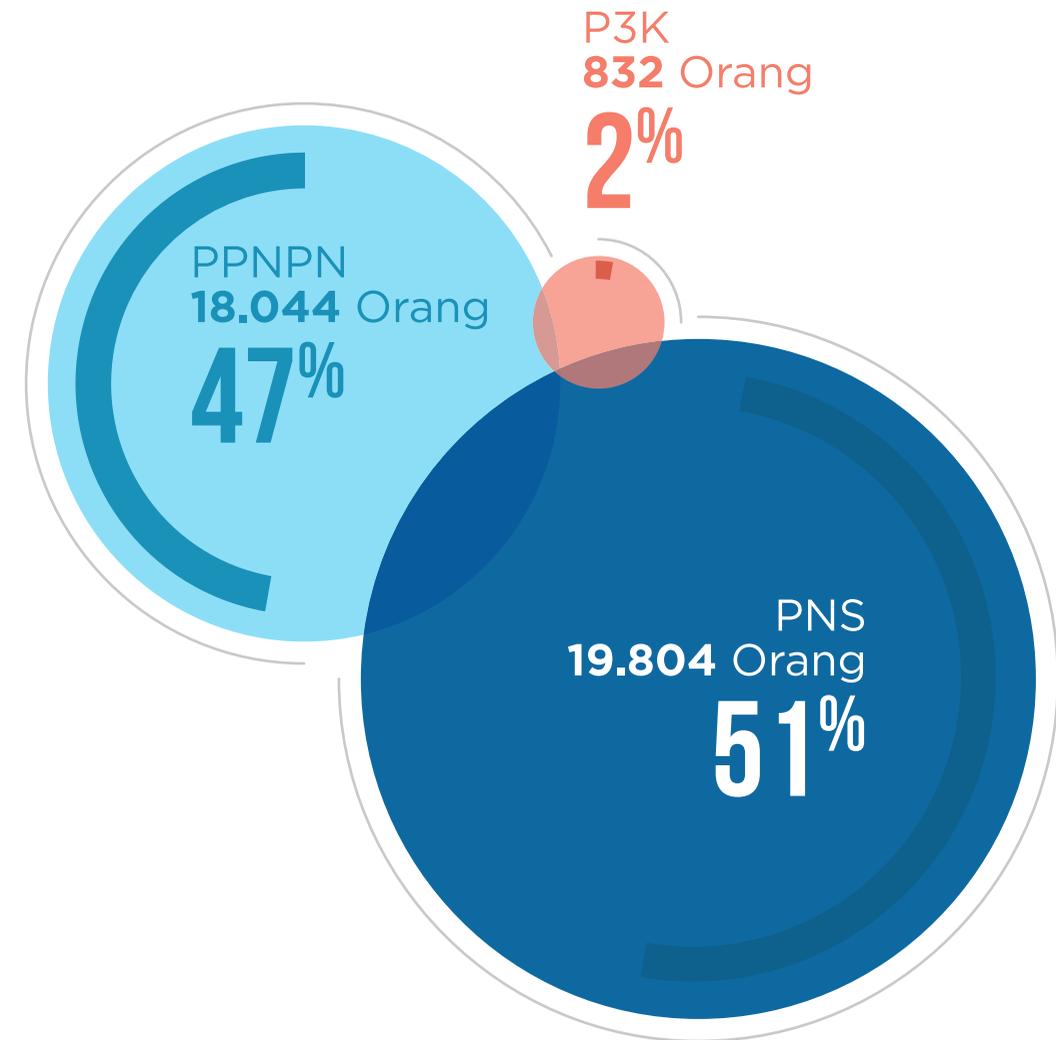
**08**

# SUMBER DAYA MANUSIA

# 08

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur. Kualitas maupun kuantitas SDM infrastruktur berpengaruh langsung terhadap *project & policy delivery*; tidak terbatas pada pelaksanaan proyek di lapangan. Oleh karena itu peningkatan dari segi kapasitas dan kompetensi SDM Kementerian PUPR perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur. Saat ini ASN Kementerian PUPR hingga bulan Desember tahun 2023 mencapai 38.680 pegawai yang terdiri dari 19.804 (51,20%) pegawai PNS, 832 (2,15%) pegawai P3K, dan 18.044 (46,65%) pegawai PPNPN.

*Saat ini ASN Kementerian PUPR hingga bulan Desember tahun 2023 mencapai 38.680 pegawai*



Persentase Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2023

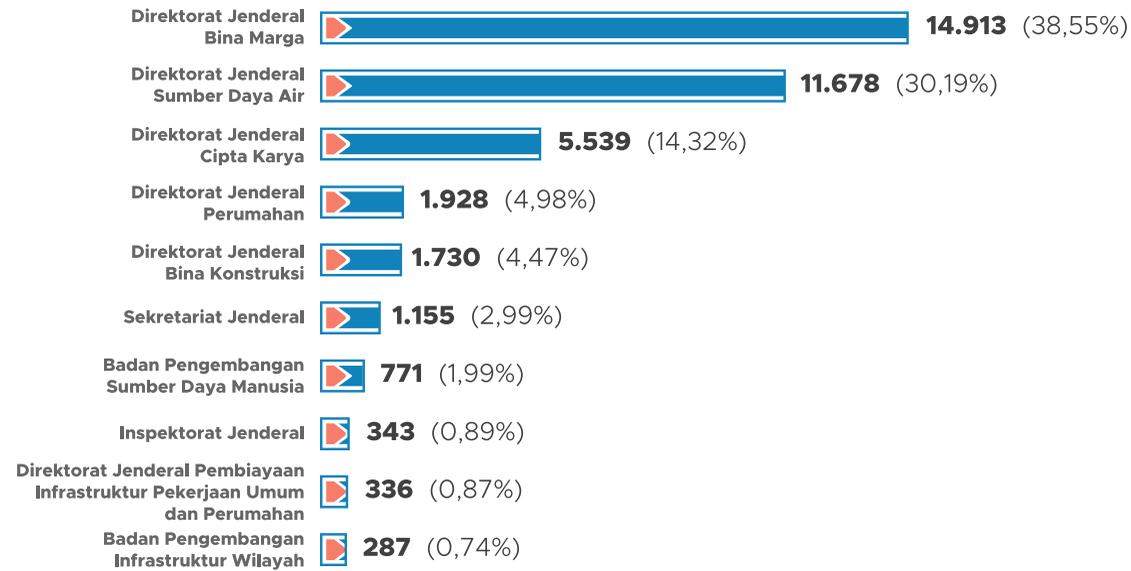
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



Sumber : [https://theopini.id/wp-content/uploads/2022/08/20220802\\_103747-scaled.jpg](https://theopini.id/wp-content/uploads/2022/08/20220802_103747-scaled.jpg)



Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai terbanyak berada di Ditjen Bina Marga sebanyak 38,55% (14.913 orang), Ditjen Sumber Daya Air 30,19% (11.678 orang), dan Ditjen Cipta Karya 14,32% (5.539 orang). Adapun unor dengan persentase pegawai paling sedikit ialah BPIW dengan 0,74% (287 orang).

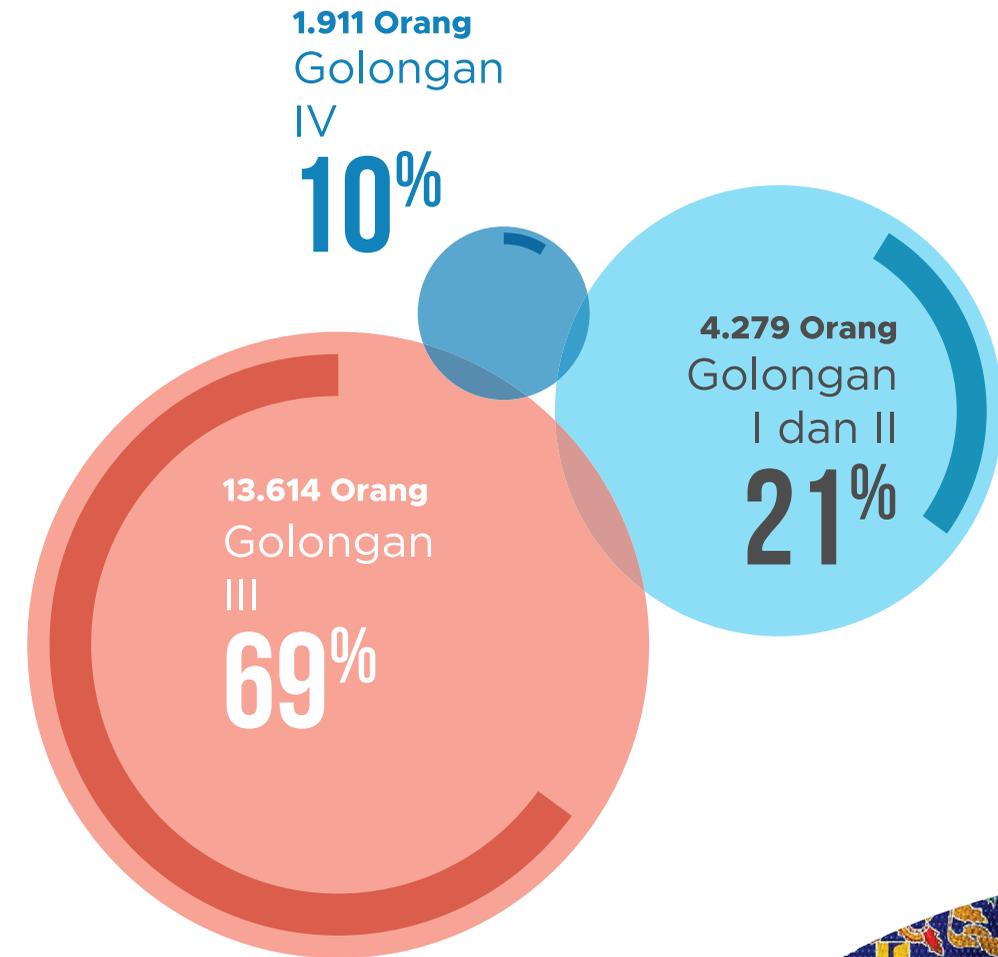


**Jumlah dan Persentase Pegawai**  
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Persentase pegawai terbanyak berada di Ditjen Bina Marga sebanyak 38,55% (14.913 orang)

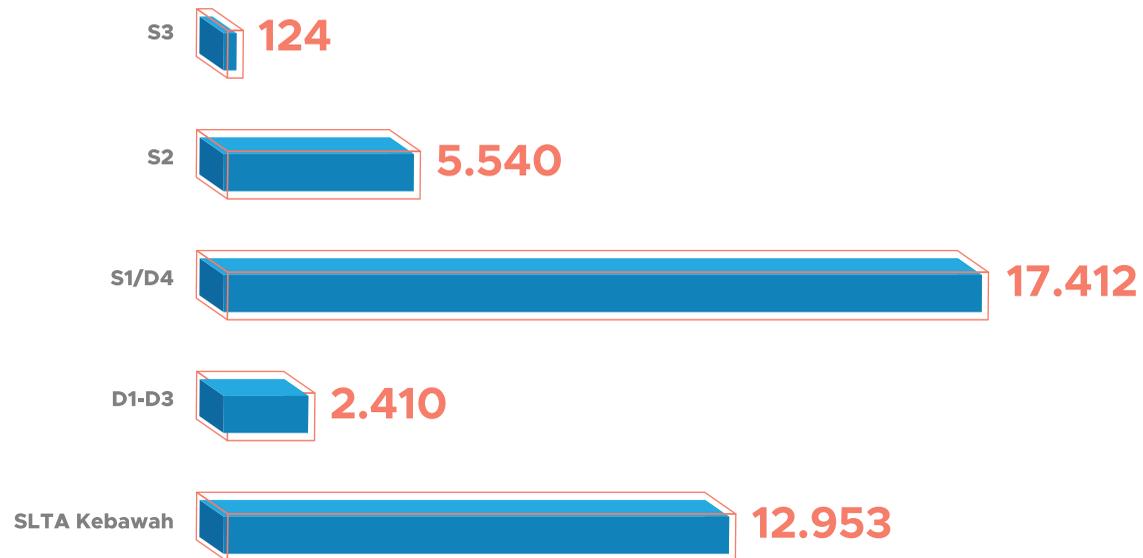
Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai ASN (PNS dan P3K) Kementerian PUPR dengan golongan IV mencapai 1.911 pegawai atau sebesar 9,65%. Kemudian pegawai dengan

golongan III sebanyak 13.614 pegawai atau sebesar 68,74% serta golongan II dan I terdapat 4.279 pegawai atau sebesar 21,61%.



**Persentase Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Kepangkatan**  
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

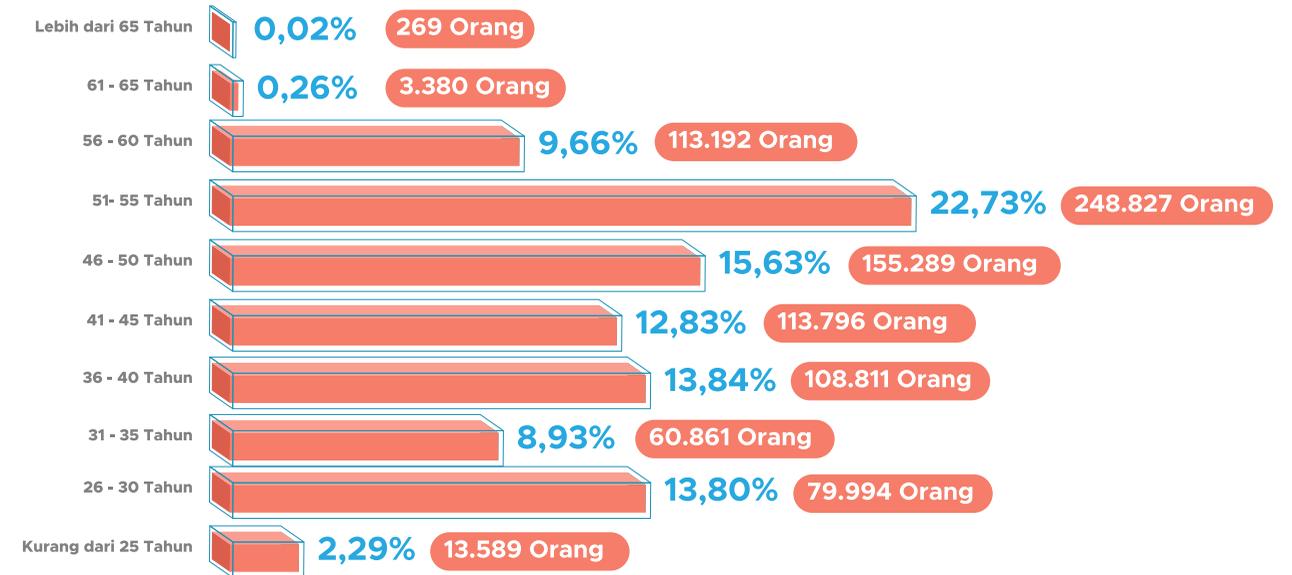
Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai dengan jenjang pendidikan S1/D4 menempati posisi terbanyak yaitu 17.412 orang atau sebesar 45,02%. Terbanyak kedua diikuti oleh pegawai dengan pendidikan yang ditamatkan paling tinggi SLTA, lalu kemudian Pascasarjana atau S2 sebanyak 5.540 orang. Sementara itu jumlah paling sedikit adalah pegawai dengan jenjang pendidikan S3 yang mencapai 124 orang.



**Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan**  
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Berdasarkan rentang usia, pada tahun 2023 tercatat jumlah pegawai pada rentang usia 51-55 tahun adalah yang terbanyak dengan persentase 22,73%. Terbanyak kedua yaitu pegawai pada rentang usia 46-50 tahun dengan

persentase 15,63%. Pegawai dengan rentang usia kurang dari 25 tahun hanya terdapat sebanyak 2,29% dari total seluruh pegawai. Secara keseluruhan, rata-rata usia pegawai yaitu 43 tahun.



**Persentase Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia**  
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Pada tahun 2023 tercatat jumlah pegawai pada rentang usia 51-55 tahun adalah yang terbanyak dengan persentase 22,73%



## Pengarusutamaan

### Gender

Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama.

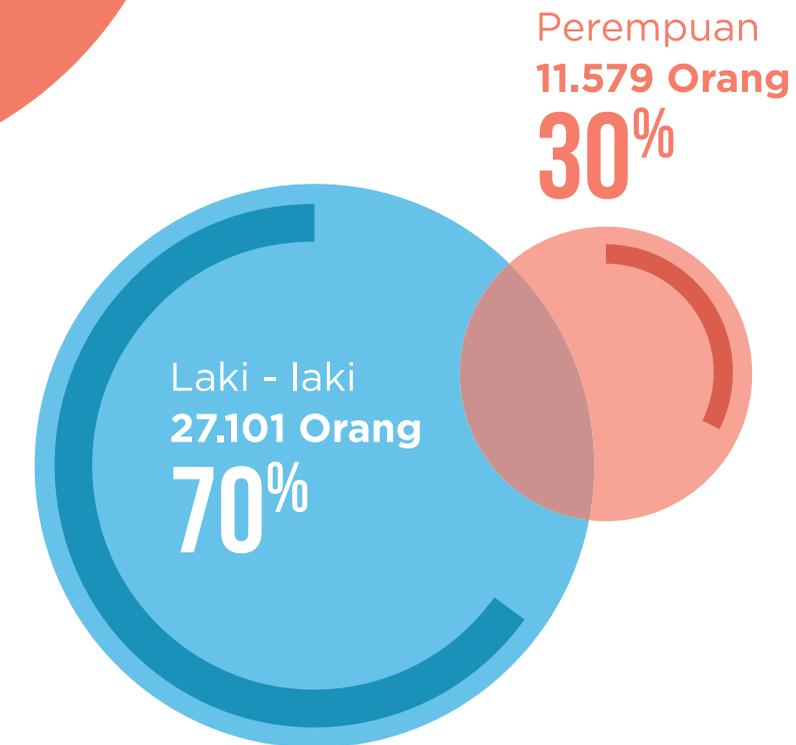
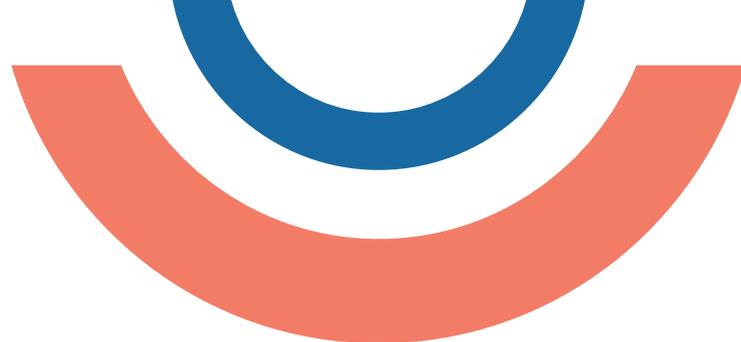
Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan difabel. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai upaya pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas telah mengamanatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG)

menjadi hal yang harus diperhatikan karena sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun saat ini Kementerian PUPR juga telah memiliki *Roadmap* PUG Tahun 2020-2024 sebagai bukti pelaksanaan komitmen tersebut.

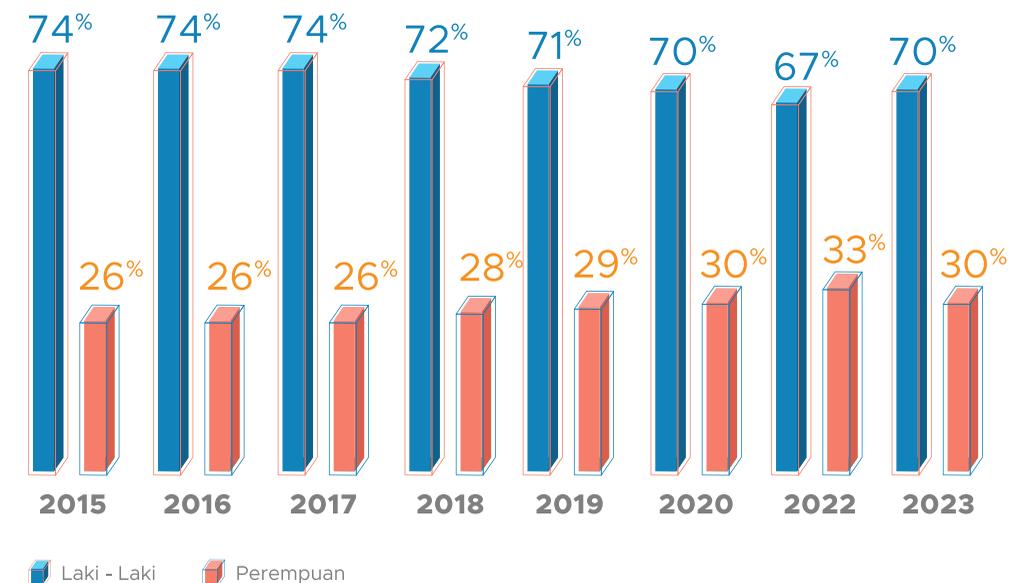
Salah satu keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR yang terus meningkat tiap tahunnya. Secara umum di tahun 2023 pegawai Kementerian PUPR masih didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 70,06%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 29,94%. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun jumlah pegawai perempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 183 pegawai. Kenaikan yang terjadi setiap tahun menandakan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

**“Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan”**



Persentase Jumlah Pegawai Laki-laki dan Perempuan

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



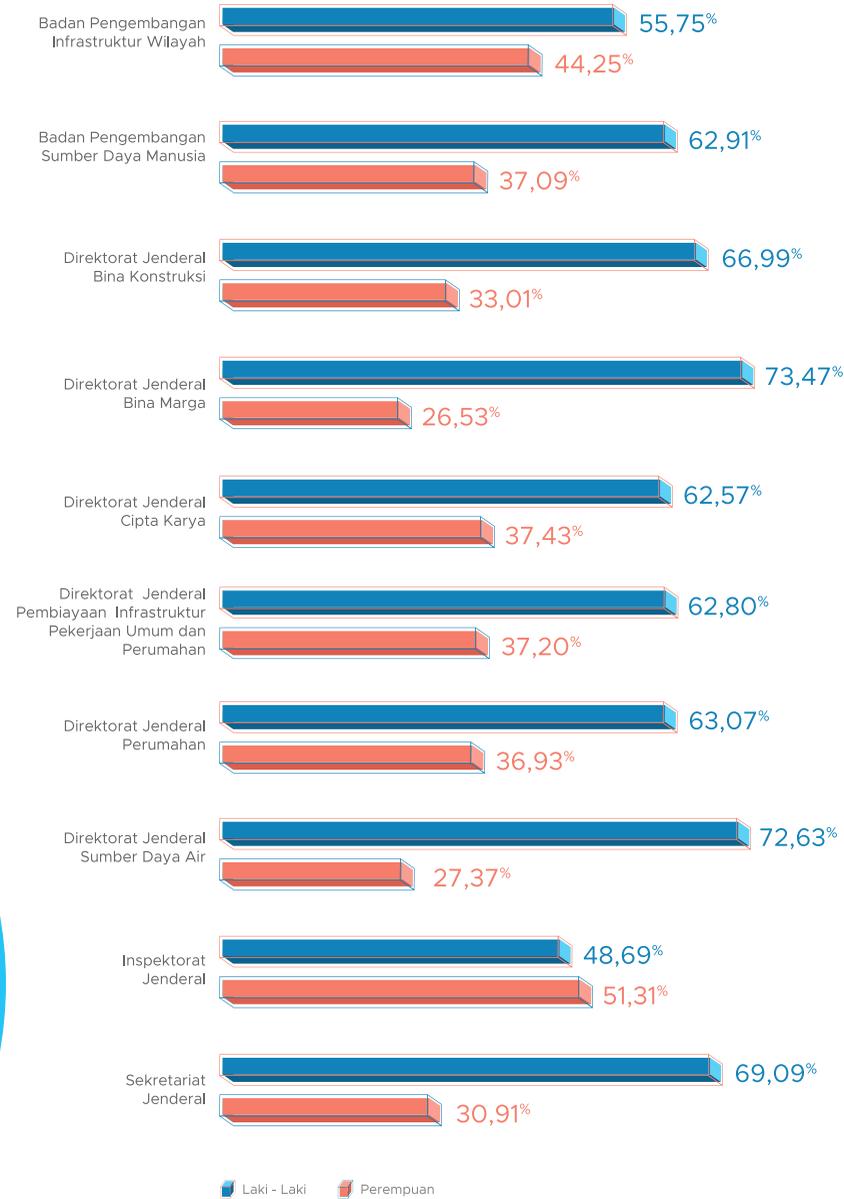
Persentase Gender Pegawai PUPR

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai perempuan terbesar berada di Inspektorat Jenderal yang mencapai 51,31% dari total jumlah pegawai, diikuti dengan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 44,25%. Adapun unor dengan persentase pegawai perempuan paling kecil ialah Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 26,53%.



**Persentase Pegawai Unit Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023





Jalan Tol Sayung, Demak

# PENUTUP



BAB

# 09

**PENUTUP**

09

Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PUPR. Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat menurut provinsi dan beserta analisis statistik singkatnya. Rintisan nama Buku Informasi Statistik per tahun seperti berikut:

2006	Buku Induk Kestatistikan
2007	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2008	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2009	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2010	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2011	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2012	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum

2013	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
2014	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum
2015	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2016	Buku Induk Statistik
2017	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2018	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2019	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2020	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2021	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2022	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka penyebarluasan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan yang bermanfaat dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, serta diharapkan buku ini juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dalam sajian yang lebih mudah dipahami dan sebagai referensi data dan informasi tentang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

“Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR



# INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2023

## Pengarah

Mohammad Zainal Fatah

## Koordinator

Nazib Faizal  
Komang Sri Hartini

## Penulis

Setia Dewi Prihapsari  
Mayta Utari  
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi  
Naufal Azaki  
Rozi Abrori Fathurrochim  
Nita Fikhriani Azhari  
Shinta Afwa Nisaa

## Editor dan Tata Letak

Siti Nurdini  
Solichin Syafril

## Kontributor

Sekretariat Jenderal  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  
Direktorat Jenderal Bina Marga  
Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Direktorat Jenderal Perumahan  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Badan Pusat Statistik  
Arief Ardhian Nugroho

## Penerbit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**Maret 2024**

Informasi Statistik Infrastruktur PUPR

